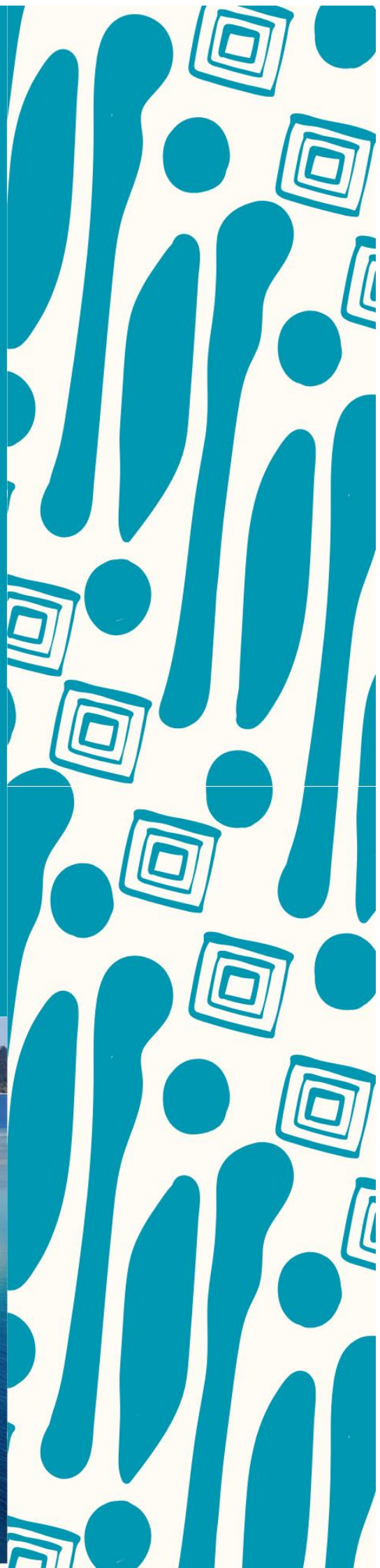




RENCANA STRATEGIS

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

2025-2029







RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 2029 memuat tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan menjadi acuan segenap unit kerja lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang fokus pada pengembangan ekonomi kelautan dan kemaritiman sesuai dengan Konsep Pembangunan Nasional yang terkandung dalam Asta Cita Pembangunan Nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 terdapat 8 (delapan) misi, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ikut berperan dalam melaksanakan Misi 2 **Sumbar Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan**. Disamping itu juga mendukung Misi 8 **Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif**.

Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan. Tugas membangun kelautan dan perikanan kedepan adalah tugas bersama, bukan merupakan tugas pemerintah semata. Oleh karena itu dibutuhkan partisipasi dan sinergi dari masyarakat luas dan kerja keras tanpa pamrih untuk saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kelautan dan perikanan guna mewujudkan Visi "**Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan**"

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kearah yang lebih baik.

Padang, April 2025
Kepala Dinas,

Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp

Pembina Utama Madya
NIP. 19670312 199308 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iiii
KATA PENGANTAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	15
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	17
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DAERAH.....	19
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
A. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	19
B. SUMBERDAYA (SDM) PERANGKAT DAERAH.....	33
C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	42
D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	131
E. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN.....	131
F. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA.....	132
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	133
A. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	133
B. ISU STRETEGIS.....	136
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	144
3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	146
3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	152
3.3 MANAJEMEN RESIKO.....	155
3.4 PENAHAPAN RENCANA STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.....	163
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN.....	164
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	164
4.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	187
4.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).....	189
BAB V PENUTUP.....	190
5.1 KESIMPULAN.....	190
5.2 KAJIDAH-KAJIDAH PELAKSANAAN.....	191
5.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA.....	191
5.4 MANAJEMEN RESIKO.....	192
5.5 KOLABORASI MULTIPIHAK.....	192

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agenda Kerja Penyusunan Renstra.....	12
Tabel 2.1.1	Rekapitulas Sumberdaya Manusia (SDM).....	33
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana.....	35
Tabel 2.1.3	Pencapaian Kinerja Pendapatan DKP Prov Sumbar Tahun 2021-2026....	46
Tabel 2.1.4	Pengukuran Jumlah Pendapatan Pembudidaya dan Nelayan Tahun 2024	47
Tabel 2.1.5	Pendapatan per Pembudidaya Tahun 2024.....	47
Tabel 2.1.6	Pendapatan Nelayan Tahun 2024.....	48
Tabel 2.1.7	Pengukuran Pendapatan Tahun 2023-2024.....	49
Tabel 2.1.8	Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Nasional.....	50
Tabel 2.1.9	Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama DKP Prov Sumbar Tahun 2021-2026.....	51
Tabel 2.1.10	Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah DKP Prov Sumbar Tahun 2021-2026 (Tangkap).....	53
Tabel 2.1.11	Potensi Sumberdaya Ikan di WPPNRI 572.....	54
Tabel 2.1.12	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan 2024.....	56
Tabel 2.1.13	Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan 2024.....	58
Tabel 2.1.14	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2024.....	60
Tabel 2.1.15	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun Akhir Renstra.....	61
Tabel 2.1.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	61
Tabel 2.1.17	Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nasional.....	61
Tabel 2.1.18	Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah DKP Prov Sumbar Tahun 2021-2026 (Budidaya).....	67
Tabel 2.1.19	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 dan 2024.....	68
Tabel 2.1.20	Pendapatan per Pembudidaya Tahun 2024.....	69
Tabel 2.1.22	Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Tahun 2023-2024.....	71
Tabel 2.1.23	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024.	72
Tabel 2.1.24	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	73
Tabel 2.1.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahunn Ini dengan Standar Nasional.....	73
Tabel 2.1.26	Capaian Peningkatan Produksi Budidaya dan Nasional.....	74
Tabel 2.1.27	Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah DKP Prov Sumbar Tahun 2021-2026 (Pengolahan dan Pemasaran).....	78
Tabel 2.1.28	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja.....	79
Tabel 2.1.29	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024	82
Tabel 2.1.30	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	83
Tabel 2.1.31	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	83
Tabel 2.1.32	Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Tahun 2023-2024.....	86
Tabel 2.1.33	Rekapitulasi Jumlah Bantuan Pengolah dan Pemasaran Tahun 2023-2024	87
Tabel 2.1.34	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja.....	88
Tabel 2.1.35	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	88
Tabel 2.1.36	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	89
Tabel 2.1.37	Capaian Peningkatan Produksi Olahan Nasional.....	89
Tabel 2.1.38	Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah DKP Prov Sumbar Tahun Tahun 2021-2026 (Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil).....	95

Tabel 2.1.39	Luas Terumbu Karang Sumatera Barat.....	97
Tabel 2.1.40	Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat.....	99
Tabel 2.1.40.a	Luas Padang Lamun.....	101
Tabel 2.1.41	Indikator Kinerja, Target dan Realisasi dari Sasaran.....	105
Tabel 2.1.42	Penilaian Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	106
Tabel 2.1.43	Lokasi Kawasan Konservasi Pemerintah Daerah.....	107
Tabel 2.1.44	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja, Sasaran Tahun 2023-2024.....	110
Tabel 2.1.45	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	110
Tabel 2.1.46	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional.....	110
Tabel 2.1.47	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota Prov Sumatera Barat.....	115
Tabel 2.1.48	Sebaran pulau-pulau kecil menurut Kab/Kota di Provinsi Sumbar.....	116
Tabel 2.1.49	Nilai Akintabilitas Kinerja Tahun 2020-2022.....	117
Tabel 2.1.50	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya Tahun 2022-2024.....	117
Tabel 2.1.51	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	118
Tabel 2.1.52	Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akintabilitas (%) Tahun 2020 s/d 2024	120
Tabel 2.1.53	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.....	121
Tabel 2.1.54	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.....	123
Tabel 2.1.55	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra.....	124
Tabel 2.1.57	Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Tahun 2022 s/d 2025.....	130
Tabel 3.1.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP Prov Sumbar.....	147
Tabel 3.1.2	Formulasi Penghitungan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran.....	149
Tabel 3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan.....	154
Tabel 3.3.1	Manajemen Resiko Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Prov Sumbar Tahun 2025-2029.....	157
Tabel 3.3.2	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Atas Resiko Strategi DKP Prov Sumbar Tahun 2025-2029.....	162
Tabel 3.4.1	Penetapan Rencana Strategi.....	163
Tabel 4.1	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2025-2029 DKP Prov Sumbar.....	168
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) DKP Prov Sumbar.....	187
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DKP Prov Sumbar.....	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	13
Gambar 1.3	Kedudukan Renstra SKPD Dalam Alur Perencanaan dan Penganggaran Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional.....	14
Gambar 1.4	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD.....	15

DAFTAR GRAFIK

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2022-2024.....	60
2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah bantuan yang diserahkan tahun 2022-2024.....	62
3. Jumlah produksi Budidaya dan Jumlah Pembudidaya.....	70
4. Persentase perbandingan dan capaian indikator persentase produksi perikanan Budidaya.....	73
5. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya dan jenis bantuan yang Diserahkan tahun 2022-2024.....	74
6. Perbandingan realisasi dan capaian indikator nilai ekspor hasil perikanan Tahun 2022-2024.....	82
7. Perkembangan Nilai ekspor tahun 2022-2024.....	84
8. Persentase produk olahan.....	90
9. Indeks Kepuasan Layanan.....	123
10. Pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.....	129



PENDAHULUAN

BAB 1

1.1. LATAR BELAKANG

Sumatera Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.120,00 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pantai Barat Sumatera dengan potensi Kelautan dan Perikanan yang cukup menjanjikan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas wilayah laut sebesar 3.409.837, 37 Ha dengan panjang garis pantai yaitu 2.299,08 km² dengan jumlah pulau 219 pulau-pulau kecil dan 3 jumlah pulau terluar. Berdasarkan kondisi geografis wilayah laut dan darat memiliki potensi strategis yang dapat dikembangkan di berbagai sektor. Selama ini sudah dilakukan pembangunan dan pemanfaatan di sektor kelautan dan perikanan, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, perhubungan, pariwisata baik di pesisir maupun pulau pulau kecil. Untuk usaha perikanan budidaya air tawar, Sumatera Barat mempunyai empat danau yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas dan Danau Di bawah dengan luas keseluruhan 27.511 Ha ditambah dengan lahan yang dapat dijadikan tambak yang berada di daerah pantai. Sumberdaya jenis ikan laut di Provinsi Sumatera Barat meliputi ikan tongkol, tuna, cakalang, kembung, tenggiri, dan lain-lain. Daerah yang mempunyai terbanyak ikan laut adalah Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan dan paling sedikit adalah Kota Pariaman. Namun, seluruh potensi diatas belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menjawab isi-isu strategis yang masih menjadi kendala saat ini.

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah masa depan peradaban bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipandang sebelah mata, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

rakyat. Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 menghasilkan Wawasan Nusantara, yang menjadikan laut sebagai penghubung, tidak lagi sebagai pemisah. Ini juga berdampak pada diakuinya Indonesia pada Konvensi Hukum Laut tahun 1982 sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Pemerintah berkomitmen untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya laut dengan bijaksana yang menempatkan ekologi sebagai panglima, dengan menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh sebab itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan pada terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap terutama pada pelabuhan perikanan. Pengolahan hasil perikanan yang telah ada masih perlu ditingkatkan menjadi berbagai bentuk produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Sejumlah isu lingkungan juga dihadapi dalam upaya pencegahan terhadap kerusakan kawasan pesisir dan laut. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan produktifitas perikanan budidaya karena masih terbatasnya sarana usaha yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan begitu juga dengan penguasaan teknologinya, sehingga yang menjadi permasalahannya bukan produksinya akan tetapi keterbatasan sarana usaha dan teknologinya.

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganan dan pengolahan ikan sehingga mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir.

Potensi Kelautan dan Perikanan dan Perikanan tidak hanya mencakup aspek eksploitasi untuk menghasilkan produk saja tapi juga mencakup upaya untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Luas Kawasan Konservasi di Sumatera Barat adalah : 372.432,97 Ha (10,92% dari luas wilayah laut Sumatera Barat. Dalam rangka perlindungan dan keberlanjutan sumberdaya di Sumatera Barat telah ditetapkan 7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Unit





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Pengelola yaitu UPTD Konservasi dan Pengawasan untuk mengelola Kawasan Konservasi Daerah tersebut yaitu : KKPD Kab. Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kab. Padang Pariaman, KKPD Kota Pariaman, KKPD Kab. Pasaman Barat, KKPD Kab. Agam dan KKPD Kab. Mentawai.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Disamping itu sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diktum kedua, setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini disusun berdasarkan Berpedoman Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang paling sedikit memuat informasi analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan Dokumen Perencanaan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program dan kegiatan-kegiatan yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait, yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun ke depan (2025 - 2029).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui Tahapan Persiapan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan Akhir hingga Penetapan Renstra yang telah dimulai dari penyusunan Rencana program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga berdasarkan analisis lingkungan, isu - isu strategis atas potensi dan peluang, permasalahan yang mendasar dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional maupun provinsi. Dokumen Renstra yang disusun dengan mempedomani RPJMD dan RPJMN, dan RTRW Provinsi Sumatera Barat. Renstra yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Menghadapi berbagai tantangan ini, diperlukan kerjasama dan Kolaborasi yang erat antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Forkopimda, DPRD, seluruh instansi perwakilan Pemerintah Pusat yang ada di Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Akademisi, sektor swasta serta Organisasi Masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat dan kebijakan yang tepat, dalam 5 (lima) tahun kedepan Sumatera Barat akan dapat mewujudkan Visi **Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkeadilan**. Substansi





dari Visi ini adalah Mewujudkan Masyarakat Sumbar yang religious dengan nilai spiritual yang tinggi, berpikiran maju dan memiliki tatanan kehidupan demokratis serta berkeadilan, dan berperadaban maju dengan pembangunan di semua aspek berbasiskan nilai dan norma 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah', berkeadilan serta berprinsip kepada Pembangunan yang inklusif dapat dirasakan semua pihak serta tetap memperhatikan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi Sumatera Barat 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. **Misi Pertama : Pendidikan yang merata dan Kesehatan yang berkualitas** dengan taglinenya : "Gerak Cepat Sumbar Unggul", Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke Empat Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Saint dan Teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Misi pertama ini memfokuskan pada upaya pemerataan pendidikan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai fondasi utama dalam pembangunan daerah.
2. **Misi ke Dua : Sumbar Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan** dengan tagline : "Gerak Cepat Sumbar Sejahtera", Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke Dua Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu : Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru. Misi kedua ini berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai lumbung pangan nasional serta penerapan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
3. **Misi Ketiga : Wujudkan Kemajuan Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan** dengan taglinenya : "Gerak Cepat Sumbar Berdaya". Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke Enam Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Misi ketiga bertujuan untuk mempercepat pembangunan nagari dan desa melalui pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
4. **Misi ke Empat : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Wilayah Barat Indonesia** dengan tagline : "Gerak Cepat Sumbar Maju", Misi





ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke lima Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di Dalam Negeri. Misi keempat ini bertujuan menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan utama di wilayah barat Indonesia.

5. **Misi ke Lima : Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana** dengan taglinenya: “Gerak Cepat Sumbar Kuat”, Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke delapan Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Memperkuat Penyelerasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragam untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Misi kelima ini menitikberatkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi serta peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
6. **Misi ke Enam : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas** dengan taglinenya : “Gerak Cepat Sumbar Harmonis”, Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita pertama Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Misi keenam ini berfokus pada penguatan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta peningkatan kualitas kehidupan keluarga di Sumatera Barat.
7. **Misi ke Tujuh : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM** dengan tagline : “Gerak Cepat Sumbar Kreatif”. Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke tiga Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Misi ketujuh ini berfokus pada peningkatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
8. **Misi ke Delapan : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif** dengan taglinenya : “Gerak Cepat Sumbar Responsif”. Misi ini sudah diselaraskan dengan Asta Cita ke tujuh Presiden yang termuat dalam RPJMN 2025 – 2029 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pembrantasan korupsi dan narkoba. Misi





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

kedelapan berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berintegritas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berada pada Misi Kedua, “Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan” terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini memiliki beberapa fungsi yaitu :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kontrak kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Proses Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tahapan sebagaimana diatur sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/44/II/P2EPD/Bappeda-2025 yakni :

1. **Persiapan Penyusunan**

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan Penyusunan Renstra adalah:

- a. Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tim penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera ditunjuk/dibentuk oleh Kepala Dinas.

- b. Orientasi mengenai Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Orientasi mengenai Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mulai dari Penetapan SK Tim Penyusunan Renstra, Sosialisasi draft Renstra dengan Bidang/UPTD, melakukan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait.
- d. Pengumpulan Data dan Informasi.
Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah - langkah sebagai berikut:
 - Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra OPD dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
 - Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis

2. Penyusunan Rancangan Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu :

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024
- b. Analisis permasalahan pelayanan Perangkat Daerah 2021-2024
- c. Penelaahan Dokumen Perencanaan lainnya, antara lain :
 - Telaahan terhadap sasaran Visi, Sasaran pokok dan arah Kebijakan pada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030
- Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Telaahan terhadap Rancangan Renstra Perangkat daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan dan tugas serta fungsi Perangkat Daerah
- Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

d. Analisis Isu Strategis

Kegiatan ini melakukan review kembali terhadap factor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sehingga dapat disusun isu strategis Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021-2024
- Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029
- Sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat Daerah

f. Perumusan Startegi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

3. Penyusunan Rancangan

Tahapan ini dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan disempurnakan berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dakan rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah





5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

6. Tahap Penetapan Renstra

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada bidang terkait pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Untuk selanjutnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat. Dokumen ini memberikan gambaran wujud pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025- 2029 dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan daerah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 523-290-2025. Proses penyusunan dimulai dari persiapan sampai dengan penetapan Renstra seperti yang terlihat ada Tabel dan Gambar 1.1 berikut :





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tabel 1.1
Agenda Kerja Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera

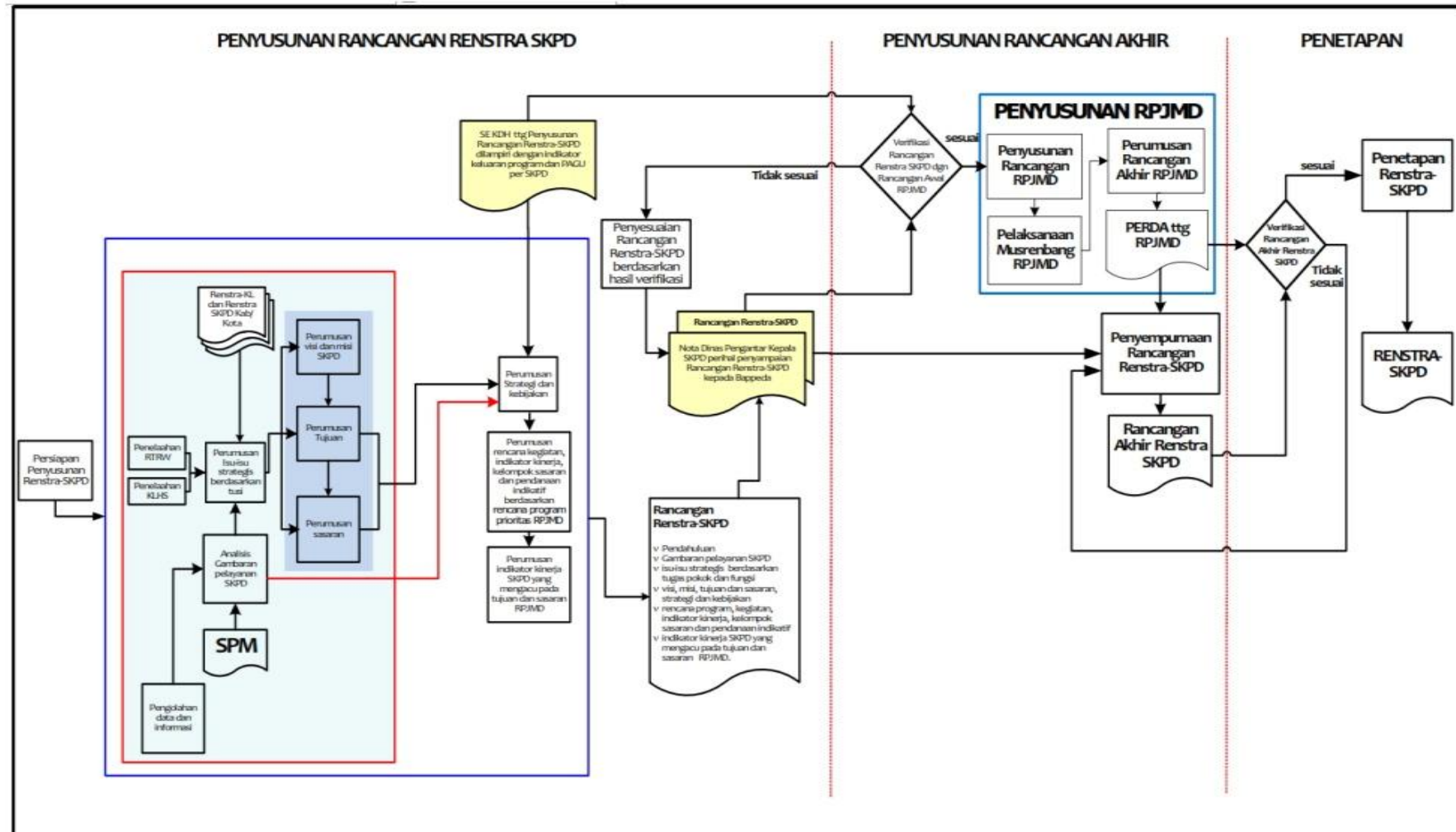
No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Persiapan Penyusunan																																																
	- Pembentukan Tim Penyusun Renstra																																																
	- Penyusunan Agenda Kerja Tim																																																
	- Penyiapan Data dan Informasi																																																
	Perencanaan Pembangunan																																																
	- Orientasi Mengenai Renstra																																																
2	Penyusunan Rancangan Awal Renstra																																																
3	Penyusunan Rancangan Renstra																																																
4	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah																																																
5	Penyempurnaan Rancangan Renstra																																																
6	Penyampaian Rancangan Renstra																																																
7	Verifikasi Rancangan Renstra																																																
8	Penyempurnaan Rancangan Renstra																																																
9	Perumusan Rancangan Akhir Renstra																																																
10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Rancangan Akhir Renstra																																																
11	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra																																																
12	Penetapan Renstra																																																
13	Sosialisasi Renstra																																																





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Gambar 1.2 Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

The diagram illustrates the National and Regional Planning System, divided into two main horizontal sections: **Pemerintah Pusat** (Central Government) at the top and **Pemerintah Daerah** (Regional Government) at the bottom. The system is organized into three vertical columns representing different levels of planning: **Nasional** (National), **Daerah** (Regional), and **SKPD** (Service/Agency).

Central Government (Pemerintah Pusat):

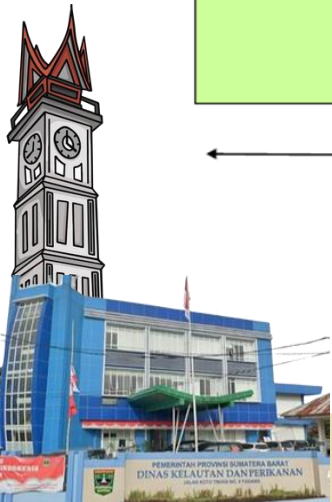
- Nasional Level:** RPJP Nasional (National Long-Term Development Plan) leads to RPJM Nasional (National Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline). RPJM Nasional leads to RKP (Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Detailed). RKP leads to RAPBN (Regional Annual Budget) via *Pedoman*. RAPBN leads to APBN (National Annual Budget) via *Pedoman*.
- SKPD Level:** Renstra KL (Central Government Strategic Plan) leads to Renja - KL (Central Government Action Plan) via *Pedoman*. Renja - KL leads to RKA - KL (Central Government Annual Budget) via *Pedoman*. RKA - KL leads to Rincian APBN (Detailed National Annual Budget) via *Pedoman*.
- Interactions:** RPJM Nasional and RKP are linked by *Bahan* (Material) and *Diacu* (Referenced) arrows. Renja - KL and RKA - KL are linked by *Bahan* and *Diacu* arrows.

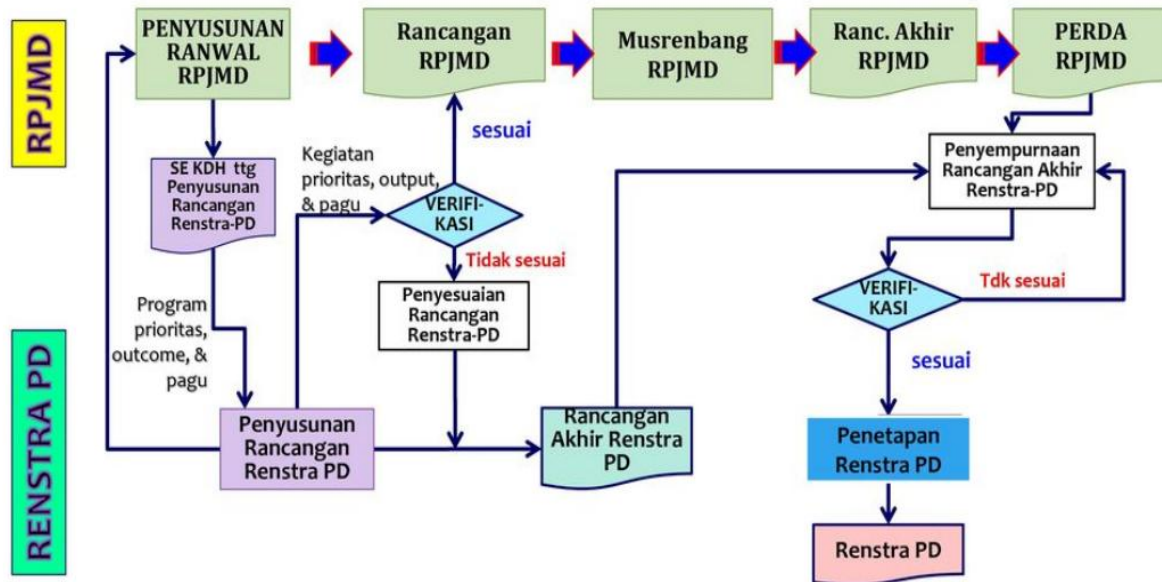
Regional Government (Pemerintah Daerah):

- Daerah Level:** RPJP Daerah (Regional Long-Term Development Plan) leads to RPJM Daerah (Regional Medium-Term Development Plan) via *Pedoman*. RPJM Daerah leads to RKP Daerah (Regional Development Plan) via *Dijabarkan*. RKP Daerah leads to RAPBD (Regional Annual Budget) via *Pedoman*. RAPBD leads to APBD (Regional Annual Budget) via *Pedoman*.
- SKPD Level:** Renstra SKPD (Regional Strategic Plan) leads to Renja - SKPD (Regional Action Plan) via *Pedoman*. Renja - SKPD leads to RKA - SKPD (Regional Annual Budget) via *Pedoman*. RKA - SKPD leads to Rincian APBD (Detailed Regional Annual Budget) via *Pedoman*.
- Interactions:** RPJM Daerah and RKP Daerah are linked by *Bahan* and *Diacu* arrows. Renja - SKPD and RKA - SKPD are linked by *Bahan* and *Diacu* arrows.

Legal Basis:

- UU SPPN (Law on Regional Planning):** Governs the National and Regional Planning System (SPPN).
- UU KN (Law on Regional Budget and Finance Management):** Governs the Regional Budget and Finance Management System (KN).



**Gambar 1.4****Keterkaitan tahapan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD****1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ini di buat berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
3. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan pedoman dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2025-2029, terutama dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani khususnya Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung visi dan misi dari Pemerintah Daerah serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

2025-2029, sekaligus sebagai pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan dengan memperhatikan harmonisasi dan sinergisitas antara Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah atau K/L dengan provinsi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut :

- Memberikan arah pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029.
- Merumuskan program prioritas pembangunan kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat.
- Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

a. Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

b. Isu Strategis

BAB III

TUJUAN, SASARAN , STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah

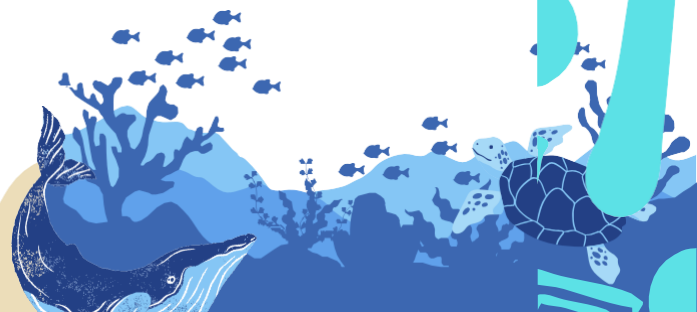
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V

PENUTUP





GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB 2

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Secara kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselonering berada pada tingkat eselon II Provinsi. Unsur pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat meliputi : 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 13 (tiga belas) Fungsional.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sektor Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor : 3 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, UPTD tersebut adalah : UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Pelabuhan Perikanan





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Wilayah III, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi adalah :

- a. Penyelenggaraan Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang uraian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

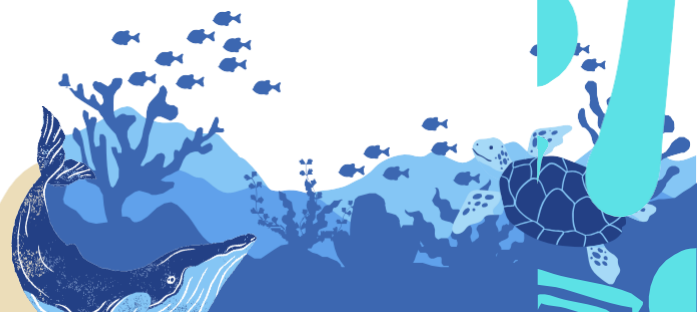
1. KEPALA DINAS

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala dinas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
- b. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan
- e. Menyelenggarakan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan .





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Program

Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. **BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 (dua belas) mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 (dua belas) mil.





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi;
- f. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dan Kelompok Mitra Konservasi;
- i. Pelaksanaan pengawasan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- j. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- k. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;





- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. BIDANG PERIKANAN TANGKAP

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Tangkap sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
- d. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Tangkap;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi/Kelompok Nelayan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian data dan informasi bidang Perikanan Tangkap;
- h. Penyelenggaraan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi, dan penyelenggaraan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang Perikanan Tangkap;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan perairan umum daratan;
- j. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;

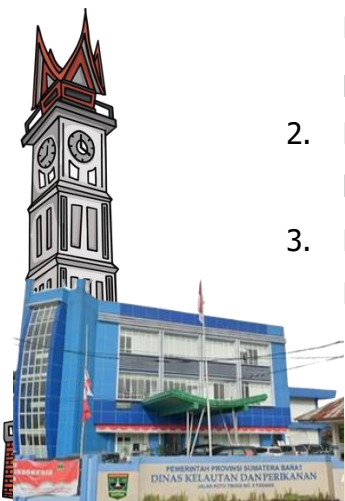
- k. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penyiapan penerbitan Surat Izin Pemasangan Rumpon;
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis bahan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- m. Pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- n. Pelaksanaan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perikanan Tangkap; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

1. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Perikanan Budidaya sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
2. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
3. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

4. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Perikanan Budidaya;
5. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan budidaya dan penyiapan dokumen rencana budidaya, penyiapan batas kawasan budidaya;
6. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan budidaya;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat pembudidaya;
8. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pembudidaya ikan;
9. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan Budidaya;
10. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
11. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi;
12. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
13. Pelaksanaan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
14. Pelaksanaan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
15. Pelaksanaan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
16. Pelaksanaan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan produksi perikanan budidaya;
17. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Budidaya; dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. **BIDANG PENINGKATAN DAYA SAING KELAUTAN DAN PERIKANAN (PDSKP)**

Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.



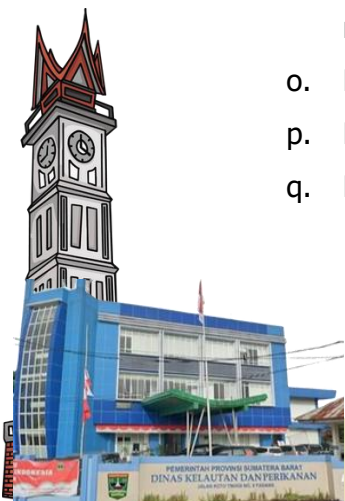


RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagaimana berikut :

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
- f. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- i. Penyelenggaraan penyampaian bahan, saran, dan pertimbangan mengenai Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- j. Penyiapan bahan pengkajian program kerja dan penyusunan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi di bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- l. Penyelenggaraan pengkajian Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan ;
- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi rencana pengelolaan Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan dan penyiapan dokumen rencana Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- n. Penyelenggaraan pengkajian dan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang dari Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan;
- o. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat;
- p. Pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.





7. **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)
- b. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I (PPW I)
- c. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II (PPW II)
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III (PPW III)
- e. UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)
- f. UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP)

7.1. **UPTD BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR LAUT DAN PAYAU (BPBALP) terdiri atas :**

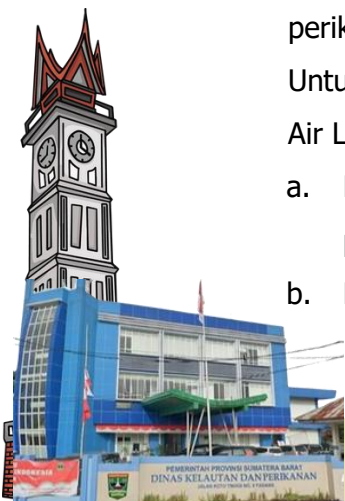
Susunan Organisasi UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pelayanan Teknis Produksi
- d. Seksi Standarisasi dan Informasi dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air laut dan payau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan penyusunan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pembenihan ikan
- b. Pelaksanaan pengujian, pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi





pembenihan

- c. Pelaksanaan pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi balai benih ikan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, penelitian, praktek dan magang pembenihan ikan
- e. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu benih ikan
- g. Pelaksanaan tugas teknis dinas di bidang pembudidayaan dan pembenihan ikan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis UPTD; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2. UPTD PELABUHAN PERIKANAN

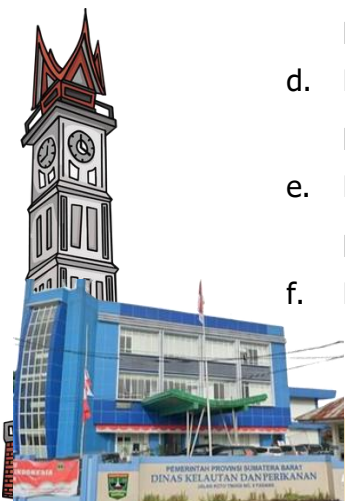
Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pelabuhan
- d. Seksi Tata Operasional Pelabuhan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

UPTD Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana pelabuhan
- b. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan pada pelabuhan perikanan
- c. Pelaksanaan pelayanan teknis terhadap kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan
- d. Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan
- e. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan teknis lainnya pada





UPTD; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Wilayah kerja UPTD Pelabuhan Perikanan, meliputi :

1. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I berkedudukan di Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kambang Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Surantih Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muaro Anai Kota Padang.

2. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II berkedudukan di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

Wilayah kerjanya yaitu :

- a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Baru Kabupaten Padang Pariaman
- b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tiku Kabupaten Agam
- c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sasak Kabupaten Pasaman Barat
- f. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.

3. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III berkedudukan di Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap.

7.3. UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KPSDKP) terdiri atas:

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Konservasi
- d. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi operasional Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan Pengembangan konservasi jenis pada Kawasan Konservasi Daerah
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam Kawasan Konservasi d Perairan Daerah (KKPD) serta Perairan Umum Danau Singkarak
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.4 UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (PPMHP) terdiri atas :

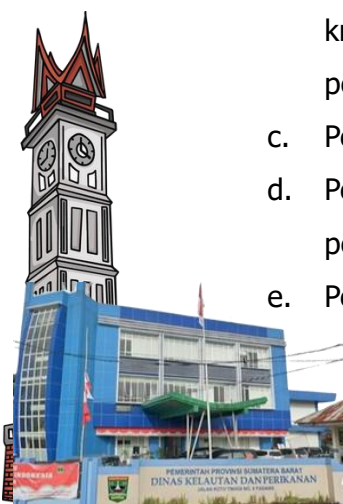
Susunan Organisasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian Mutu
- d. Seksi Penerapan Mutu dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pengujian dan Penerapan mutu hasil perikanan.

UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan, evaluasi pengendalian dan pelaporan
- b. Pelaksanaan/penyiapan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dan kriteria di bidang pengujian, penerapan dan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan
- c. Pelaksanaan kegiatan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan
- d. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan dan pemantauan terhadap produk perikanan di daerah
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pengelolaan laboratorium





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

mutu hasil perikanan

- f. Penyelenggaraan administrasi dan manajemen pengembangan UPTD
- g. Pengelolaan penyediaan sarana, fasilitas, bahan dan peralatan laboratorium
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.5 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

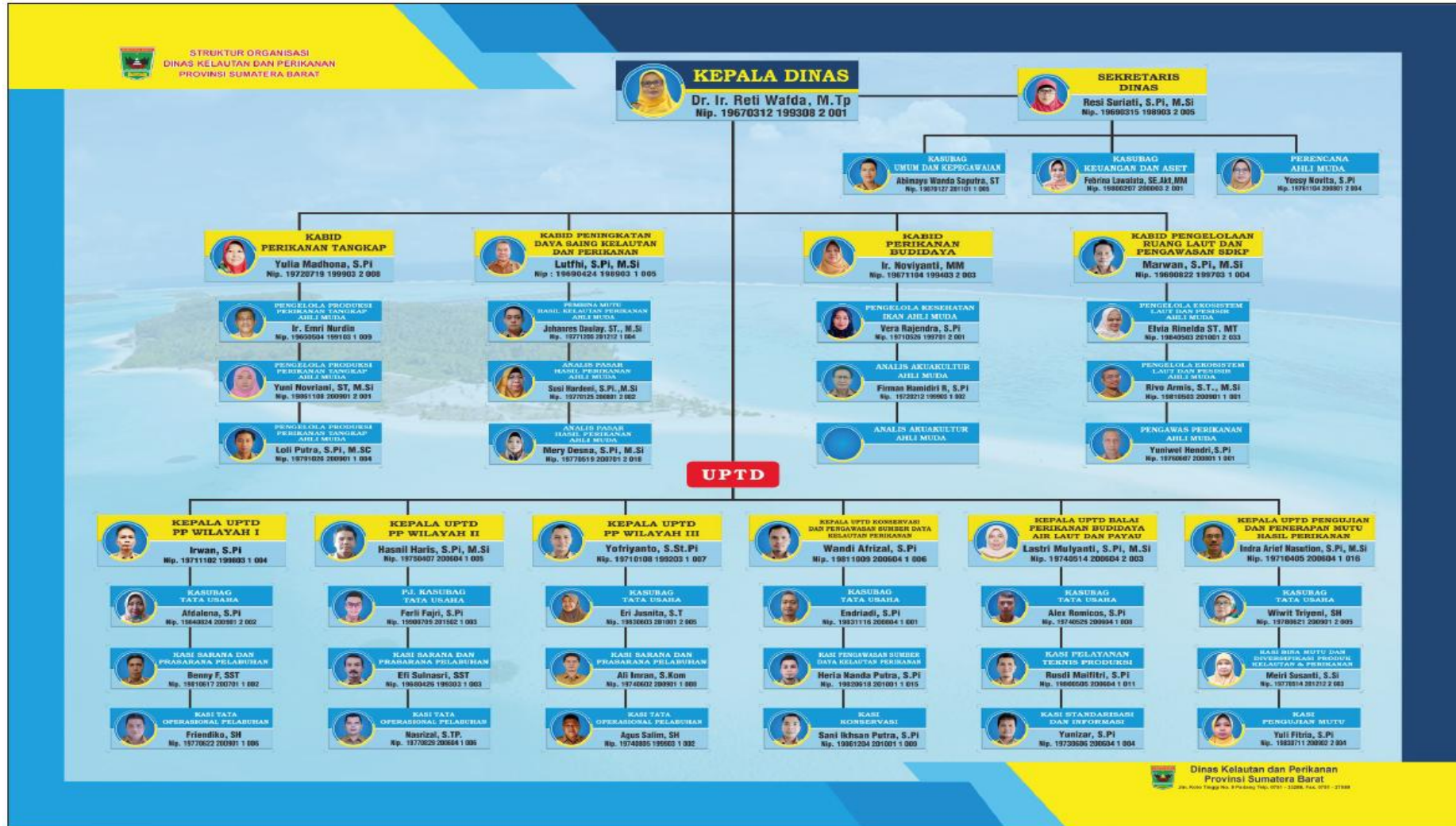




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



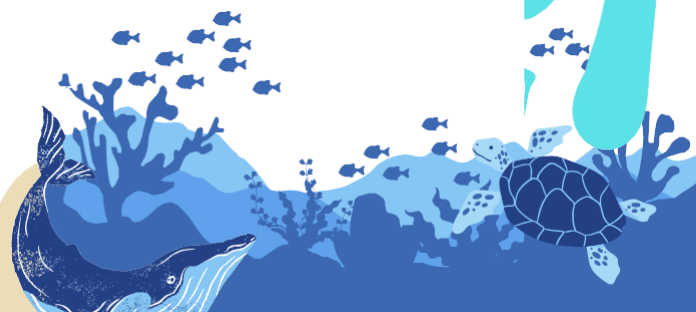
**B. SUMBERDAYA (SDM) PERANGKAT DAERAH****B.1. Sumberdaya Manusia (SDM)**

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat didukung dengan jumlah pegawai oleh sumber daya manusia sebanyak 144 orang dengan status kepegawaian 134 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 orang Pegawai PPPK, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Sumberdaya Manusia (SDM)

NO	URAIAN GOLONGAN	PNS	CPNS	PPPK
1	GOL IV	17	0	0
2	GOL III	96	11	9
3	GOL II	18	6	1
4	GOL I	2	0	0
	JUMLAH	133	17	10
	JUMLAH KESELURUHAN	160		

NO	PENDIDIKAN	PNS	CPNS	PPPK
1	S3	1	0	0
2	S2	26	0	0
3	S1	67	11	8
4	DIV	6	0	1
5	DIII	8	2	1
6	SLTA	22	4	0
7	SLTP	2	0	0
8	SD	1	0	0
	JUMLAH	133	17	10
	TOTAL KESELURUHAN	160		





NO	JENIS KELAMIN	PNS	CPNS	PPPK
1	LAKI-LAKI	72	7	3
2	PEREMPUAN	61	10	7
	JUMLAH	133	17	10
	JUMLAH KESELURUHAN	160		

NO	URAIAN	PEGAWAI NON ASN		
	JENIS KELAMIN	TENAGA HONORER KEGIATAN	OUTSOURCING	SUMBER DANA
1	LAKI-LAKI	48	55	APBD
2	PEREMPUAN	6	11	APBD
	JUMLAH	54	66	
	JUMLAH KESELURUHAN	120		

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	ASN	160
2	NON ASN	120
	JUMLAH	280

No	URAIAN	PEGAWAI NON ASN
		PEGAWAI OUTSOURCHING APBD
1	TENAGA KONTRAK KEAMANAN	34
2	TENAGA KONTRAK KEBERSIHAN	19
3	TENAGA KONTRAK SOPIR	13
	JUMLAH KESELURUHAN	66

No	Unit Kerja	Jumlah (Org)
1	Sekretariat	24
2	Bidang Perikanan Tangkap	20
3	Bidang Perikanan Budidaya	18
4	Bidang Pengelolaan Daya Saing Kelautan Perikanan (PDSKP)	9
5	Bidang Pengelolaan Ruang Laut _Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan (PRL PSDKP)	12
6	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I	8
7	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II	9
8	UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III	6
9	UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP)	12





10	UPTD Konservasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP)	17
11	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu hasil Perikanan (PPMHP)	9
JUMLAH		144

B.2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan rekapitulasi buku inventaris Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi Baik

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah	Keadaan Barang (B,KB,RB)
PERALATAN DAN MESIN			
1	Crawler Crane	3	Baik
2	Mesin Pembuat Pellet	4	Baik
3	Dredger Lainnya	3	Baik
4	Kapal Tarik	2	Baik
5	Alat Penarik Lainnya	2	Baik
6	Transportable Generating Set	9	Baik
7	Stationary Generating Set	1	Baik
8	Dynamo Electric	1	Baik
9	Stationary Generating Set	1	Baik
POMPA			
10	Portable Water Pump	14	Baik
11	Pompa Air	16	Baik
12	Stationary Water Pump	20	Baik
13	Transportable Water Pump	12	Baik
14	Pompa Lainnya	1	Baik
15	Sumersible Pump	4	Baik
16	Mesin Bor Batu	1	Baik
17	Dive Lights (Senter Selam)	7	Baik
18	Kompresor Selam	1	Baik
19	Jeep	1	Baik
20	Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya	8	Baik
21	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Baik
22	Pick Up	7	Baik
23	Sepeda Motor	20	Baik
24	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lainnya	5	Baik
25	Bemo	1	Baik
26	Helicak/Bajaj	1	Baik
27	Mobil Ambulance	1	Baik
28	Gerobak Tarik	3	Baik
29	Kapal Minyak (Tanker)	1	Baik
30	Kapal Motor	1	Baik
31	Motor Boat	3	Baik
32	Speed Boat / Motor Tempel	3	Baik
33	Kapal Pengawas Perikanan	4	Baik

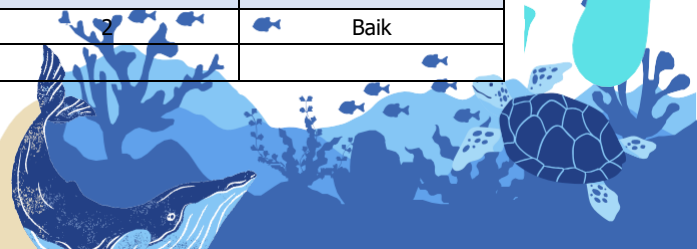




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

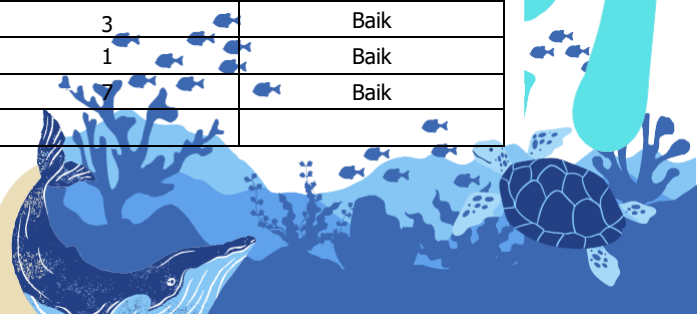
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

34	Kapal Patroli Pantai	1	Baik
35	Bermotor Untuk Barang Lainnya	1	Baik
36	Perahu Barang	2	Baik
37	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang lain	1	Baik
38	Terpasang Pada Pondasi Lainnya	1	Baik
39	Mesin Kompresor	1	Baik
40	Mesin Gerinda	2	Baik
41	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	1	Baik
42	Car Washer	3	Baik
43	Hoist	1	Baik
44	Peralatan Las Lainnya	1	Baik
45	Peralatan Las Listrik	1	Baik
46	Bak Air	2	Baik
47	Can Frame	59	Baik
48	Air Blower	20	Baik
49	Perkakas Pabrik Es Lainnya	13	Baik
50	Tabung NH3	2	Baik
51	Condensor	1	Baik
52	Reciver	1	Baik
53	Filling Divice	1	Baik
54	Brine Tank	1	Baik
55	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1	Baik
56	Tool Kit Box	1	Baik
57	Tool Kit Set	1	Baik
	PERALATAN TUKANG		
58	Jangka Besi	2	Baik
	ALAT UKUR UNIVERSAL		
59	ILS. Calibration RX.	6	Baik
	ALAT UKUR/PEMBANDING		
60	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	1	Baik
61	Microscope Multiview	3	Baik
62	Desicator (Size) 3	2	Baik
63	Termometer Standar	1	Baik
	ALAT UKUR LAIN-LAIN		
64	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	2	Baik
	ALAT TIMBANGAN/BIARA		
65	Neraca Dengan Digital Display	8	Baik
66	Timbangan Bbi Kapasitas 100 Kg	2	Baik
67	Alat Timbangan/Biara Lainnya	3	Baik
	ANAK TIMBANGAN/BIARA		
68	Kilogram Standar	2	Baik
	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN		
69	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	3	Baik
	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN		
70	Lemari Penyimpan	2	Baik
71	Cold Storage (Kamar Pendingin)	5	Baik
72	Lemari Penyimpan	1	Baik
73	Oven	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		
74	Alat Pengukur P.H. Tanah (Soil Tester)	2	Baik





	ALAT PASCA PANEN		
75	Alat Pasca Panen Lainnya	1	Baik
	ALAT PRODUKSI PERIKANAN		
76	Bak Pemeliharaan Sementara	11	Baik
77	Alat Produksi Perikanan Lainnya	8	Baik
78	Keramba (Jaring Apung)	2	Baik
79	Alat Produksi Perikanan	1	Baik
80	Mesin Ketik Lainnya	1	Baik
81	Portable (11-13 Inci)	1	Baik
82	Mesin Absen (Time Recorder)	9	Baik
83	Mesin Fotocopy Electronic	1	Baik
	PERLENGKAPAN		
84	Rak Besi	2	Baik
85	Lemari Kayu	8	Baik
86	Filing Cabinet Besi	1	Baik
87	Rak Kayu	5	Baik
88	Lemari Kaca	4	Baik
89	Lemari Besi/Metal	7	Baik
90	Filing Cabinet Kayu	8	Baik
91	Lemari Display	1	Baik
92	Brandkas	1	Baik
93	Lemari Makan	1	Baik
	ALAT KANTOR LAINNYA		
94	Alat Kantor Lainnya	29	Baik
95	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
96	LCD Projector/Infocus	6	Baik
97	CCTV - Camera Control Television System	1	Baik
98	Overhead Projector	27	Baik
99	Papan Nama Instansi	19	Baik
100	Papan Pengumuman	5	Baik
101	White Board	2	Baik
102	Papan Visual/Papan Nama	2	Baik
103	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
	ALAT RUMAH TANGGA		
	MEUBILER		
104	Tempat Tidur Kayu	11	Baik
105	Meja 1/2 Biro	97	Baik
106	Kursi Rapat	1	Baik
107	Kasur/Spring Bed	49	Baik
108	Kursi Putar	126	Baik
109	Meja Kerja Kayu	29	Baik
110	Kursi Tamu	25	Baik
111	Tempat Tidur Kayu	11	Baik
112	Kursi Besi/Metal	1	Baik
113	Meja Rapat	109	Baik
114	Meubelair Lainnya	30	Baik
115	Tempat Tidur Besi	3	Baik
116	Meja Makan Kayu	1	Baik
117	Sofa		Baik

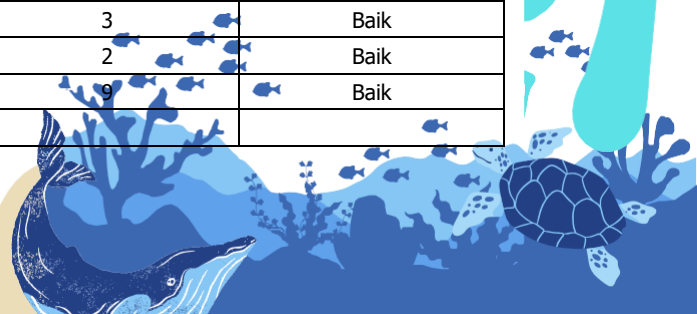
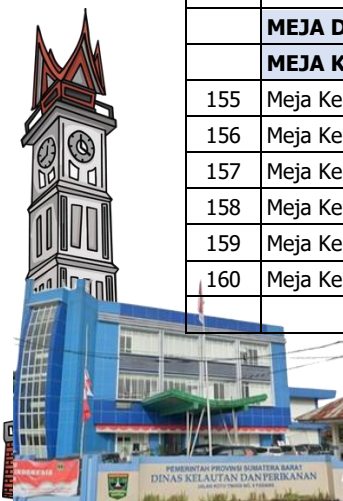




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

118	Meja Komputer	2	Baik
ALAT PEMBERSIH			
119	Alat Pembersih Lainnya	14	Baik
120	Mesin Pemotong Rumput	28	Baik
121	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
122	Mesin Cuci	1	Baik
ALAT PENDINGIN			
123	A.C. Split	119	Baik
124	Reach In Freezer	7	Baik
125	Lemari Es	27	Baik
126	A.C. Window	4	Baik
127	Kipas Angin	1	Baik
128	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	Baik
ALAT DAPUR			
129	Kompas Gas (Alat Dapur)	4	Baik
130	Kitchen Set	2	Baik
131	Alat Dapur Lainnya	4	Baik
132	Tabung Gas	3	Baik
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			
133	Camera Video	6	Baik
134	Televisi	15	Baik
135	Mic Conference	2	Baik
136	Loudspeaker	7	Baik
137	Dispenser	14	Baik
138	Mimbar/Podium	1	Baik
139	Megaphone	4	Baik
140	Stabilisator	9	Baik
141	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	41	Baik
142	Wireless	10	Baik
143	Camera film	12	Baik
144	Handy Cam	6	Baik
145	Tangga Aluminium	5	Baik
146	Sound System	8	Baik
147	Amplifier	1	Baik
148	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home	1	Baik
149	Lampu	2	Baik
150	Water Filter	2	Baik
151	Compact Disc	1	Baik
ALAT PEMADAM KEBAKARAN			
152	Alat Pemadam/Portable	26	Baik
153	Hidran Kebakaran	1	Baik
154	Alat Pembantu Kebakaran	5	Baik
MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			
MEJA KERJA PEJABAT			
155	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	33	Baik
156	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	65	Baik
157	Meja Kerja Pejabat Eselon KL	6	Baik
158	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
159	Meja Kerja Pejabat Eselon	2	Baik
160	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik

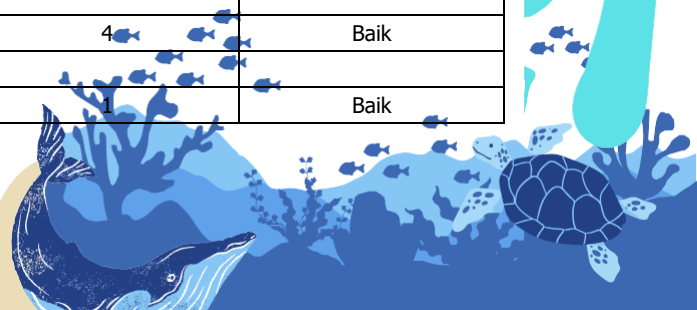




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

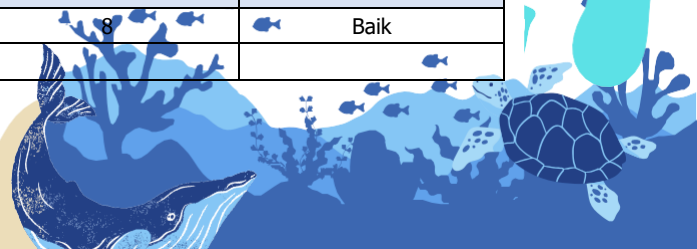
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

	MEJA RAPAT PEJABAT		
161	Meja Rapat Pejabat Eselon II	54	Baik
	KURSI KERJA PEJABAT		
162	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	23	Baik
163	Kursi Kerja Pegawai Non	45	Baik
164	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3	Baik
	KURSI RAPAT PEJABAT		
165	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	90	Baik
166	Ketua/Wakil Ketua DPRD	40	Baik
	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT		
167	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	5	Baik
	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		
168	Lemari Buku Untuk Pejabat	22	Baik
169	Eselon II	17	Baik
170	Lemari Buku Untuk Pejabat II	8	Baik
171	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	21	Baik
172	Lemari Buku Arsip Untuk	1	Baik
173	Ketua/Wakil Ketua DPRD	43	Baik
	ALAT STUDIO AUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
174	Microphone Cable	1	Baik
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		
175	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	Baik
176	Video Mixer	1	Baik
177	Tripod Camera	1	Baik
178	Video Conference	1	Baik
179	Video Monitor	2	Baik
180	Slide Projector	4	Baik
181	Camera Digital	7	Baik
182	Camera View Finder	1	Baik
183	Camera Under Water	2	Baik
184	Video Monitor	1	Baik
	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH		
185	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Baik
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		
186	Handy Talky (HT)	58	Baik
187	Facsimile	3	Baik
188	Lainnya	1	Baik
189	Alat Komunikasi Telephone	1	Baik
190	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	1	Baik
	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB		
191	Unit Tranceiver Ssb Portable	9	Baik
	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF		
192	Alat Komunikasi Radio Vhf Lainnya	2	Baik
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
193	Alat Kedokteran Umum Lainnya	16	Baik
194	Kursi Dorong	1	Baik
	ALAT KEDOKTERAN BEDAH		
195	Alat Kedokteran Bedah Lainnya	4	Baik
	ALAT KEDOKTERAN MATA		
196	Alat Kedokteran Mata	1	Baik





	ALAT KESEHATAN UMUM		
	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT		
197	Fire Extinghuizer	7	Baik
198	Scuba Closed Circuit	4	Baik
	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN		
199	Air Teknik Penyehatan	3	Baik
200	Timbangan Elektronik	3	Baik
201	Discicator/Eksicator	2	Baik
202	Alat Penguji Penerapan Udara air	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN		
203	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	44	Baik
204	Biologi Teknik Penyehatan	2	Baik
205	Biologi Teknik Penyehatan Lainnya	2	Baik
	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA		
206	D.O. Meter	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM		
207	Cat Dan Kimia Lainnya Alat Laboratorium Aspal,	4	Baik
	MEKANIKA TANAH		
208	Mekanika Tanah Dan Batuan Lainnya	1	Baik
209	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan Lainnya	1	Baik
	LOGAM DAN MESIN		
210	Drying Oven	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM		
211	Refrigerator	2	Baik
212	Montle Heater	7	Baik
213	Bak Fiberglass	48	Baik
214	Pipa U	1	Baik
215	Water Bath (Alat Laboratoium umum)	4	Baik
216	Microscope	3	Baik
217	Furnace	1	Baik
218	Compressor Unit	1	Baik
219	Laboratorium Umum)	1	Baik
220	Alat Laboratorium Umum Lainnya	9	Baik
221	Laminar Air Flow	1	Baik
222	PH Meter (Alat	1	Baik
223	Vacum Pump	1	Baik
224	Alat Ukur Kadar Air (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
225	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	1	Baik
226	Timbangan/Neraca	1	Baik
227	Alat Laboratorium Umum	1	Baik
228	Rotary Evaporator	1	Baik
229	Pipette Container	4	Baik
230	Kyldahl Apparatus	1	Baik
231	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI		
232	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	2	Baik
	ALAT LABORATORIUM MAKANAN		
233	Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	8	Baik

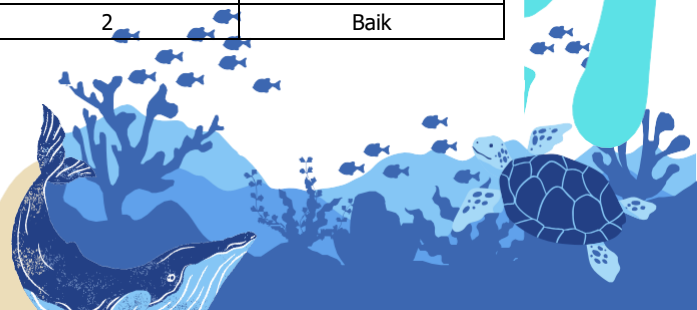
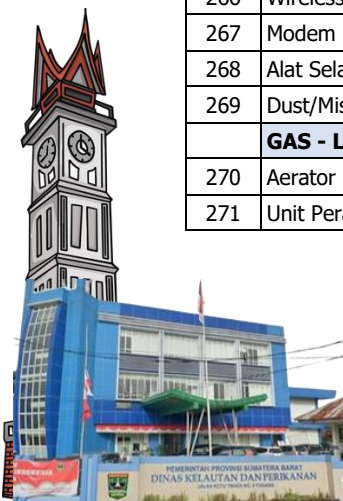




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

234	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	3	Baik
235	Food Processor	6	Baik
236	Gilingan Mile	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI		
237	Hammer Mill (Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik)	1	Baik
	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		
238	Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Baik
239	Hot Plate Stirer	1	Baik
240	Vortex Mixer	1	Baik
241	Stomacher	1	Baik
	BIOLOGI PERAIRAN		
242	Alat Selam	24	Baik
243	Under Water Camera	2	Baik
	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA		
	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA		
244	Shower/Eyewash	1	Baik
245	Laboratory Flammable	1	Baik
246	Storage Cabinets	1	Baik
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA		
	LABORATORY SAFETY		
247	Refrigerator/Freezer	7	Baik
248	Peralatan Umum Lainnya	2	Baik
249	Hoistbeam With 2 Rollable Rubber Bands	1	Baik
	KALIBRASI DAN ALAT LABORATORIUM		
250	Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain Lainnya	1	Baik
251	Teropong (Senjata Lain - Lain)	2	Baik
252	GPS	7	Baik
	ALSUS LANTAS		
253	Distometer	7	Baik
254	Local Area Network (LAN)	1	Baik
255	P.C Unit	37	Baik
256	Lap Top	61	Baik
257	Note Book	7	Baik
258	Hard Disk	1	Baik
259	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Baik
260	Peralatan Mini Komputer Lainnya	28	Baik
261	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Baik
262	Monitor External	2	Baik
263	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
264	Acces Point	2	Baik
265	Switch	1	Baik
266	Wireless Access Point	4	Baik
267	Modem	1	Baik
268	Alat Selam Seet	1	Baik
269	Dust/Mist Scrubber Cyclone Type	1	Baik
	GAS - LIQUID SEPARITION		
270	Aerator	9	Baik
271	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	2	Baik





C. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Demi meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan tersebut. Salah satu upaya peningkatan kinerja pelayanan yang dikembangkan adalah melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan. Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan.

Inovasi peningkatan mutu pelayanan publik juga dikembangkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan patuh pada Sistem Operasional Prosedur (SOP). Setiap masyarakat yang hendak mendapatkan layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat melihat Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan tata waktu penyelesaian layanan yang terpampang pada setiap unit kerja sesuai dengan jenis layanannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna layanan mengetahui dengan jelas alur proses layanan yang mereka mohonkan sehingga meyakinkan mereka bahwa layanan mereka akan selesai sesuai mutu waktu yang tertera pada SOP setiap jenis layanan. Hal ini menguatkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk selalu menerapkan Good Governance and Clean Government. Inovasi lain yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. **TAMAN SIMAS : (*Tanam Mangrove Partisipasi Masyarakat*)** dengan partisipasi masyarakat tujuan inovasi ini dalam melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove yang mempunyai fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mereka bisa merawat, memelihara dan memiliki ekosistem pesisir.

Taman Simas adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja dari kegiatan penanaman mangrove yang sudah ditetapkan dalam Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021. Program perlindungan dan rehabilitasi kawasan pesisir Sumatera Barat yaitu penanaman mangrove di pesisir





pantai Sumatera Barat. Pada tahun 2023 Taman Simas (Tanam Mangrove Partisipasi Masyarakat) mendapatkan nilai kematangan 102 yang artinya pelaksanaan nya sudah baik.

2. **PENA SIGOFAR : (Pembinaan Pelayanan Untuk Sertifikat Good Manufacturing Practise)**

Pembinaan pelayanan untuk Good manufacturing Practise kepada pelaku usaha dalam menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi dalam rangka system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. pembinaan ini akan melibatkan Pembina Mutu Daerah dan dilakukan secara berkala melalui :

- Identifikasi
- Sosialisasi/ Pelatihan
- Pembina mutu daerah mengajukan pengusulan sertifikat dengan kelengkapan persyaratannya
- Verifikasi berkas dan pengecekan administrasi lainnya oleh Pembina Mutu Provinsi
- Pembina Mutu Provinsi akan melakukan aksi pendampingan perbaikan secara langsung ke lapangan dengan pembina mutu daerah terkait dengan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Pengajuan Rekomendasi Sertifikat Good Manufacturing Practise ke Pemerintah Pusat.

Dengan tujuan :

- Percepatan dalam rangka Penerbitan Sertifikat GMP di dapat mempercepat proses Penerbitan Sertifikat GMP di UPI.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan langsung ke Lokasi UPI

3. **SIBUDIKITING : (Pembinaan Pelayanan Untuk Sertifikat Good Manufacturing Practise)**

Inovasi Sibudikiting ini dibuat sebagai media percontohan teknologi budidaya kepiting bagi masyarakat pesisir khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Dimulai dengan membuat penerapan teknologi dalam bentuk media percontohan berupa apartemen kepiting bakau selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas baik langsung dengan melakukan bimtek dan Forum Grup Diskusi ataupun melalui online diskusi melalui grup Whtsapp. Dilanjutkan dengan melakukan pendampingan teknologi kepada masyarakat serta pemerintahan yang





ingin melakukan replikasi melalui tenaga pendamping atau penyuluh teknis budidaya kepiting bakau ini

Dengan tujuan :

- Mengenalkan kepada masyarakat mengenai teknologi baru Sistem budidaya kepiting bakau Vertical Crab House dengan RAS (Resirculating Aquakulture System) yang dapat dilakukan di daratan bahkan perkotaan.
- Meningkatkan minat masyarakat nelayan di daerah yang potensial penghasil kepiting bakau untuk melakukan Budidaya Kepiting sebagai pendukung ekonomi masyarakat pesisir

4. **LAMANG MALIN** (*Laboratorium Malala Pengujian Formalin*)

Dengan adanya kegiatan Laboratorium Malala Pengujian formalin ini dapat menurunkan pemakaian bahan kimia terlarang kepada pengolah ikan, dan nelayan serta memberikan informasi kepada masyarakat sehingga rasa aman untuk mengkonsumsi ikan dan meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat.

Dengan tujuan :

- Memfasilitasi masyarakat untuk mengetahui produk perikanan yang dikonsumsi aman dari bahan kimia berbahaya seperti formalin dan borax sehingga masyarakat merasa aman mengkonsumsi produk perikanan.
- Mengidentifikasi formalin pada produk perikanan di tingkat produsen, pengumpul, pedagang maupun konsumen.
- Mengetahui kadar formalin yang digunakan pada produk perikanan.
- Pengendalian keamanan pangan distribusi khusus perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan regional Sumatera Barat. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program supaya mampu eksis dan unggul dan bersaing semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari data yang telah divalidasi oleh beberapa instansi seperti BPS Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, beberapa indikator





kuantitatif Bidang Kelautan dan Perikanan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, walaupun harus diakui masih menghadapi banyak kendala internal dan eksternal dan masih perlu dipacu lagi akselerasinya dimasa mendatang.

Evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari capaian indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran strategis. Analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan hasil pengukuran berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut: Tujuan Meningkatnya Pendapatan dengan indikator tujuan terdiri dari:

- a. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/thn)
- b. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/thn)

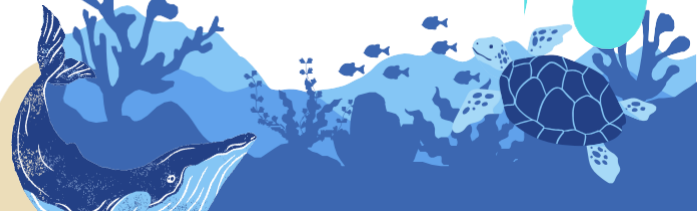
Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Pendapatan pembudidaya ikan adalah uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidayaan ikan, sehingga bisa diukur seberapa jauh kegiatan membudidayakan ikan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi pembudidaya.

Sedangkan pendapatan nelayan dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga rata rata per Kg setelah dikurangi biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, selanjutnya dari penerimaan dibagi antara pemilik kapal dan nelayan. Pendapatan rata-rata nelayan dalam 1 tahun diperoleh dari penjumlahan pendapatan nelayan per triwulan (I-IV) dan dibagi dengan jumlah nelayan pada tahun yang bersangkutan.

Dilihat dari realisasi 2 indikator tujuan dapat dilihat dari uraian di bawah ini :

1. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 50.048.000,- org/thn
2. Jumlah Pendapatan Nelayan dengan target : Rp. 42.443.000,- org /thn



**Tabel 2.1.3**

Pencapaian Kinerja Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan***Meningkatkan kesejahteraan petani******IK : Persentase Peningkatan Pendapatan Petani*****Sasaran : Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)**

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp. Jt)	45,800	47,175	50,465.580	48,590	50,989.40	50,048	54,526.87	51,549	53,096
2	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	39,995	40,795	41,661.646	41,611	41,758.325	42,443	42,478.78	43,292	44,158





Hasil Pengukuran Kinerja Provinsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4
Pengukuran Jumlah Pendapatan Pembudidaya dan Nelayan 2024

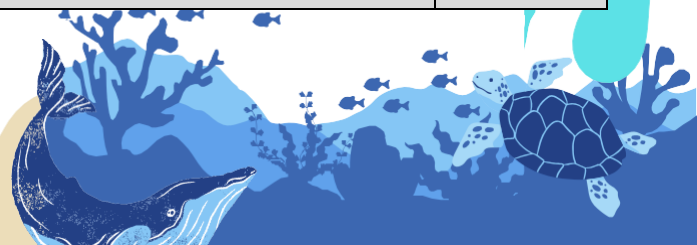
No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian %	Kategori
1.	Jumlah pendapatan pembudidaya ikan Rp/org/thn	50.048.000	54.526.870	108,95	Sangat Tinggi
2.	Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/thn	42.443.000	42.513.858	100,17	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 target dari indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya ikan dari target sebesar Rp.50.048.000,-/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp.54.526.870,-/org/thn dengan tingkat capaian sebesar 108,95% termasuk kriteria Sangat Tinggi. Sedangkan jumlah pendapatan nelayan dari target Rp.42.443.000,-/org/thn dapat terealisasi sebesar Rp.42.513.858,-/org/thn dengan tingkat capaian 100,17%, pendapatan nelayan ini juga mencapai target, dengan kriteria Sangat Tinggi. Hal ini dapat kita lihat pada uraian di bawah ini :

Tabel 2.1.5
Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2024

No	Jenis usaha	Produksi menurut Jenis Usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jumlah Pembudidaya (org)	Biaya Produksi (Rp.000)	Pendapatan (Rp.000)	Pendapatan/ org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	199.328,809	4.965.761.552	67.077	3.724.321.164,00	1.241.440.388,00	18.507,69
2	Kolam Air Deras	32.618,807	909.894.865	4.477	682.421.148,75	227.473.716,25	50.809,41
3	Jaring Apung Tawar	14.241,161	381.468.429	1.861	286.101.321,75	95.367.107,25	51.245,09
4	Tambak	4.103,352	351.187.420	438	263.390.565,00	87.796.855,00	200.449,44
5	Keramba	4.491,189	147.214.500	470	110.410.875,00	36.803.625,00	78.305,59
6	Sawah	1.029,601	29.682.343	1.551	22.261.757,25	7.420.585,75	4.784,39
7	Budidaya laut	193,766	29.110.300	670	21.832.725,00	7.277.575,00	10.862,05
8	Jaring Tancap Tawar	768,57	24.226.520	285	18.169.890,00	6.056.630,00	21.251,33
	Jumlah	256.775,26	6.838.545.929	76.829	5.128.909.447	1.709.636.482	436.214,98
	Pendapatan per jenis usaha tahun 2024						54.526,87
	Pendapatan per org/ bln tahun 2024						4.543,91

Sumber : One Data KKP,2024



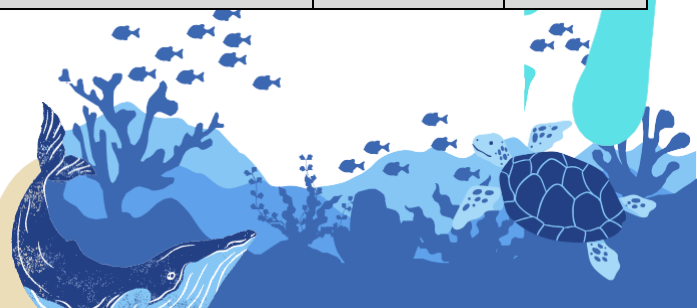


Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3-4 kali dalam setahun. Jumlah produksi yang didapat pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai jual perjenis ikan budidaya tersebut dikurangi dengan biaya produksi. Atau uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidaya ikan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi. Adapun pada tahun 2024, jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 279.335,001 ton dengan jumlah pembudidaya ikan 76.829 orang, sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 274.290 ton dan jumlah pembudidaya ikan 84.015 orang. Terjadi penurunan jumlah pembudidaya tahun 2024 bila dibandingkan dengan jumlah pembudidaya tahun 2023 sebesar 8,55%, tetapi terjadi peningkatan produksi sebesar 1,84%.

Data pendapatan pembudidaya ikan tahun 2024 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 2.1.6
Pendapatan Nelayan Tahun 2024

TW	PRODUKSI (TON)	HARGA RATA-RATA PER KG	NILAI PRODUKSI (Rp.000)	BIAYA PRODUKSI (Rp.000)	PENERIMAAN (Rp.000)	Pendapatan Pemilik Kapal (Rp.000)	Pendapatan Nelayan (Rp.000)	Jumlah Nelayan
I	57.715,12	27.500,00	1.587.165.800	476.149.740	1.111.016.060	611.058.833	499.957.227	45.779
II	58.583,13	27.500,00	1.611.036.075	483.310.823	1.127.725.253	620.248.889	507.476.364	45.779
III	60.488,46	28.000,00	1.693.676.880	508.103.064	1.185.573.816	711.344.290	474.229.526	45.779
IV	59.257,50	28.000,00	1.659.210.000	497.763.000	1.161.447.000	696.868.200	464.578.800	45.779
Jumlah	236.044,21			1.965.326.627	4.585.762.129	2.639.520.211	1.946.241.917	
					Pendapatan Nelayan Tahunan (Rp.000)		1.946.241.917	42.513,858
					Pendapatan Nelayan Perbulan (Rp.000)		162.186.826	3.542,822
					Pendapatan Pemilik Kapal Tahunan (Rp.000)		2.639.520.211	
					Pendapatan Pemilik Kapal Perbulan (Rp.000)		219.960.018	





Indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th) dihitung berdasarkan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan pada tahun yang bersangkutan yang dikalikan dengan harga jual perjenis ikan sehingga didapatkan nilai produksi. Nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi sehingga diperoleh penerimaan, penerimaan ini dibagi antara pemilik dengan nelayan. Persentase pembagian antara pemilik kapal dengan nelayan ini berkisar 60% pemilik : 40% nelayan. Hal ini terjadi pada alat tangkap dengan kapal berukuran > 5GT seperti Bagan, Purse Seine, Tonda, Payang yang umumnya nelayan adalah sebagai anak buah kapal. Namun untuk perahu motor berukuran < 5GT umumnya nelayan adalah pemilik yang langsung turun ke laut menangkap ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 223.728,42 ton dan perairan umum sebesar 12.315,79 ton dengan total jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 236.044,21 ton pada tahun 2024 dan jumlah nelayan tahun 2024 sebanyak 45.779 orang. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan nelayan ini dikarenakan harga jual ikan pada umumnya mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya.

Data pendapatan nelayan tahun 2024 masih berupa angka sementara yang secara bertahap akan di validasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan/Dinas yang membidangi sektor perikanan di 19 Kab/Kota di Sumatera Barat.

Rekapitulasi hasil Pengukuran Pendapatan Tahun 2023 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.7
Pengukuran Pendapatan Tahun 2023 – 2024

No.	Indikator Kinerja	2023			2024 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)	48.590.000	50.989.400	104,94	50.048.000	54.526.870	108,95
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	41.611.000	41.758.325	100,35	42.443.000	42.513.858	100,17

Angka sementara Sumber : One Data KKP,2024





Realisasi pendapatan pembudidaya tahun 2024 mengalami kenaikan 6,94% dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan realisasi pendapatan nelayan tahun 2024 hanya mengalami kenaikan sebesar 1,81% dibandingkan dengan tahun 2023.

Berikut sajian persandingan antara jumlah pendapatan pembudidaya dan pendapatan nelayan Provinsi Sumatera Barat dengan angka nasional tahun 2024.

Tabel 2.1.8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

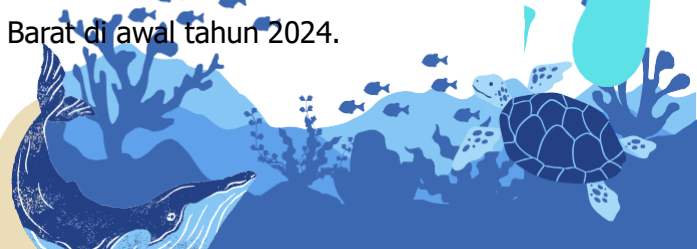
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional *	% Capaian terhadap Nasional
1.	Jumlah Pendapatan pembudidaya (Rp/org/th)	54.526.870	61.560.000	88,56
2.	Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)	42.513.858	48.540.540	87,58

*Angka sementara Sumber : One Data KKP,2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional walaupun masih di bawah capaian nasional.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas menunjukkan 7 (tujuh) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2021-2026 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dari 7 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **106,89%** hal ini termasuk keberhasilan **Sangat Tinggi**. Dari 7 indikator kinerja, 5 indikator kinerja capaiannya di atas 100% (Sangat Tinggi), 1 indikator kinerja capaian 100% dan 1 indikator kinerja capaiannya di bawah 100%. Pencapaian Sasaran strategis tersebut diukur dari pencapaian 7 indikator kinerja.

Indikator kinerja tertinggi adalah Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan capaian 182,57% terdapat pada sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap, kemudian diikuti oleh indikator Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan capaian 112,27% terdapat pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan. Kedua indikator tersebut dengan kategori Sangat Tinggi. Ada satu indikator dengan satu sasaran yang capaiannya Sangat Rendah yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 49,60% dengan sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, hal ini disebabkan karena dampak dari banjir bandang dan galodo yang melanda Provinsi Sumatera Barat di awal tahun 2024.



**Tabel 2.1.9**

**Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Awal	Realisasi		
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0.93	-1.68	0.99	2.90	1.07	5.83	1.09	1.99	1.11	1.17
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3.32	5.48	3.33	3.36	3.39	2.052	3.71	1.84	3.78	3.97
3	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	153.76	230.62	155.50	272.35	156.85	291.00	158.42	159.66	160.00	161.60
4	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	6.30	10.00	6.49	10.03	7.26	7.50	7.95	8.15	8.05	11.00
5	Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	41.18	37.24	47.06	49.26	52.94	59.75	58.82	66.04	64.71	70.59
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	80.10	81.21	80.12	80.06	80.15	80.22	80.16	80.54	80.18	80.20
7	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	0	0	82	82.00	82.5	86.65	83	83.00	84	85





Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terdapat tujuh (7) Indikator Utama. Untuk pencapaian target indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi/lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap.

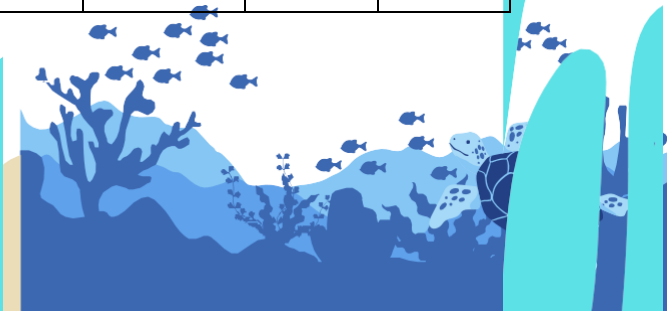
Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.



**Tabel 2.1.10**

Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											
No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	0.93	0.19	0.99	2.90	1.07	5.83	1.09	1.99	1.11	1.17
2	Jumlah sarana penangkapan ikan (unit)	1,400	1,669	1,423	1,781	1,590	3,168	1,739	1,825	1,768	1,800
3	Jumlah prasarana pelabuhan perikanan (unit)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan (dokumen)	100	160	100	177	100	118	100	329	100	100
5	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	220,615	219,570.30	222,693	218,688.65	225,081	231,443.20	227,546	236,044.21	230,081	232,762





Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

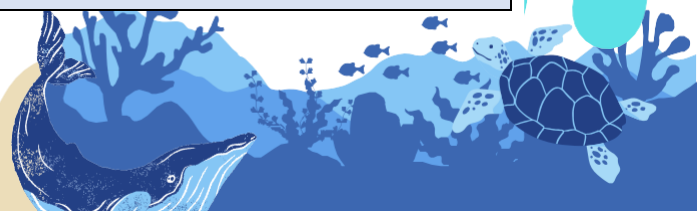
- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.119,542 \text{ km}^2/\text{sq.km}$ dan luas perairan (laut) $\pm 3.409.837,37 \text{ ha}$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 2,299,08 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$. Perairan laut Sumatera Barat memiliki 219 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 116 pulau, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 pulau, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 pulau, Kabupaten Agam sebanyak 2 pulau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 26 pulau, Kota Padang sebanyak 21 pulau, Kota Pariaman sebanyak 4 pulau dan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 pulau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor ; 19 Tahun 2022 Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) - 572 : yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, dimana memiliki estimasi potensi sumberdaya ikan seperti tabel berikut :

Tabel. 2.1.11
Potensi Sumberdaya ikan di WPPNRI 572

Kelompok Sumberd.aya Ikan	Samudera Hindia WPP 572
Ikan Pelagis Besar	438.877
Ikan Pelagis Kecil	479.503
Ikan Demersal	204.500
Ikan Karang	33.429
Udang Penaeid	35.560
Lobster	2.722
Kepiting	6.787
Rajungan	2.533
Cumi-cumi	26.039
Total Potensi (Ton/Tahun)	1.229.950





Potensi perikanan dan kelautan Sumatera Barat (perairan laut dan perairan umum) menyimpan potensi yang cukup besar untuk kepentingan ekonomi produktif maupun konservasi dan dapat dijadikan andalan pembangunan masa depan. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan. Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumberdaya ikan.

Dengan potensi perikanan laut WPP sebesar 1.229.950 ton, saat ini nilai produksi yang berhasil dicapai Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 231,443,20 ton. Usaha Perikanan yang masih berpeluang untuk dikembangkan adalah untuk investasi skala menengah dan besar yakni penangkapan ikan tuna diperairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sehingga tidak bersaing dengan nelayan tradisional di pinggir pantai.

Pada Tahun 2024 diketahui produksi perikanan sebesar 236.044,21 Ton yang terdiri dari produksi perairan laut sebesar 223.728,42 Ton dan perairan umum sebesar 12.351,79 Ton. Komoditi perikanan yang bernilai ekonomi penting dari hasil tangkapan laut antara lain adalah ikan tuna, cakalang, udang, tenggiri, kakap, kuwe dan kerapu. Produksi komoditi yang diperoleh pada *fishing ground* utama perairan laut Sumatera Barat diantara komoditi ekonomi penting tersebut ada beberapa yang merupakan komoditi ekspor antara lain : tuna, udang dan kerapu.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan diperairan umum yaitu dengan cara penebaran benih ikan di perairan umum (danau dan sungai). Hal ini telah memberi dampak terhadap peningkatan produksi ikan di perairan umum sehingga pendapatan nelayan di perairan umum juga meningkat. Selanjutnya adalah memberikan bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan nelayan.





Berdasarkan tingkat produksi perikanan laut untuk masing-masing daerah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah pemasok ikan terbesar dan menjadi sentra produksi perikanan laut terpenting di Sumatera Barat. Diikuti oleh enam sentra produksi perikanan laut lainnya seperti : Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

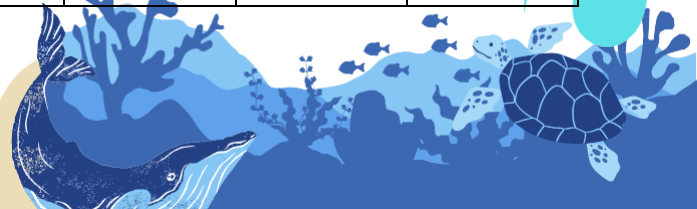
Produksi perikanan tangkap tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu tongkol, teri, tuna, kerapu dan lain-lain. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)–572 yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP-572) dengan potensi sebesar 1.229.950 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni $\pm 94,44\%$ atau sebesar 1.161.564,78 ton.

Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap merupakan penghitungan besarnya produksi perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya yaitu produksi tahun yang dievaluasi dikurangi dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun lalu dikali 100%.

Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing – masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.1.12
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan 2024

N o.	Kab/Kota	2023			2024		
		Laut	Perairan Umum	Total	Laut	Perairan Umum	Total
1	Kab. Agam	8,627.41	509.07	9,136.48	8,885.65	865.66	9,751.31
2	Kab. Kep. Mentawai	11,213.66	-	11,213.66	12,327.32	0.00	12,327.32
3	Kota Padang	25,447.73	15.28	25,463.01	28,830.64	19.09	28,849.73
4	Kota Pariaman	6,011.90	-	6,011.90	6,087.51	0.00	6,087.51
5	Kab. Padang Pariaman	15,901.30	494.60	16,395.90	18,954.10	727.00	19,681.10
6	Kab. Pasaman Barat	100,333.10	-	100,333.10	100,675.10	0.00	100,675.10
7	Kab. Pesisir Selatan	55,405.77	114.25	55,520.02	47,968.10	105.62	48,073.71
8	Kab. Dharmasraya	-	249.35	249.35	-	350.48	350.48
9	Kota Bukittinggi	-	9.68	9.68	-	1.78	1.78
10	Kota Padang Panjang	-	6.03	6.03	-	3.16	3.16





11	Kota Payakumbuh	-	9.41	9.41	-	11.45	11.45
12	Kota Sawahlunto	-	29.34	29.34	-	28.35	28.35
13	Kota Solok	-	2.19	2.19	-	4.40	4.40
14	Kab. Lima Puluh Kota	-	1,487.76	1,487.76	-	4,141.74	4,141.74
15	Kab. Pasaman	-	1,176.03	1,176.03	-	1,176.49	1,176.49
16	Kab. Sijunjung	-	202.17	202.17	-	190.48	190.48
17	Kab. Solok	-	934.26	934.26	-	1,044.83	1,044.83
18	Kab. Solok Selatan	-	391.79	391.79	-	714.17	714.17
19	Kab. Tanah Datar	-	2,871.02	2,871.02	-	2,931.12	2,931.12
	TOTAL	222,940.87	8,502.23	231,443.09	223,728.42	12,315.79	236,044.21

Sumber : DKP, 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan perikanan tangkap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor hasil perikanan. Produksi perikanan tangkap tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu tongkol, teri, tuna, kerapu dan lain-lain. Sumatera Barat termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-572 yang meliputi wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Berdasarkan estimasi potensi sumberdaya ikan diketahui bahwa di wilayah perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP-572) dengan potensi sebesar 1.229.950 ton, tingkat pemanfaatannya dikategorikan sudah penuh yakni $\pm 94,44\%$ atau sebesar 1.161.564,78 ton.

Produksi perikanan tangkap tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim. Beberapa hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan melakukan pemberian bantuan sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada nelayan, pemberdayaan masyarakat nelayan melalui pembinaan dan peningkatan SDM dalam penggunaan sarana alat tangkap dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) secara optimal dan berkelanjutan. Pembinaan yang dilakukan ke setiap Kab/Kota mencakup bimbingan teknis, pemanfaatan teknologi penangkapan dan sarana penangkapan lainnya, sehingga pada akhirnya nelayan dapat memanfaatkan sarana penangkapan yang ada untuk meningkatkan hasil produksi/hasil tangkapan.





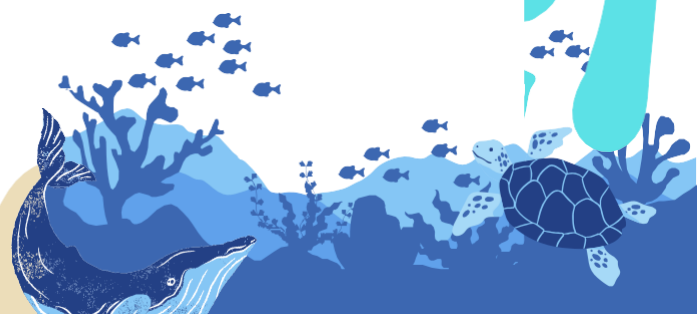
Pemberian bantuan sarana penangkapan (mesin, jaring, rumpon laut dangkal dan fish box) yang diberikan oleh pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap.

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah nelayan di Sumatera Barat mencapai 46.650 orang, dengan sebagian besar masih mengandalkan metode penangkapan ikan secara tradisional. Di Kabupaten Pasaman Barat, misalnya, sekitar 70% nelayan masih menggunakan perahu kecil dan alat tangkap sederhana, sementara sebagian kecil telah beralih ke teknologi modern dengan kapal bermotor dan peralatan yang lebih canggih. Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, ada peluang besar bagi nelayan Sumatera Barat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan kapal, alat tangkap ramah lingkungan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan.

Tabel.2.1.13
Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Tahun 2023 dan 2024

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jaring	246 unit	175 unit
2.	Mesin	611 unit	225 unit
3.	Fish Box	950 unit	650 unit
4.	Perahu Fiber	0	10 unit
5.	Alat Tangkap Kepiting	1.360 unit	0
6.	Rumpon Laut Dangkal	1 unit	0
Total		3.168 unit	1.060 unit

Dari tabel dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan ke nelayan memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi perikanan tangkap. Dengan bantuan mesin, jarak tempuh nelayan dalam menangkap ikan lebih jauh, dan dengan bantuan jaring yang baru dan kuat, nelayan lebih mudah melakukan penangkapan ikan.





Peluang untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan adalah:

1. Penambahan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu.
2. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.



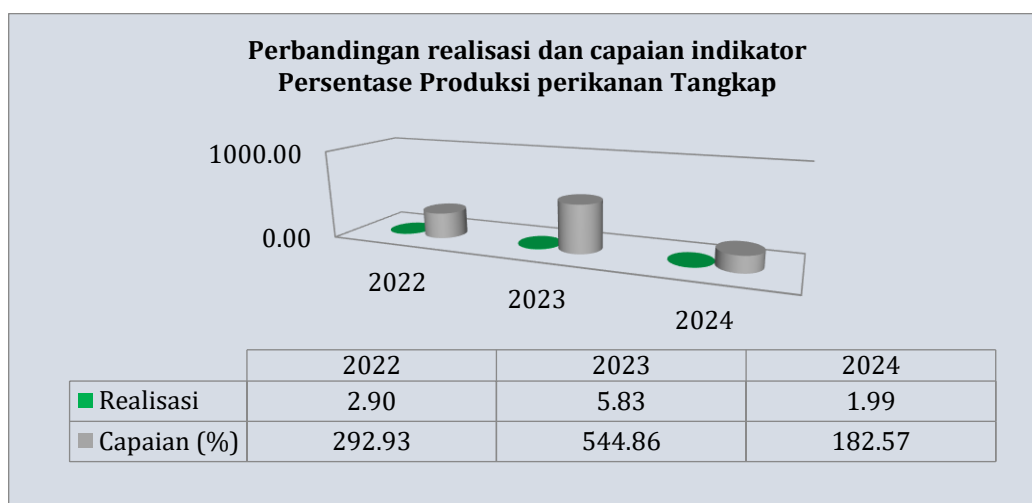


Disamping pemberian bantuan berupa sarana penangkapan ikan, untuk menjaga produksi hasil perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan upaya peningkatan fasilitas sarana prasarana di UPTD pelabuhan perikanan yaitu (Pelabuhan Perikanan Wilayah I Carocok Tarusan Kab. Pesisir Selatan, Pelabuhan Perikanan Wilayah II Air Bangis Kab. Pasaman Barat dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III di Sikakap Kab. Kep. Mentawai) seperti dermaga, pembangunan kantor Surantih, Kios PPI Air Bangis, Gudang ikan Air Bangis, becak motor, dan lain-lain untuk kebutuhan operasional penangkapan. Untuk tahun 2024, kegiatan yang dilaksanakan di ketiga UPTD pelabuhan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan dan beberapa pengadaan yang dibutuhkan. Disamping itu juga dilakukan penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan.

Tabel.2.1.14
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022– 2024

No.	Indikator Kinerja	2022			2023			2024 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,99	2,90	292,93	1,07	5,83	544,86	1,09	1,99	182,57

Jika dilihat dari indikator kinerja, persentase peningkatan produksi perikanan tangkap meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024 yang sebelumnya 2,90% meningkat menjadi 5,83% dan menurun menjadi 1,99%, Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 - 2024



**Tabel.2.1.15****Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 *	Target Akhir Renstra 2026	Capaian s/d 2024 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,99	1,17	170%

*Angka sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 1,99% dengan capaian sebesar 170% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 1,17%. Dilihat dari capaian tahun ini, sebenarnya telah melebihi target akhir Renstra, sehingga perlu perbaikan target Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel.2.1.16**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024*	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,99	14,23	+

*Angka sementara

Capaian peningkatan produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.1.17**Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Nasional**

Capaian	Produksi (ton)		
	2022	2023	2024*
Nasional (ton)	7.987.704	6.471.730	7.392.837
Peningkatan (%)	10,56	-18,98	14,23
Sumatera Barat (ton)	218.688,65	231.443,09	236.044,21
Peningkatan (%)	2,90	5,83	1,99

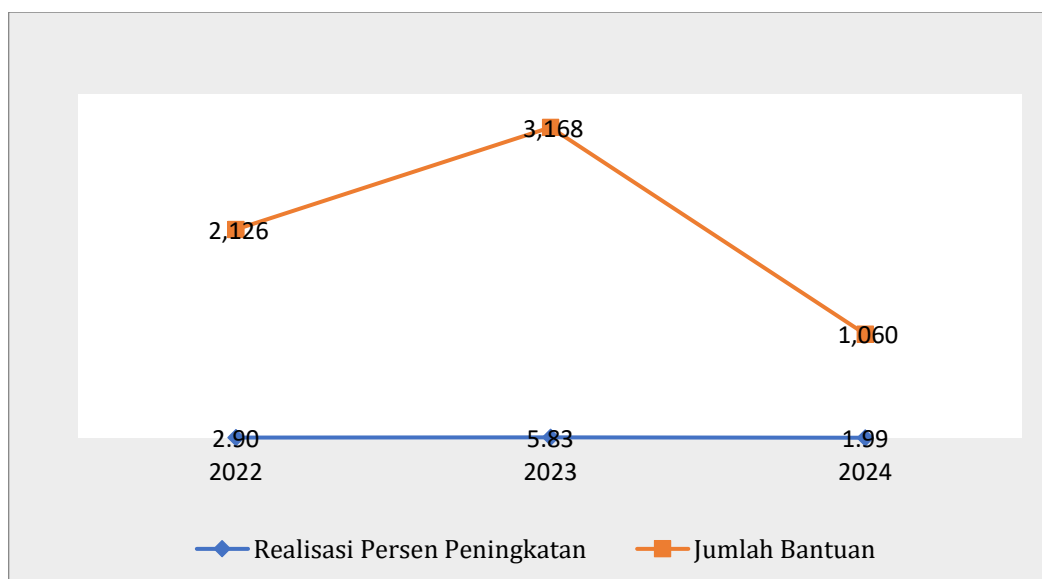
Sumber : One Data KKP,2024





Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2024 meningkat sebesar 14,23% dari tahun sebelumnya.

Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval tinggi dan sangat tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase peningkatan produksi perikanan tangkap baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja masih memakai meningkatnya pendapatan nelayan. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik: Perkembangan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Bantuan yang diserahkan
Tahun 2022 - 2024

Selain memberikan bantuan sarana prasarana perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga memberikan pelayanan Perlindungan Nelayan Melalui Pemberian Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Menetapkan Regulasi tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Provinsi Sumatera Barat

Pada Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan satu Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Perda ini merupakan amanat dari Undang-Undang No 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, dan Petambak Garam. Sebagai aturan teknis penyelenggaraan kegiatan juga ditetapkan Pergub No 2 tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2021 tentang





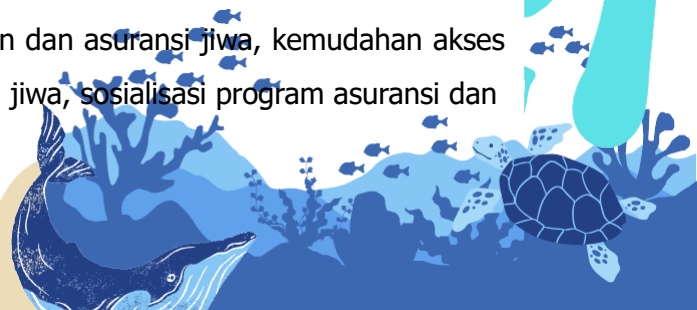
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dimana Pergub ini menjadi salah satu regulasi pelaksanaan pemberian asuransi nelayan/jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Provinsi Sumatera Barat.

Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Fasilitasi Pemberian Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait perlindungan nelayan melalui Kesepakatan Bersama No. 120-010/MoU/GSB-2023 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang tentang Pemberian Bantuan Iuran Bagi Pekerja Rentan Nelayan di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 1.
Penyerahan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nelayan di Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ditetapkannya Pergub No 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Dimana Pergub ini menjadi salah satu regulasi pelaksanaan pemberian asuransi nelayan/jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Fasilitasi Pemberian Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dan nelayan tradisional atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan yaitu kecelakaan kerja dan kehilangan nyawa dalam bentuk asuransi nelayan. Perlindungan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk fasilitasi kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta asuransi perikanan dan asuransi jiwa, kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi perikanan dan asuransi jiwa, sosialisasi program asuransi dan





perusahaan asuransi serta bantuan premi asuransi nelayan. Bantuan pembayaran premi asuransi nelayan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa bagi kecelakaan kerja dan kehilangan nyawa. Pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang sumber dananya berasal dari anggaran APBD mulai dilaksanakan Tahun 2023, premi dibayarkan untuk 4109 orang nelayan skala kecil. Pada Tahun 2024 bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan telah diberikan bagi nelayan skala kecil sebanyak 3.000 orang. Nelayan yang menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan ini tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota wilayah pesisir dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota wilayah perairan umum.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 1,99 dengan tingkat capaian 182,57%. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Meningkatkan sarana penangkapan ikan dengan memberikan bantuan mesin tempel, alat penangkapan ikan serta sarana penyimpanan ikan berupa fish box yang berasal dari Kementerian, Provinsi dan Kab/Kota.
2. Memberikan pelayanan perizinan kepada kapal-kapal perikanan berupa rekomendasi sehingga usaha penangkapan ikan dapat berjalan dengan lancar.
3. Memberikan sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan
4. Melakukan pemberdayaan & perlindungan terhadap usaha nelayan berupa SeHAT, BPJS
5. Penyediaan sarana yang dibutuhkan nelayan di Pelabuhan Perikanan seperti tambat labuh, air bersih, es dan SPBUN

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya persentase peningkatan produksi perikanan tangkap adalah :

1. Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.
2. Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.
3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya.
4. Proses perizinan yang masih tidak lancar dan terkesan rumit sehingga banyak nelayan





terkena razia di laut.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini adalah Bidang Perikanan Tangkap dengan Dinas Perikanan yang membidangi perikanan di Kab/Kota dalam upaya langkah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap beserta kendala yang dihadapi.
2. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Bidang Perikanan Tangkap dengan UPTD Pelabuhan Perikanan dan UPT Pusat tentang fasilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap sesuai dengan identifikasi kebutuhan masing-masing UPTD Pelabuhan Perikanan.
3. Meningkatkan hasil tangkapan ikan melalui bantuan kepada masyarakat nelayan
4. Tetap melaksanakan apa yang sudah di upayakan pada Tahun 2024 seperti pemberian bantuan sarana penangkapan ikan bagi nelayan
5. Melaksanakan sosialisasi kepada nelayan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan (SDI)
6. Melaksanakan koordinasi antar Instansi terkait perizinan usaha perikanan (PPS Bungus, KSOP, Lantamal, PPW I, PPW II, PPW III , DPMPTSP)
7. Melaksanakan PKS dengan universitas dalam rangka peningkatan produksi dan upaya mengatasi permasalahan nelayan.

2. Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Sumatera Barat memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kabupaten/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Ditas dan Danau Dibawah ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai. Selain itu ada potensi budidaya payau dan laut yang terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.

Potensi produksi perikanan budidaya di Sumatera Barat menurut jenis usaha tahun 2024 yaitu kolam air tenang 199.328,809 ton, kolam air deras 32.618.807 ton, jaring apung tawar 14.241,161 ton, Tambak 4.103,352 ton, Keramba 4.491,189 ton, sawah 1.029,601 ton, Budidaya laut 193,766 ton dan jarring tancap tawar dengan produksi 768,57 ton.

Komoditi utama untuk budidaya air tawar adalah ikan mas, nila, gurami dan lele. Pada Tahun 2024 produksi perikanan budidaya sebesar 279.335,001 Ton dengan jumlah pembudidaya ikan sebanyak 76.829 orang. Pada saat ini juga mulai berkembang budidaya





air payau di tambak yaitu budidaya udang vaname di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang.

Daerah potensial untuk menjadi sentra produksi perikanan budidaya air tawar ini tersebar di berbagai Kabupaten dan Kota yaitu antara lain : Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar. Bentuk kegiatan perikanan budidaya air tawar yang dilakukan umumnya adalah budidaya pada kolam air tenang, kolam air deras, keramba jaring apung dan budidaya ikan pada lahan sawah yang dikenal dengan istilah Minapadi.

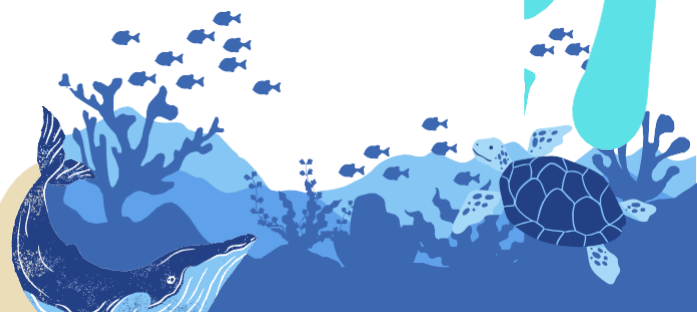
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023, telah ditetapkan 6 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebagai Kampung Perikanan Budidaya yaitu :

1. Kabupaten Pasaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan mas
2. Kabupaten Agam sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan nila
3. Kota Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan lele
4. Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
5. Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami
6. Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kampung Perikanan Budidaya ikan gurami

Provinsi Sumatera Barat juga bisa menjadi lokasi pengembangan budidaya Rumput Laut dengan lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan pada daerah :

1. Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kabupaten Pasaman Barat

Hasilnya juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pengolahan rumput laut menjadi produk-produk turunannya yang bernilai tambah tinggi.





Tabel.2.1.18

Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA											
No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.32	5.56	3.33	3.36	3.39	2.052	3.71	1.84	3.78	3.97
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	256,747	261,573.39	262,256	268,774.30	274,280	274,290	284,467	279,335.00	295,226	306,934
3	Jumlah usaha budidaya yang mendapatkan sertifikat CPIB dan CBIB (unit)	5	63	20	28	40	767	60	88	80	100
4	Jumlah daerah yang dilakukan Pengendalian hama penyakit ikan (Kab/Kota)	17	9	17	18	17	17	19	19	19	19
5	Jumlah produksi perikanan budidaya laut (ton)	52	64.9	67	1,046.97	72	159.54	79	193.766	85	93





Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 279.335,001 ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 274.290 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing-masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Data ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.1.19
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2023 dan 2024

No	Kab/Kota	Produksi (Ton)	
		2023	2024
1	Lima Puluh Kota	39.535,779	40.403,537
2	Agam	30.660,684	34.409,393
3	Pesisir Selatan	16.490	16.057,460
4	Dharmasraya	27.224,100	28.105,485
5	Sijunjung	3.103,938	2.813,808
6	Tanah Datar	11.475,771	7.854,992
7	Pasaman	64.268,442	64.718,750
8	Pasaman Barat	7.830,123	6.797,393
9	Padang Pariaman	58.170	61.074,620
10	Kab. Solok	6.001,883	6.616,076
11	Solok Selatan	3.820,939	4.315,545
12	Mentawai	329,136	331,111
13	Padang	2.859,105	3.054,857
14	Pariaman	340,900	340,430
15	Ko.Solok	161,400	165,550
16	Payakumbuh	580,080	886,363
17	Sawahlunto	217,542	210,650
18	Padang Panjang	775,028	781,280
19	Bukittinggi	445,150	397,701
Total		274.290	279.335,001

Sumber : DKP, 2024

Produksi perikanan budidaya tiap tahunnya fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya faktor cuaca dan iklim, banjir dan serangan hama dan penyakit ikan. Beberapa hal tersebut diatas menjadi pertimbangan



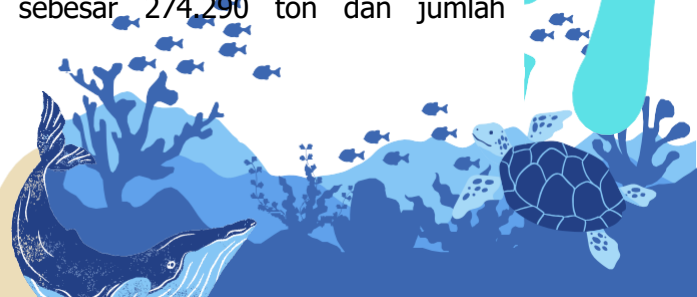


bahwa perlu dilakukan upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain dengan pemberian bantuan benih dan pakan ikan.

Tabel.2.1.20
Pendapatan Per Pembudidaya Tahun 2024

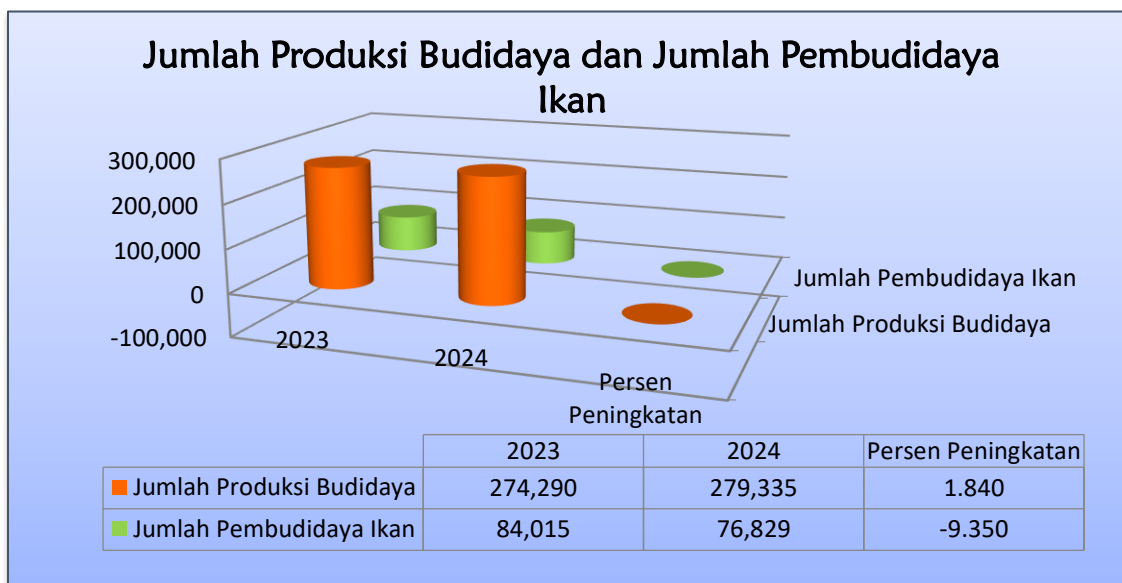
No	Jenis usaha	Produksi menurut jenis usaha (Ton)	Nilai produksi (Rp.000)	Jlh pmbddy (org)	biaya prod (Rp.000)	Pendapatan (Rp.000)	Pendapatan /org (Rp.000)
1	Kolam air Tenang	199,328.809	4,965,761,552	67,077	3,724,321,164	1,241,440,388.00	18,507.69
2	Kolam Air Deras	32,618.807	909,894,865	4,477	682,421,148.75	227,473,716.25	50,809.41
3	Jaring Apung Tawar	14,241.161	381,468,429	1,861	286,101,321.75	95,367,107.25	51,245.09
4	Tambak	4,103.352	351,187,420	438	263,390,565.00	87,796,855.00	200,449.44
5	Keramba	4,491.189	147,214,500	470	110,410,875.00	36,803,625.00	78,305.59
6	Sawah	1,029.601	29,682,343	1,551	22,261,757.25	7,420,585.75	4,784.39
7	Budidaya laut	193.766	29,110,300	670	21,832,725.00	7,277,575.00	10,862.05
8	Jaring Tancap Tawar	768.57	24,226,520	285	18,169,890.00	6,056,630.00	21,251.33
	Jumlah	256,775.26	6,838,545,929	76,829	5,128,909,447	1,709,636,482	436,214.98
	Pendapatan per jenis usaha tahun 2024						54,526.87
	Pendapatan per org/bln tahun 2024						4.543,91

Cara menghitung pendapatan pembudidaya berdasarkan jumlah produksi ikan budidaya yang dilakukan pemanenan 3 - 4 kali dalam setahun. Jumlah produksi yang didapat pada tahun tersebut dikalikan dengan nilai jual perjenis ikan budidaya tersebut dikurangi dengan biaya produksi. Atau uang yang diterima oleh pembudidaya yang merupakan hasil dari kegiatan pembudidaya ikan yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pembudidaya. Pendapatan pembudidaya perorangan diperoleh dari pendapatan dibagi dengan jumlah pembudidaya ikan pada tahun tersebut, sedangkan pendapatan diperoleh dari nilai produksi dikurangi dengan biaya produksi. Adapun jumlah produksi budidaya sebesar 279.335 ton pada tahun 2024, jumlah pembudidaya ikan 76.829 orang, sedangkan data produksi budidaya tahun 2023 sebesar 274.290 ton dan jumlah pembudidaya ikan 84.015 orang.





Gambar.2.1.21
Jumlah Produksi Budidaya dan Jumlah Pembudidaya



Data pendapatan pembudidaya ikan dan produksi budidaya tahun 2024 masih berupa angka sementara yang akan secara bertahap akan divalidasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas yang membidangi sektor perikanan Kab/Kota.

Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya melalui program pengelolaan budidaya perikanan. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan pembudidaya ikan yaitu :

- 1) Pemberian bantuan benih ikan mas, nila, gurami, lele dan kerapu beserta pakan ikan dan obat-obatan.
- 2) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di UPTD BPBALP (Balai Pengembangan Budidaya Air Laut dan Payau dan UPTD KPSDKP
- 3) Sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya, pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, temu teknis hama dan penyakit ikan.





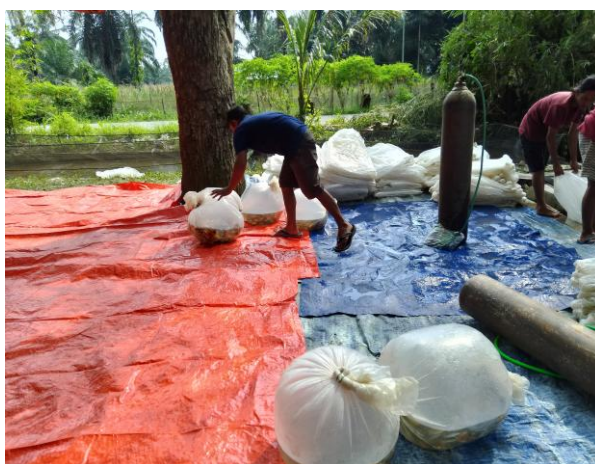
- 4) Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat.
- 5) Mendorong pembudidaya menggunakan pakan alternatif dengan program gerpari (Gerakan Pakan Mandiri). Pakan alternatif yang dibuat oleh pembudidaya ikan dapat menekan biaya produksi.
- 6) Mendorong pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
- 7) Membantu pemasaran hasil budidaya dengan informasi pasar yang luas

Peluang untuk meningkatkan produksi dan meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan adalah : Lahan budidaya yang belum dimanfaatkan secara maksimal, budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar (kolam air deras dan kolam mina padi dan budidaya secara intensif) dapat menjadi peluang.

Tabel 2.1.22
Bantuan Sarana Perikanan Budidaya Tahun 2023 dan 2024

No.	Jenis bantuan yang diberikan	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Benih ikan nila	1.150.000 ekor	236.056 ekor
2.	Benih ikan mas	540.000 ekor	100.000 ekor
3.	Benih ikan lele	437.020 ekor	333.975 ekor
4.	Benih ikan gurami	233.506 ekor	20.000 ekor
5.	Pakan benih	106.735 Kg	46.785 Kg
6.	Calon induk nila	15.200 Kg	800 Kg
7.	Calon induk lele	1.100 Kg	500 Kg
8.	Pakan induk	12.000 Kg	3.820 Kg
9.	Benih kerapu hybrid	26.000 ekor	4.500 ekor
10.	Pakan Kerapu	14.560 Kg	1.500 Kg
11.	Benur vaname	500.000 ekor	440.000 ekor
9.	Pakan vaname	15.000 Kg	6.000 Kg
10.	Obat-obatan	107 botol	0
11.	Waring	18 unit	0
12.	Kepiting	0	200 ekor
13.	Apartemen kepiting	0	2 unit
14.	Benih lobster	0	1.400 ekor
15.	KJA lobster	0	2 unit
16.	Apartemen cacing sutra	0	1 unit



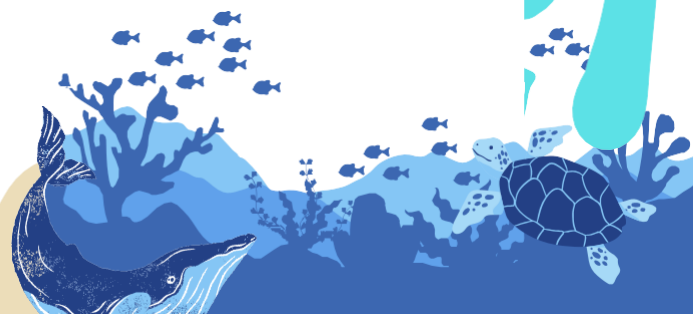


Capaian Indikator ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.23
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 – 2024

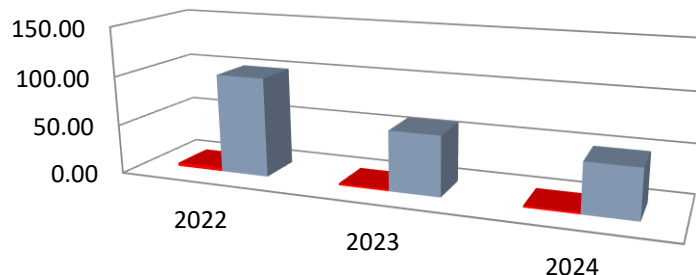
No.	Indikator Kinerja	2022			2023			2024 *		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3,33	3,36	100,90	3,39	2,052	60,53	3,71	1,84	49,60

Jika dilihat dari indikator kinerja, persentase peningkatan produksi perikanan budidaya menurun dari tahun 2022 ke tahun 2024 yang sebelumnya 3,36% menurun menjadi 2,052% dan menurun kembali menjadi 1,84%, Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini :





Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase Produksi Perikanan Budidaya



	2022	2023	2024
Realisasi	3.36	2.052	1.84
Capaian (%)	100.90	60.53	49.6

Grafik : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 – 2024

Tabel.2.1.24

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

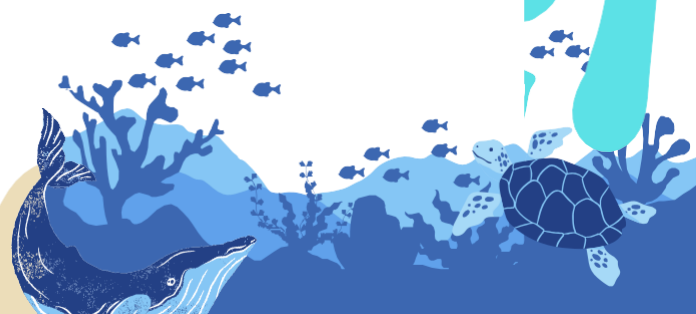
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,84	3,97	46,35%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2024 sebesar 1,84% dengan capaian sebesar 46,35% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 3,97%. Dilihat dari capaian tahun ini, sebenarnya perlu usaha dan kerjasama bersama agar target akhir Renstra tercapai.

Tabel.2.1.25

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional *	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,84	1,26	+





Capaian peningkatan produksi perikanan budidaya Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

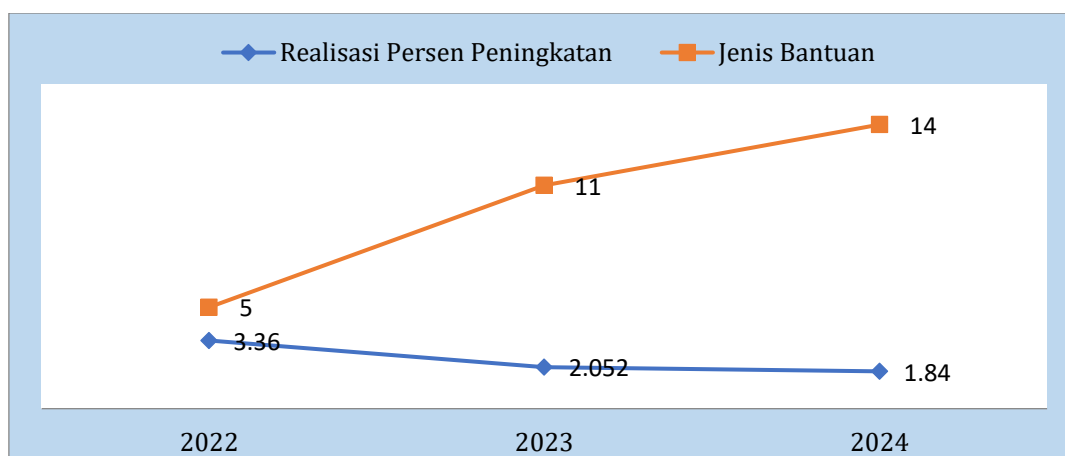
Tabel.2.1.26**Capaian Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Nasional**

Capaian	Produksi (ton)		
	2022	2023	2024
Nasional (ton)	16.392.167	16.967.518	17.182.010
Peningkatan (%)	1,21	3,51	1,26
Sumatera Barat (ton)	268.774,30	274.290,00	279.335,001
Peningkatan (%)	3,36	2,052	1,84

Sumber : One Data KKP,2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2024 meningkat sebesar 1,26% dari tahun sebelumnya.

Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif, mulai dari interval Sangat rendah sampai Sangat Tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase peningkatan produksi perikanan budidaya baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja masih memakai meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik: Perkembangan Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Jenis Bantuan yang diserahkan Tahun 2022 - 2024





Selain pemberian bantuan sarana perikanan budidaya berupa bibit dan pakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera melakukan pengembangan budidaya lobster. Luas Provinsi Sumatera Barat sejauh 12 mil seluas 3.409.837 Ha. Dalam Matak Teknis Muatan Perairan Pesisir yang telah disetujui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 bahwa luas zona perikanan budidaya adalah 4.381,90 Ha (0,13% dari luas perairan Provinsi Sumatera Barat). Hal ini tentunya Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya lobster. Dengan potensi wilayah yang luas dan dukungan dari pemerintah, budidaya lobster di Sumatera Barat memiliki prospek yang cerah. Dengan adanya potensi lobster hal ini tentu akan menambah nilai ekonomi di sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.

Upaya Pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkoordinasi dengan Tim Ahli dari Universitas Bung Hatta telah melaksanakan penelitian survey pemetaan potensi lobster. Dengan tujuan untuk mendapatkan kajian informasi sumber benih, sumber pakan, kesesuaian lahan lokasi budidaya lobster dan memberikan rekomendasi teknis budidaya lobster di Perairan Sumatera Barat dengan sasarannya akan tersedia informasi potensi dan teknis budidaya lobster,

Dalam penyusunan Peta Kesesuaian Lahan Perairan dilakukan untuk menganalisis kesesuaian pemanfaatan ruang di kawasan perairan dengan menyiapkan peta dasar yang menjadi acuan pemasukan data spasial maupun data ArcGIS 10.4 Peta Dasar digunakan dari peta BIG dan Peta RZWP3K Provinsi Sumatera Barat. Hasil dari pemetaan mempunyai potensi Benih dan lobster yang melimpah pada Kab. Mentawai, Kab. Pessel dan terdapat nelayan terampil dan terlatih untuk menangkap lobster.

Potensi Pengembangan Budidaya Lobster :

1. Kab. Kep. Mentawai sebagai lokasi budidaya lobster dan sumber BBL
2. Kab. Pesisir Selatan sebagai lokasi budidaya lobster dan sumber pakan lobster
3. Kota Padang sebagai lokasi budidaya lobster
4. Kab. Agam sebagai sumber pakan lobster
5. Kab. Pasaman Barat sebagai sumber pakan lobster

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai produksi perikanan budidaya antara lain :

1. Memberikan Bantuan Benih dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan.





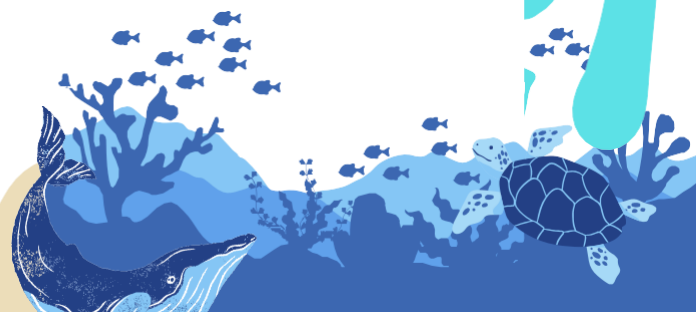
2. Meningkatkan akses pembudidaya ikan terhadap sarana dan produksi, teknologi serta pasar.
3. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan.

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya persentase peningkatan produksi perikanan budidaya adalah:

1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.
2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
3. Ketersediaan induk unggul terbatas.

Upaya yang dilakukan ke depannya untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini adalah Bidang Perikanan Budidaya dengan Dinas Perikanan yang membidangi perikanan di Kab/Kota, yang memiliki kewenangan terhadap kelompok pembudidaya serta langkah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya beserta kendala yang dihadapi.
2. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Bidang Perikanan Budidaya dengan UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau (BPBALP) tentang fasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan identifikasi kebutuhan UPTD BPBALP.
3. Pembinaan teknis atau temu lapang dengan para pembudidaya untuk meningkatkan produksi dengan hasil yang optimal serta sehat dan aman untuk dikonsumsi.
4. Koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas/SKPD/UPTD yang terkait dengan Pengelolaan Kesehatan Ikan.
5. Memberikan Bantuan Benih dan pakan dalam rangka peningkatan produksi kepada kelompok pembudidaya ikan.
6. Meningkatkan akses pembudidaya ikan terhadap sarana dan produksi, teknologi serta pasar.
7. Menjaga kelestarian sumberdaya hayati perikanan dengan tetap memperhatikan keamanan dan lingkungan.





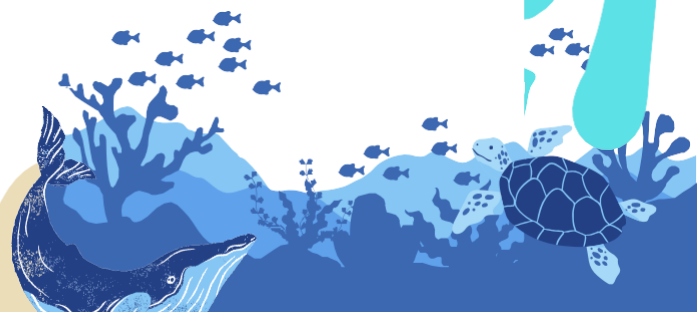
3. Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021–2026 yaitu Meningkatkan Pemasaran Produk Perikanan dengan indikator kinerja yaitu Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target 158,42 Milyar.

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya pemasaran produk perikanan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.



**Tabel.2.1.27****Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 202-2026**

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											
No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)	6.30	6.30	6.49	10.03	7.26	7.50	7.95	8.15	8.05	11
2	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	15,633	9,118	16,652	10,032.64	17,861	10,785.09	19,280	11,663.80	20,832	22,742
3	Tingkat konsumsi ikan (Kg/Kap/Thn)	39.27	40.46	40	40.77	40.5	44.48	41.6	44.9	42.4	43.5
4	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	153.76	230.62	155.50	272.35	156.85	291.00	158.42	159.66	160.00	161.60
5	Entrepreneur	150	150	350	280	400	400	450	200	500	550





Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.2.1.28
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	158,42	159,66	100,78	Sangat Tinggi

Data hasil ekspor perikanan ini diperoleh dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang dan Pengumpul yang ada di 7 Kabupaten/Kota Pesisir pantai Provinsi Sumatera Barat. Data dari pengumpul berasal dari Kabupaten Agam, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Untuk pengumpul yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, mereka langsung menjual ke pengumpul di Kota Padang.

Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan, sehingga harga ikan sangat mahal.

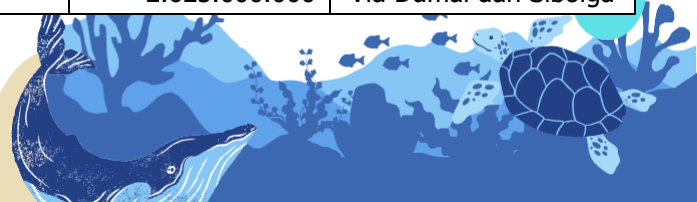
Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable).

Dalam hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan berperan dalam pengembangan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan memperkuat jejaring serta jangkauan pemasaran produk hasil perikanan dalam rangka menjaga stabilitas produksi serta ketahanan pangan. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 Dinas Kelautan dan Perikanan, sasaran ke 3 yang akan diwujudkan yaitu Meningkatnya Pemasaran Produk Perikanan.



**DATA EKSPORT HASIL PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

NO	JENIS	Jumlah			TUJUAN
		Kg	Ekor	Rupiah	
I. Karantina					
1	Tuna Frozen	7027.71	-	1.222.943.756	Dubay dan Jepang
2	Ikan Hias Laut	362.406	-	17.538.786.350	Cina, Hongkong, Vietnam, dan Taiwan
3	Ikan sepat Kering, ikan teri kering, ikan kering acah, belut kering, udang rebon kering	28,7	-	4.286.200	Jepang, Australia, dan Hongkong
4	Lobster (Batam, jakarta, Surabaya, Denpasar)	320	189.092	14.959.900.000	Malaysia
5	Ikan Garing	127	-	5.770.000	Thailand
6	Benih Garing (Mahseer Fry Live)	-	39.080	74.685.000	Malaysia
7	Frozen Mahseer Fish (Ikan Garing)	60	-	4.500.000	Malaysia
8	Patin Beku	856	-	46.335.000	Malaysia
9	Meretrix (kerang)	310	16.200	33.077.250	Thailand
10	Live grouper fish	480.000	-	1.415.848.000	Hongkong
11	Common (kerang)	-	42.630	65.441.760	Thailand
12	Indian Chank (kerang)	138	-	10.350.000	Thailand
13	Ikan Cupang	-	52.067	5.206.700.000	Via Jakarta
14	Gurita segar	74.678		3.733.900.000	Via Jakarta
15	Ikan Kerapu Segar	4.732		2.021.368.000	Hongkong
16	Mangrove Mud Clam (Lokan)		15.640	98.327.000	Australia dan Vietnam
TOTAL		923.656	354.709	46.442.218.316	
II. PT Sumbar Laut AWI (Padang - Via Jakarta)					
1	Tuna (Sumbar laut)	12.380	-	1.238.000.000	Via Jakarta
2	Gurita(S.Laut)	11.540	-	832.000.000	Via Jakarta
TOTAL		23.920	-	2.070.000.000	
III. (UD Maladewa) Pariaman					
1	Kerapu	25.500	-	3.900.000.000	Via Dumai dan Sibolga
2	Kakap	99.000	-	11.880.000.000	Via Dumai dan Sibolga
3	Udang kelong	70.000	-	9.510.000.000	Via Dumai dan Sibolga
TOTAL		194.500	-	25.290.000.000	
NO	JENIS	Jumlah			TUJUAN
		Kg	Ekor	Rupiah	
IV. Lewat Darat (Pessel) (Medan dan Pekanbaru)					
1	Kakap	110.000	-	9.900.000.000	Via Dumai dan Sibolga
2	Pari	82.500	-	2.625.000.000	Via Dumai dan Sibolga

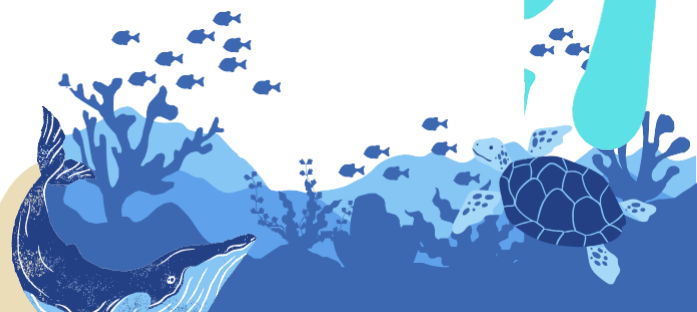




3	Udang kelong	75.000	-	9.000.000.000	Via Dumai dan Sibolga
4	Baledang	87.000	-	3.480.000.000	Via Dumai dan Sibolga
5	Tenggiri	99.500	-	6.467.500.000	Via Dumai dan Sibolga
TOTAL		454.000	-	31.472.500.000	
V. Lewat Darat (Agam) Jalur Medan					
1	Tenggiri	104.000	-	6.760.000.000	Via Sibolga
2	Kerapu	31.500	-	3.250.000.000	Via Sibolga
3	Kakap Merah	98.000	-	6.510.000.000	Via Sibolga
4	Kakap Hitam	86.800	-	6.452.000.000	Via Sibolga
5	Baby tuna	113.500	-	6.242.500.000	Via Sibolga
6	Pari	68.500	-	2.055.000.000	Via Sibolga
7	Kepiting	9.300	-	651.000.000	Via Sibolga
TOTAL		511.600	-	31.920.500.000	
VI. Lewat Darat (SASAK) Sibolga dan Dumai					
1	Tenggiri	117.000	-	7.605.000.000	Via Dumai dan Sibolga
2	Bawal	79.000	-	5.200.000.000	Via Dumai dan Sibolga
TOTAL		196.000	-	12.805.000.000	
VII. Lewat Darat (Air Bangis) Dumai					
1	Tenggiri	88.000	-	5.525.000.000	Via Dumai
2	Bawal	52.500	-	2.695.000.000	Via Dumai
TOTAL		140.500	-	8.220.000.000	
VIII. Udang Vaname Padang Pariaman					
1	Udang Vaname	18.000	-	1.440.000.000	Via Dumai
TOTAL		18.000	-	1.440.000.000	
Jumlah		2.495.174	355.454	159.660.218.316	

Jumlah Volume (Kg)	2.495.173,74
Jumlah Nilai (Rupiah)	159.660.218.316,00
Jumlah Nilai (Milyar)	159,66
Jumlah Volume (Ekor)	355.454,00

Capaian Indikator ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :



**Tabel.2.1.29****Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 – 2024**

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024*		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	155,30	272,35	175,37	156,85	291	185,53	158,42	159,66	100,78

Sumber : DKP,2024

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah melebihi target yaitu di atas 100% yaitu capaian tahun 2024 sebesar 100,78%, capaian tahun 2023 sebesar 185,53% dan capaian tahun 2022 sebesar 175.37%. Target indikator kinerja sasaran 3 ini sudah tercapai dan termasuk kategori Sangat Tinggi.



Grafik : Perbandingan realisasi dan capaian indikator Nilai ekspor hasil perikanan
Tahun 2022 - 2024



**Tabel.2.1.30****Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)	159,66	161,60	98,80

Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) pada tahun 2024 sebesar 159,66 milyar telah mencapai 98,80% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 161,60 milyar. Capaian ini Sangat Tinggi. Nilai ekspor hasil perikanan diambil dari jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin maupun olahan. Jenis komoditi yang dominan untuk di ekspor yaitu tuna, frozen tuna, lobster, layur segar, tenggiri dan lain-lain.

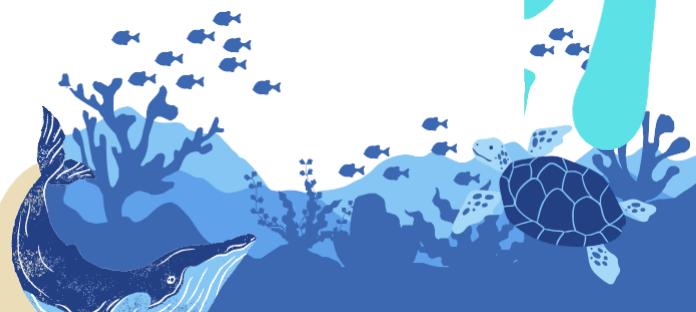
Tabel.2.1.31**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional**

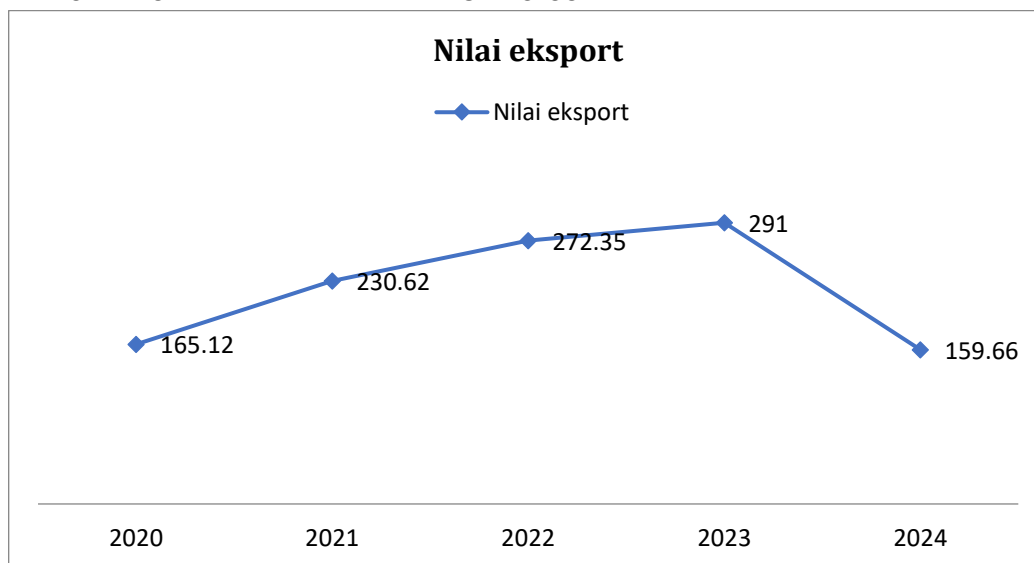
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024*	Ket (+/-)
1.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)	159,66	-	+

Sumber : One data KKP, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Untuk nilai eksport nasional data belum dapat kami dapatkan, sehingga tidak dapat membandingkan dengan realisasi Sumatera Barat.

Gambaran capaian nilai eksport dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif. Rata-rata berada pada interval Tinggi dan Sangat Tinggi. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :





Grafik : Perkembangan Nilai ekspor Tahun 2022 - 2024

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) sebesar 159,66 (milyar) dengan tingkat capaian 100,78% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat seperti mempromosikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada masyarakat antara lain: penyerahan bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

Adapun **hambatan** yang ditemui dalam meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan :

1. Belum terpenuhinya kuota produk yang akan diekspor.
2. Keberadaan armada perikanan Indonesia masih belum optimal
3. Masih adanya kegiatan pengolahan hasil perikanan yang belum memenuhi standard
4. Pemberlakuan standar oleh masing-masing negara tidak sejalan dengan yang diterapkan di beberapa industri, sehingga hal ini kadang kala menyebabkan terjadinya penolakan produk perikanan Indonesia di negara importir.

Beberapa **upaya ke depan** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan nilai ekspor hasil perikanan antara lain :

1. Standarisasi dan sosialisasi produk ekspor hasil perikanan
2. Peningkatan sarana pemasaran ikan
3. Peningkatan investasi dan memfasilitasi akses permodalan untuk pelaku usaha





4. Peningkatan promosi dan pemasaran produk dengan mengikuti pameran
5. Perbaikan mekanisme pemberian izin
6. Pengembangan produk berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan.
7. Menerapkan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam penentuan strategi peningkatan ekspor

4. Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produksi perikanan dan kedua sebagai penyanggah (buffer) bagi ketersediaan produk perikanan. Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produk perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan.

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah perikanan.

Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021–2026 yaitu " Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan dengan indikator kinerja yaitu : Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan dengan target 7,95 %.

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya produksi olahan perikanan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu





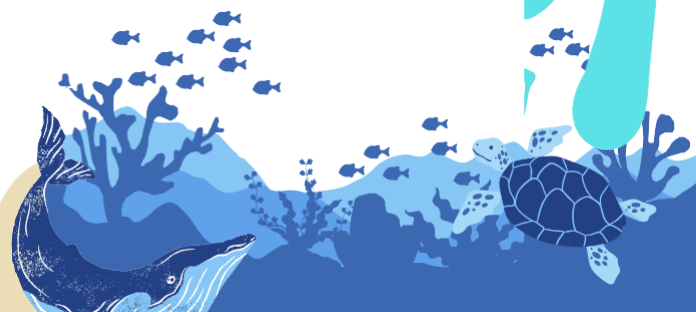
penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Capaian pada indikator kinerja Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan pada tahun 2024 sebesar 11.663,87 ton ton meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 10.785,09 ton. Data produksi ini diperoleh dari penghitungan produksi di masing – masing Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel.2.1.32
Jumlah Produksi Pengolahan Ikan Tahun 2023 -2024

No.	Kab/Kota	Produksi (ton)	
		2023	2024
01	Kab. Kep. Mentawai	71.283,30	77.860,00
02	Kab. Pesisir Selatan	971.241,00	116.572,80
03	Kab. Solok	64.285,00	76.554,50
04	Kab. Sijunjung	18.080,80	10.286,80
05	Kab. Tanah Datar	322,50	15.643,10
06	Kab. Padang Pariaman	198.058,60	859.672,80
07	Kab. Agam	687.408,80	3.026.149,90
08	Kab. Lima Puluh Kota	383.910,50	582.394,40
09	Kab. Pasaman	76.541,10	92.531,50
10	Kab. Solok Selatan	70.262,00	1.900,00
11	Kab. Dharmasraya	3.190,30	1.657,90
12	Kab. Pasaman Barat	7.666.577,50	4.851.788,00
13	Kota Padang	246.512,60	1.347.046,60
14	Kota Solok	25.089,90	330.936,00
15	Kota Sawahlunto	1.806,10	3.167,20
16	Kota Padang Panjang	326,80	21.245,00
17	Kota Bukittinggi	42.623,80	636,2
18	Kota Payakumbuh	11.954,60	19.414,20
19	Kota Pariaman	245.618,20	228.417,10
	TOTAL	10.785,09	11.663,87

Sumber : DKP,2024



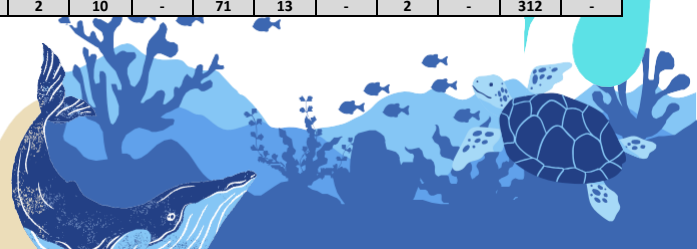
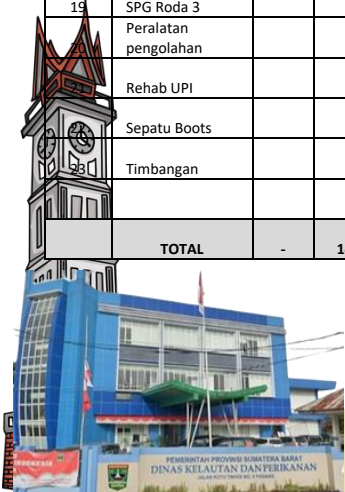


Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi. Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang

Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan (Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang sangat mudah membusuk (Highly perishable). Pemberian bantuan sarana pengolahan dan pemasaran yang diberikan pemerintah ikut memberi dampak terhadap persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan.

Tabel.2.1.33
Rekapitulasi Jumlah Bantuan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2023-2024

No	Jenis Bantuan	KABUPATEN/KOTA																			
		Sijunjung		Lima Puluh Kota		Pasaman Barat		Agam		Payakumbuh		Mentawai		Tanah Datar		Pesisir Selatan		Padang Pariaman		Bukittinggi	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Freezer		1		1				1						1						
2	Food Processor		1		1				1												
3	Kompas gas 1 tungku		3		3				5						9						
4	Tabung gas 5 Kg		3		3				5						9						
5	Slang gas		3		3				5						9						
6	Regulator		3		3				5						9						
7	Kuali Stainless steel								4						7						
8	Dandang stainless steel														3						
9	Baskom Stainless steel				6				12						12						
10	Spinner				1				1						2						
11	Handsealer				1				3						4						
12	Pisau Set								2						2						
13	Timbangan Digital								2						4						
14	Garam						8,200		5,000												
15	Fish Box 100 Liter				21	170		84			49					7				150	
16	Fish Box 200 Liter												10								
17	Fish Box 220 Liter								120												
18	Fish Box 1 Ton								5							1				2	
19	SPG Roda 3					6	2	1	12			1				5				3	
	Peralatan pengolahan							4				1						2			
	Rehab UPI							1													
	Sepatu Boots																			150	
	Timbangan																			7	
	TOTAL	-	14	-	43	176	8,202	90	5,183	-	49	2	10	-	71	13	-	2	-	312	-





Capaian Indikator sasaran 4 ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.34

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Peningkatan Olahan Hasil Perikanan	6,49	10,03	154,55	7,26	7,5	103,30	7,95	8,15	102,52

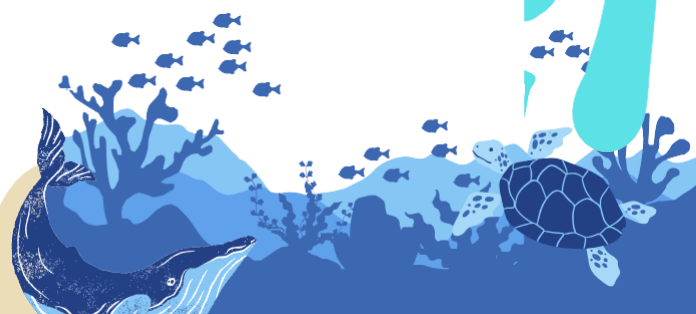
Sumber : DKP, 2024

Jika dilihat dari indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan perikanan, indikator kinerjanya meningkat, dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel. 2.1.35

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	8,15	11	74,09





Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan Tahun 2024 sebesar 8,15 % dengan capaian sebesar 74,09% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 11 %.

Tabel 2.1.36**Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2023*	Ket (+/-)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	8,15	5,4	+

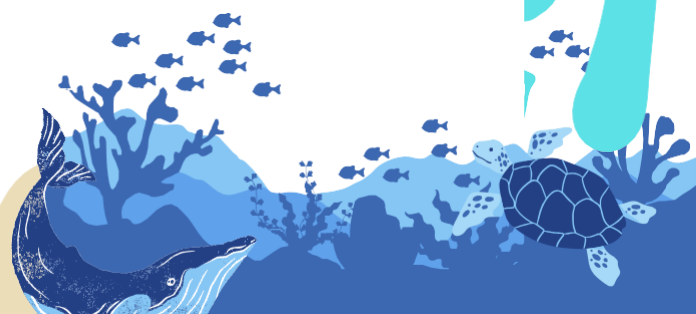
Tabel 2.1.37**Capaian Peningkatan Produksi Olahan Nasional**

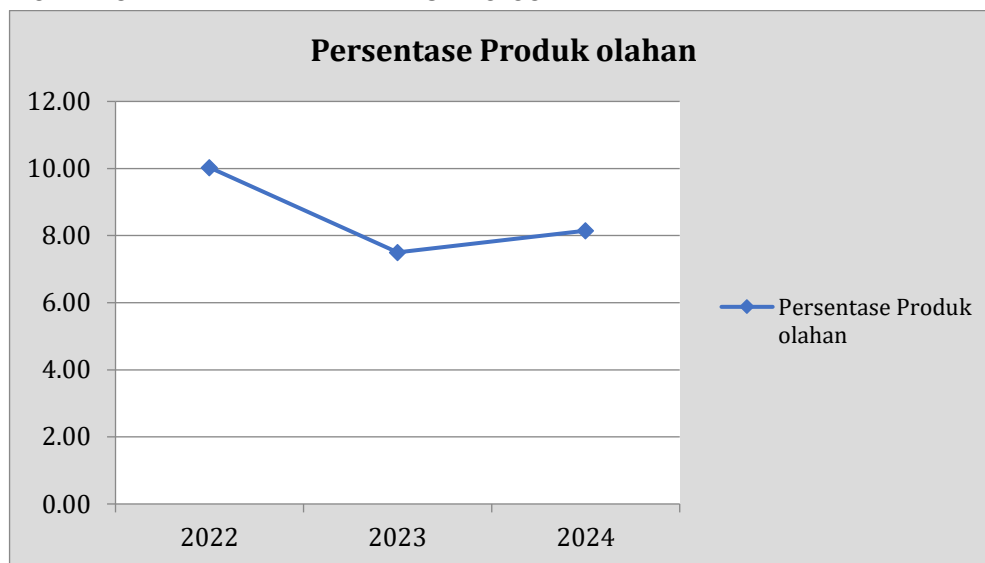
Capaian	Produksi (ton)	
	2023	2024
Nasional (ton)	4.944.231	5.014.371
Peningkatan (%)	-	5,4
Sumatera Barat (ton)	10.785,09	11.663,8
Peningkatan (%)	7,5	8,15

Sumber : One Data KKP, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional. Produksi kelautan dan perikanan nasional tahun 2024 meningkat sebesar 0,65% dari tahun sebelumnya.

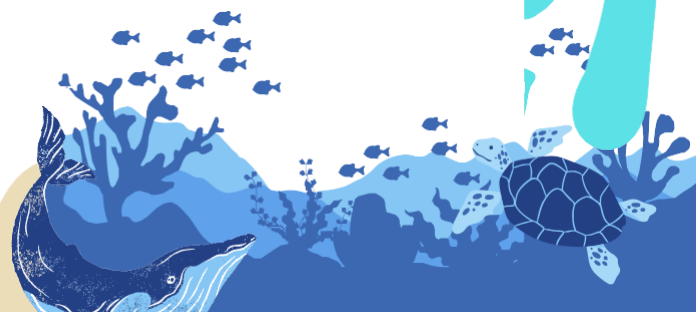
Gambaran Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan nilai yang berfluktuatif, mulai dari interval Tinggi sampai Sangat Tinggi. Perkembangan indikator hanya dapat dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun ini karena indikator persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan baru ditetapkan di tahun 2022. Pada tahun 2020 sd 2021, capaian indikator kinerja tersebut belum ada. Perkembangan indikator tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

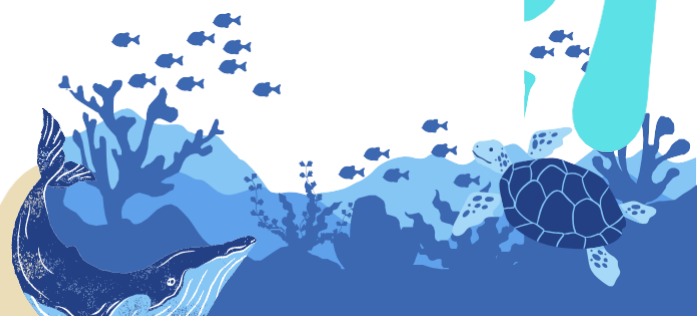




Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan sebesar 8,15% dengan tingkat capaian 102,52% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain mempromasikan hasil – hasil produk olahan hasil perikanan Sumatera Barat kepada masyarakat, memberikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan kepada masyarakat, memperkenalkan keanekaragaman produk perikanan dari Sumatera Barat, mengadakan lomba masak menu serba ikan, gemarikan dan lain-lain, meningkatkan daya saing produk perikanan kepada masyarakat luas dan melakukan koordinasi dengan Kab/Kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi olahan hasil perikanan yaitu :

1. Pelatihan Pengolahan Ikan dengan pengolah di Kab/Kota
2. Peningkatan SDM petugas mutu hasil kelautan dan perikanan
3. Pelatihan penerapan GMP/SSOP dalam Sistem HACCP
4. Kegiatan Forikan dan Gemarikan
5. Workshop Angka Konsumsi Ikan
6. Bantuan Sarana Pengolahan





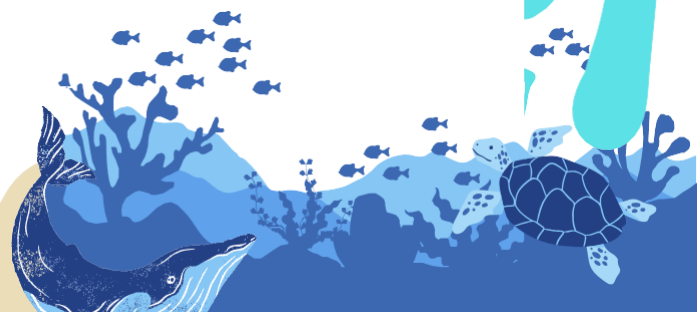


Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam meningkatkan pemasaran hasil perikanan yaitu :

1. SDM pengolah kurang
2. Ragam menu dari ayam dan daging masih lebih dimintai oleh masyarakat.
3. Belum seluruhnya masyarakat mengkonsumsi ikan sesuai dengan standar yang seharusnya.
4. Masyarakat masih banyak menyukai komoditi lain untuk dikonsumsi.

Beberapa ***upaya ke depan*** yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan produksi olahan hasil perikanan antara lain :

1. Memanfaatkan potensi perikanan dan perkembangan teknologi, untuk menghasilkan produk yang bermutu dan berkualitas.
2. Diversifikasi produk olahan hasil perikanan
3. Membangun kemitraan dan jejaring usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan
4. Peningkatan SDM pelaku usaha pengolahan hasil perikanan
5. Pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Peningkatan peran pemda dalam pengembangan produk dan pemasaran olahan hasil perikanan
7. Membangun kemitraan dengan pihak swasta yang difasilitasi pemerintah daerah.





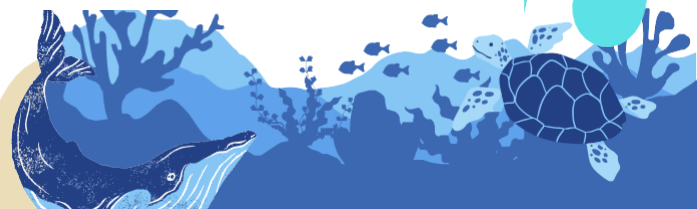
5. **Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.480 pulau-pulau besar dan kecil serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Dengan Luas daratan hanya 1,9 juta km², maka 75% wilayah Indonesia berupa lautan, yang terdiri dari 3,1 juta km² wilayah laut teritorial dan 2,7 juta km² zona ekonomi eksklusif (ZEE). Dengan realitas seperti ini, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumberdaya kelautan, yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources), sumberdaya alam tidak dapat pulih (non-renewable resources), sumber energi kelautan, dan jasa-jasa lingkungan yang sangat besar. Dengan populasi penduduk yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi, maka eksploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam pesisir dan laut semakin tinggi dan tidak terkendali.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat eksploitatif dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya alam tersebut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif baik dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat demi tercapainya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat saat ini dengan kesinambungan ketersediaan sumberdaya pesisir dan laut untuk generasi mendatang. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan hendaknya diimplementasikan dalam pengelolaan sumberdaya.

Salah satu perangkat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang dipandang efektif adalah melalui pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K), yakni dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan/atau laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan berkelanjutan. Meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap lingkungan khusus.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat peduli terhadap lingkungan laut dan pesisir, dengan melaksanakan program pemantauan kualitas air laut, pembersihan pantai terhadap bahan pencemaran sampah. Pembersihan pantai terhadap bahan pencemaran sampai dilakukan dengan kegiatan Bersih Pantai yang juga dikolaborasikan dengan kegiatan Bulan Cinta Laut yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini juga

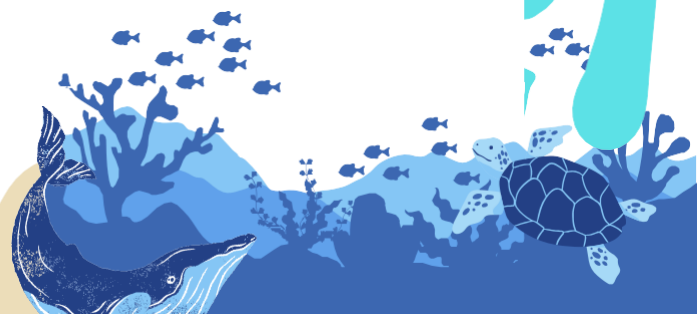




melibatkan PT. Semen Padang, PLTU Teluk Sirih, Bank Indonesia, Pegadaian BUMD dan Bank Sampah.

Gubernur Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai "Gubernur Penggerak Pengelolaan Sampah Laut" dari Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara Bulan Cinta Laut (BCL) di tahun 2023. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi dan komitmen Gubernur dalam mengatasi masalah sampah laut di Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah laut yang baik.

Sumatera Barat bekerjasama dengan PT.Semen Padang dalam mengatasi sampah. melalui program Nabuang Sarok. Melalui program ini, sampah di laut dan pesisir yang telah dipilah oleh nelayan dikirim ke pabrik PT.Semen Padang dan dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Selain itu juga bekerjasama dengan Bank Sampah dalam memilah sampah yang ikut berpartisipasi dalam program Nabuang Sarok ini. Dari program ini masyarakat yang memberikan sampah mendapat point yang dapat ditukar dengan sembako, perlengkapan rumah tangga hingga emas. Dengan demikian program ini dapat menambah pendapatan masyarakat.





Tabel 2.1.38

Pencapaian Target Indikator Kinerja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL											
No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)	41.18	37.24	47.06	49.26	52.94	59.75	58.82	66.04	64.71	70.59
2	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola (kawasan)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
3	Jumlah vegetasi pantai yang ditanam untuk rehabilitasi ekosistem (batang)	20,000	8,400	20,000	13,950	25,000	89,975	25,000	29,000	25,000	30,000
4	Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi (m ²)	250	140.4	250	300	300	300	350	154	350	350

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN											
No	Indikator	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target 2025	Target 2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	80	84.34	82	86.21	84	91	86	97.29	90	92





Gambar : Penyerahan hadiah kepada Nelayan pada acara bersih pantai Bulan Cinta Laut di Pantai Padang

• **TERUMBU KARANG**

Terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks dan produktif dengan keanekaragaman jenis biota sangat tinggi. Karang membentuk kerangka kapur yang terdiri dari CaCO_3 dan di dalam polyp karang terdapat zooxanthella yang merupakan symbion karang. Zooxanthella ini berupa algae bersel satu yang membantu dalam pembentukan kerangka kapur. Terumbu karang mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai tempat memijah, mencari makanan, daerah asuhan dari berbagai biota laut dan sebagai sumber plasma nutfah serta merupakan sumber berbagai makanan dan bahan baku substansi bioaktif yang berguna dalam bidang farmasi dan kedokteran. Terumbu karang juga mempunyai nilai estetika sangat tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari. Disamping itu secara fisik, terumbu karang melindungi pantai dari degradasi dan abrasi.

Oleh karena itu perlu adanya konservasi dan pengelolaan untuk menjaga dan memelihara ekosistem terumbu karang tersebut dan habitat yang berasosiasi di sekitarnya agar berada dalam kondisi yang baik. Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkesinambungan sangat penting, artinya ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan di wilayah pesisir.

Terumbu karang di Sumatera Barat banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh proses yang berlangsung secara alami dan dampak aktifitas manusia seperti tergerus oleh jangkar kapal, pemboman ikan, pengambilan karang, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menanggulangi keadaan ini telah dilakukan melalui berbagai proyek pelestarian





terumbu karang mencakup kegiatan pengembangan mata pencarian alternative bagi masyarakat pesisir dan kegiatan melibatkan masyarakat dalam penanaman terumbu karang (*coral farming*).

Sebaran terumbu karang di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 2.3.7 Terumbu karang yang terdapat di perairan laut Sumatera Barat pada umumnya adalah jenis terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang ini menyebar sepanjang garis pantai walaupun terdapat juga beberapa koloni terumbu karang yang tersebar secara mengelompok (*patch reef*).

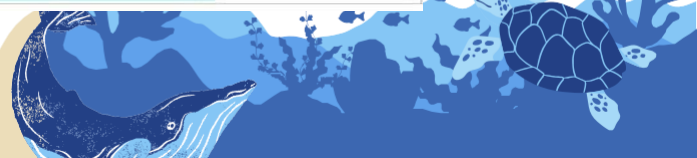
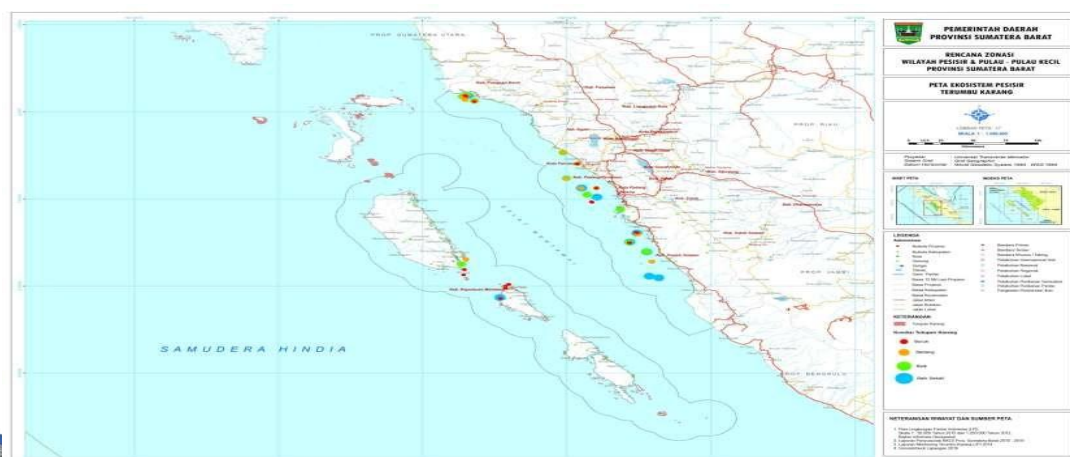
Tabel.2.1.39

Luas Terumbu Karang Sumatera Barat.

No	Kabupaten/ Kota	Areal (Ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1.065,37
2	Kota Padang	83,65
3	Kabupaten Padang Pariaman	54,60
4	Kota Pariaman	10,95
5	Kabupaten Agam	16,20
6	Kabupaten Pasaman Barat	244,50
7	Kabupaten Kep. Mentawai	17.636,72
Jumlah		19.111,99

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2015)

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2015) menunjukan bahwa luas terumbu karang di wilayah perairan laut Sumatera Barat adalah 36.693,27 ha. Luas tutupan terumbu karang terluas berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 1.065,37 ha, sedangkan yang terendah terdapat di Kota Pariaman, yaitu 10,95 ha.





• **MANGROVE**

Mangrove (hutan bakau) merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Dalam tinjauan siklus biomassa, hutan mangrove memberikan masukan unsur hara terhadap ekosistem air, menyediakan tempat berlindung dan tempat asuhan bagi anak- anak ikan, tempat kawin/pemijahan, sumber makanan utama bagi organisme air di daerah mangrove adalah dalam bentuk partikel bahan organik (detritus) yang dihasilkan dari dekomposisi serasah mangrove (seperti daun, ranting dan bunga) dan lainnya. Selama proses dekomposisi, serasah mangrove berangsur-angsur meningkat kadar proteinnya dan berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai organisme pemakan deposit seperti moluska, kepiting dan cacing polychaeta. Konsumen primer ini menjadi makanan bagi konsumen tingkat dua, biasanya didominasi oleh ikan-ikan buas berukuran kecil selanjutnya dimakan oleh juvenil ikan predator besar yang membentuk konsumen tingkat tiga.

Hutan mangrove berperan penting dalam menyediakan habitat bagi aneka ragam jenis- jenis komoditi penting perikanan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari siklus hidupnya. Mangrove mempunyai peranan ekologis, ekonomis, dan sosial yang sangat penting dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir.

Hutan Mangrove di Sumatera Barat juga mengalami tekanan perubahan. Sumber utama tekanan hutan mangrove adalah akibat dampak pemanfaatan hutan *mangrove* secara langsung dan secara tidak langsung. Diantaranya adalah pemanfaatan hutan *mangrove* yang dikonversi menjadi areal pemukiman, perkebunan, lokasi pertambakan dan lain-lain. Upaya pelestarian hutan *mangrove* dilakukan dengan cara memberi kesadaran kepada masyarakat arti penting hutan bakau secara ekologi dan dengan melakukan penanaman bakau sekaligus juga dengan memanfaatkan mangrove untuk kegiatan budidaya ikan dan kepiting bakau

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2015) menunjukkan bahwa total luas ekosistem mangrove di wilayah pesisir Provinsi Sumatera Barat 43.186.71 ha. Wilayah kabupaten/kota pesisir yang memiliki ekosistem mangrove terluas adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 32.600,00 ha. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas ekosistem mangrove terkecil adalah Kota Pariaman yaitu dengan luas 10,0 ha. Untuk lebih jelasnya tentang luas kondisi ekosistem mangrove di masing- masing kabupaten/kota pesisir Provinsi Sumatera Barat disajikan Tabel berikut :



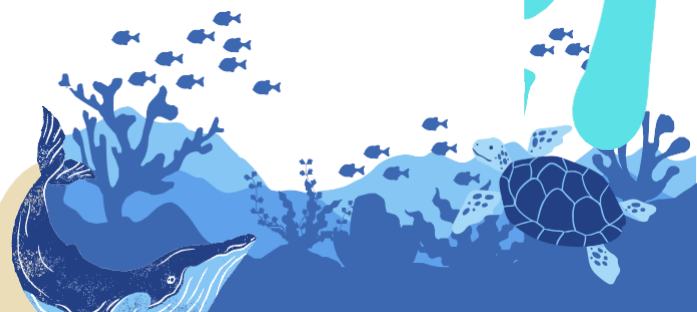
**Tabel 2.1.40****Luas Hutan Mangrove di Sumatera Barat.**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Mangrove (ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2.549,55
2	Kota Padang	1.250,16
3	Kabupaten Padang Pariaman	190,00
4	Kota Pariaman	18,25
5	Kabupaten Agam	313,50
6	Kabupaten Pasaman Barat	6.273,50
7	Kabupaten Kep. Mentawai	24.619,43
Jumlah		35.214,39



Gambar : Peta Sebaran Mangrove Sumatera Barat

Untuk mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, pemerintah Sumatera Barat dan masyarakat melakukan upaya mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur penahan gelombang, penanaman vegetasi pantai seperti Mangrove, cemara laut dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir. Giat penanaman Mangrove dan Cemara Laut juga telah menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Provnsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) konervasi wilayah pesisir di Sumatera Barat



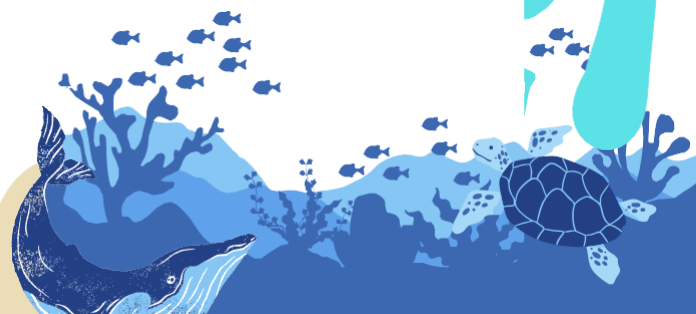


• PADANG LAMUN

Lamun (seagrass) adalah tumbuhan berbunga, berbuah, berdaun dan berakar sejati yang telah menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut dangkal. Lamun tumbuh pada dasar perairan laut yang berlumpur, berpasir dan berbatu. Hamparan tumbuhan lamun biasanya ditemui di tepi pantai, membentuk sebuah ekosistem tersendiri yang disebut padang lamun. Umumnya ekosistem padang lamun terletak diantara ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Manfaat ekosistem padang lamun antara lain adalah sebagai tempat mencari makan, hidup dan memijah bagi berbagai jenis biota bentik dan ikan, dan juga merupakan daerah yang kaya bahan organik yang berasal dari serasah daun lamun. Secara ekologis, ekosistem lamun berfungsi sebagai penyaring sampah daratan dan meredam energi gelombang sehingga bisa mengurangi tingkat erosi pantai.

Ekosistem padang lamun dan rumput laut antara lain tersebar di Kabupaten Pasaman Barat yakni di Pulau Panjang, Pulau Tamiang, Teluk Tapang. Spesies yang ditemui mayoritas 5 jenis antara lain: *Cymodocea semulata*, *Enhalus acoroides*, *Halodule wrightii*, *Halophila ovalis*, dan *Thalassia hemprichii*. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak ditemukan di Desa Mandeh, Sungai Nyalo, Pulau Setan, Pulau Sironjong Besar dan Pulau Cubadak dengan spesies mayoritas *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Penyebaran di Kabupaten Kepulauan Mentawai terutama ditemukan di Pagai Utara Selatan dan Siberut dengan spesies yang dominan adalah *Thalassia hemprichii* di Kota Padang banyak terdapat di sungai pisang dan Pulau Pisang dengan mayoritas jenis *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Gracilaria sp* dan *Gelidium sp*. Luas padang lamun berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2015) menunjukkan bahwa luas padang lamun yang ada di perairan laut Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 532 ha, dan yang terluas terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 500 ha. Sedangkan yang terkecil terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 2 ha. Luasan ekosistem padang lamun di beberapa perairan laut kabupaten/kota Pesisir Provinsi Sumatera Barat disajikan pada berikut :





Tabel.2.1.40.a
Luasan Padang Lamun.

No	Kabupaten/ Kota	Luas Lamun (ha)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2
2	Kota Padang	5
3	Kabupaten Padang Pariaman	-
4	Kota Pariaman	-
5	Kabupaten Agam	-
6	Kabupaten Pasaman Barat	25
7	Kabupaten Kep. Mentawai	500
Jumlah		532

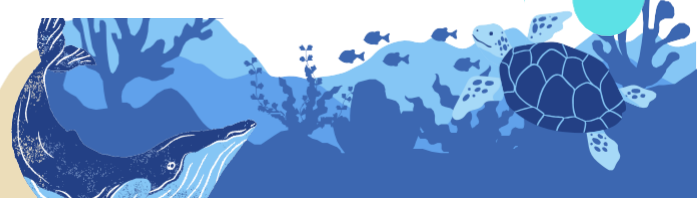
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar (2015).



Peta Sebaran Lamun di Sumatera Barat

• KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengelolaan kawasan konservasi secara optimal, dan telah mendapatkan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Kawasan Konservasi Daerah sebagai Kawasan Konservasi Terbaik ke 2 Nasional dengan Progres Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tertinggi setelah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk terus mendorong peningkatan status pengelolaan kawasan konservasi menuju pengelolaan berkelanjutan.





Dalam pengelolaan kawasan konservasi melibatkan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Salah satu kelompok masyarakat yang berhasil dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah Kelompok Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) di Nagari Amping Parak Kabupaten Pesisir Selatan. Kelompok ini berhasil menyandingkan kegiatan konservasi, pariwisata dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kegiatan yang dilakukan kelompok telah menjadikan Nagari Amping Parak sebagai salah satu tujuan wisata dan menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nagari Amping Parak telah menerima berbagai penghargaan Terakhir pada tahun 2024 penghargaan yang diraih adalah juara 3 Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata.

Provinsi Sumatera Barat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sudah menetapkan tujuh lokasi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) yang tersebar di beberapa kabupaten dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Unit Pengelola yaitu UPTD Konservasi dan Pengawasan untuk mengelola Kawasan Konservasi Daerah tersebut. Luas Kawasan konservasi di Sumatera Barat 372.432,97, Ha (10,92%) dari luas wilayah laut Sumatera Barat.

KKLD tersebut berada di Pulau Kerabak Ketek dan Pulau Penyu (Kabupaten Pesisir Selatan), Pulau Kasiak dan Pulau Talua (Kabupaten Pasaman Barat), Pulau Saibi dan Saliguma (Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan daerah Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Organisme laut yang menjadi salah satu tujuan utama konservasi dan sangat menjadi perhatian internasional adalah penyu. Sumatera Barat memiliki potensi penyu yang cukup besar terutama di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyu biasa mendarat di pulau-pulau kecil dengan kondisi yang landai dan bersih. Eksploitasi penyu di Sumatera Barat terutama untuk diambil telurnya telah menyebabkan hewan ini berkurang populasinya. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan, terkait dengan pelestarian penyu seperti bantuan MPA (Mata Pencaharian Alternatif), memberikan sarana pendukung penangkaran seperti (Bak pemeliharaan dan rumah jaga).

Dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang optimal serta berkelanjutan, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir Sumatera Barat. Pengelolaan kawasan konservasi ini merupakan salah satu upaya strategis nasional sektor kelautan karena upaya ini mempunyai kaitan langsung dengan berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya maupun aspek lingkungan. Unsur-





unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan bertujuan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dan/atau perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional. Kawasan Daerah dengan kriteria berada di Perairan Pesisir, diluar yang menjadi kewenangan Menteri.

Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 6 aspek utama, yaitu :

1. Pemahaman akan konteks dari kawasan konservasi, berupa nilai-nilai penting yang dimiliki oleh kawasan, ancaman-ancaman yang dihadapi, peluang-peluang yang tersedia, dan parapihak yang terlibat.
2. Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi desain (bentuk, luas, dan lokasi), perumusan visi; tujuan; dan target untuk pelestarian nilai-nilai penting dan mengurangi tekanan
3. Alokasi sumberdaya (input), yang meliputi personil/staf; alokasi anggaran yang tersedia; dan peralatan pendukung pengelolaan
4. Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang bisa diterima (proses)
5. Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan
6. Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada BAB V. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah yang Berciri kepulauan . Pada Pasal 27 Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi : a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.





Melalui Pergub No. 109 tahun 2017 UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP ditunjuk sebagai Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) 7 (tujuh) Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di Perairan di wilayah Sumatera Barat. Dari tujuh kawasan, 6 (enam) kawasan sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan pada tahun 2023 ini, kawasan ke 7 ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 126 Tahun 2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam di Provinsi Sumatera Barat. Ke tujuh kawasan konservasi tersebut adalah Kawasan Konservasi Selat Bunga Laut di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pesisir Selatan, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Padang, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kota Pariaman, Kawasan Konservasi Batang Gasan di Perairan di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kawasan Konservasi di perairan di Wilayah Kabupaten Agam.

Kawasan Konservasi Daerah di Wilayah Sumatera Barat di kelola dengan sistem zonasi yang berpedoman kepada (Permen KP No.31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi) yang meliputi :

1. Zona Inti

Ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.

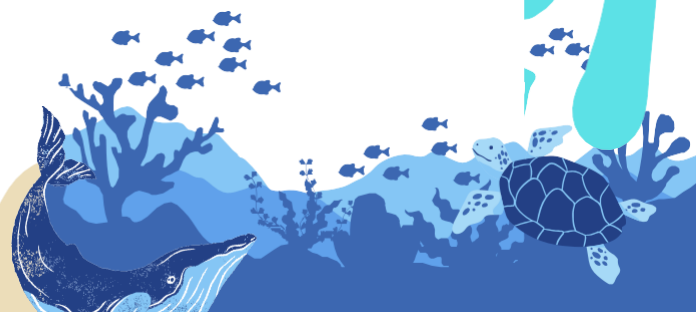
Zona inti pada Kawasan Konservasi dengan kategori taman, harus memenuhi kriteria luasan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas Ekosistem dan/atau luas habitat biota target konservasi.

Zona inti mempunyai fungsi :

- a. perlindungan sumber daya genetik;
- b. habitat alami/penting bagi sumber daya ikan yang meliputi: daerah pemijahan, daerah asuhan dan daerah mencari makan.
- c. pelimpahan biota laut ke daerah penangkapan ikan;
- d. pemulihan biota dan habitat;
- e. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau
- f. perlindungan cagar budaya.

2. Zona pemanfaatan terbatas

ditujukan untuk kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat setempat di sekitar Kawasan Konservasi.





3. Zona lain sesuai peruntukan

Merupakan kawasan merupakan zona di luar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas seperti :zona rehabilitasi, zona bangunan dan instalasi laut, zona Pelabuhan/tambat labuh, zona jalur lalu lintas kapal, zona religi/situs budaya; dan/atau zona sesuai karakteristik kawasan.

Keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana history target, capaian dan anggaran.

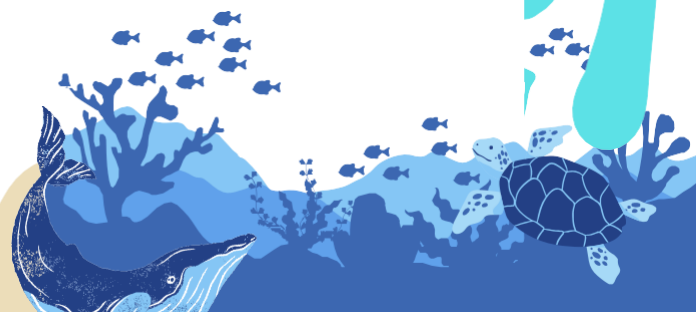
Tabel 2.1.41

Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	Capaian (%)
1.	Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil	58,82	66,04	112,27

Sumber : DKP, 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024 target dari indikator kinerja persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target sebesar 58,82% dan terealisasi sebesar 66,04% dengan tingkat capaian sebesar 112,27% termasuk kategori Sangat Tinggi.



**Tabel 2.1.42**

Penilaian Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil

NO	Kawasan Konservasi Daerah Provinsi Sumatera Barat	NILAI EVIKA % 2024	STATUS PENGELOLAAN
1	Selat Bunga Laut Mentawai	48,73	DIKELOLA MINIMUM
2	Pesisir Selatan	54,64	DIKELOLA OPTIMUM
3	Padang	48,95	DIKELOLA MINIMUM
4	Pariaman	66,02	DIKELOLA OPTIMUM
5	Batang Gasan Pd. Pariaman	45,09	DIKELOLA MINIMUM
6	Pasaman Barat	45,75	DIKELOLA MINIMUM
7	Agam	3,95	DIKELOLA MINIMUM
RATA-RATA		44,73	DIKELOLA MINIMUM

NO	Kawasan Konservasi Nasional Di Provinsi Sumatera Barat	NILAI EVIKA % 2024	STATUS PENGELOLAAN
1	Pulau Pieh	87,35	DIKELOLA BERKELANJUTAN
RATA-RATA		87,35	DIKELOLA BERKELANJUTAN

PERHITUNGAN NILAI EVIKA KAWASAN KONSERVASI di PROVINSI SUMATERA BARAT		NILAI EVIKA % 2024	STATUS PENGELOLAAN
1	Kawasan Konservasi Daerah Provinsi Sumatera Barat	44,73	DIKELOLA OPTIMUM
2	Kawasan Konservasi Nasional di Provinsi Sumatera Barat	87,35	DIKELOLA BERKELANJUTAN
RATA-RATA		66,04	DIKELOLA OPTIMUM

Sumber : DJPKRL-KKP, 2024

Alat ukur penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dituangkan dalam **Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/Kep-DJPRL/2020** tentang **Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi**. Seluruh teknis penilaian evaluasi mulai dari pembentukan Tim Penilai, Penyusunan Rencana Kerja Penilaian, Koordinasi dan Pengumpulan Dokumen, Penilaian dan Verifikasi, Perumusan Hasil Evaluasi dan Rekomendasi, sampai dengan tata cara Pelaporan semuanya jelas tertuang dalam peraturan tersebut.





Dengan adanya kegiatan di atas, capaian pada indikator kinerja Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil penilaiannya diperoleh dari 7 kawasan konservasi daerah yaitu Selat Bunga Laut, KKD Pesisir Selatan, KKD Padang, KKD Pariaman dan KKD Batang Gasang Padang Pariaman, KKD Pasaman Barat dan KKD Agam ditambah dengan Kawasan Konservasi Nasional yang terdapat pada wilayah Provinsi Sumatera Barat. Capaian kinerja ini meningkat dengan kategori Sangat Tinggi.

UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2024 telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan diantaranya terdapat satu kawasan konservasi yang ditetapkan pada tahun 2018, empat Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2021 dan satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022, serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2023.

Ada tujuh kawasan konservasi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Unit Organisasi Pengelola UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP), yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.43**Lokasi Kawasan Konservasi Pemerintah Daerah**

No	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	No. SK	Luas Kawasan (Ha)	Target Konservasi
1.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Taman Wisata Perairan Selat Bunga Laut	Kepmen KP No. 22 Tahun 2018 Tanggal 28 Februari 2018	129.566,00	Mangrove, Terumbu Karang, Ikan Balong Padang, Napoleon
2.	Kabupaten Pesisir Selatan	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 104 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	175.583,56	Terumbu Karang dan Penyu
3.	Kota Padang	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 105 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	2.188,70	Terumbu Karang
4.	Kota Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 106 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	11.778,22	Terumbu Karang dan Penyu
5.	Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 107 Tahun 2021 Tanggal 18 November 2021	735,93	Terumbu Karang dan Penyu





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

6.	Kabupaten Pasaman Barat	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 2 Tahun 2022 Tanggal 5 Januari 2022	6.122,14	Terumbu Karang
7.	Agam	Taman di Perairan	Kepmen KP No. 126 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023	6.535,98	
Jumlah ditetapkan				332.510,53	

Sumber : DKP, 2024



1. KKD SELAT BUNGA LAUT
KAB.KEPULAUAN MENTAWAI



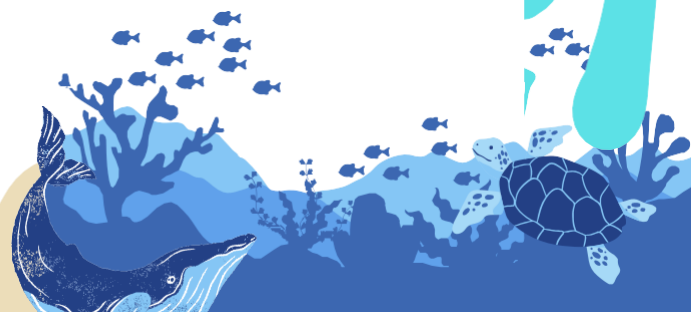
2. INSTALASI KKD PESISIR SELATAN



3. INSTALASI KKD KOTA PADANG



4. INSTALASI KKD KOTA PARIAMAN





5. INSTALASI KKD BATANG GASAN



6. INSTALASI KKD PASAMAN BARAT



7. INST. KONSERVASI JENIS IKAN SUNGAI DI SIGINCIN



8. INSTALASI KONSEVASI DANAU SINGKARAK

Pada setiap Kawasan Konservasi yang pengelolaannya telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, maka akan dilakukan Verifikasi dan Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tersebut

Pada tahun 2024 terdapat tujuh Kawasan Konservasi yang dilakukan Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, Teknis penilaian EVIKA tahun 2024 ini sama seperti tahun sebelumnya namun terdapat penambahan satu kawasan konservasi yaitu KKPD Kabupaten Agam. Berdasarkan Verifikasi dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2024, Tujuh Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan sudah **Dikelola Optimum** dengan Rata-rata persentase Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2024 yaitu **66,04%** meningkat dari tahun 2023.





Capaian Indikator sasaran meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan ini jika dibandingkan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.44
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	47,06	49,26	104,67	52,94	59,75	103,30	58,82	66,04	112,27

Realisasi 2024 jika dibandingkan dengan 2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan kinerja beberapa tahun belakangan mengalami kinerja fluktuasi, di tahun 2023 dan di 2024 mengalami kenaikan 6,29. Jika dilihat dari indikator kinerja persentase efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2024 indikator dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel .2.1.45
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

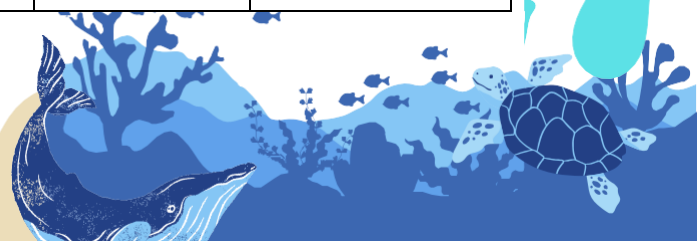
No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	66,04	70,59	93,55%

Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2024 sebesar 66,04 telah mencapai 93,55% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 70,59%. Jika dibandingkan dengan Renstra dan jika dilihat beberapa tahun sebelumnya yang berfluktuasi, tetap optimis bisa mencapai target akhir Renstra.

Tabel .2.1.46
Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024	Ket (+/-)
1.	Persentase Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	66,04	65,64	+

Sumber : BA Pleno Hasil Evika Tahun 2024





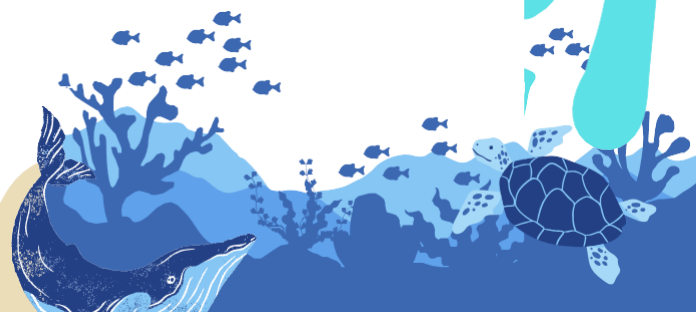
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut berkontribusi positif pada capaian nasional.

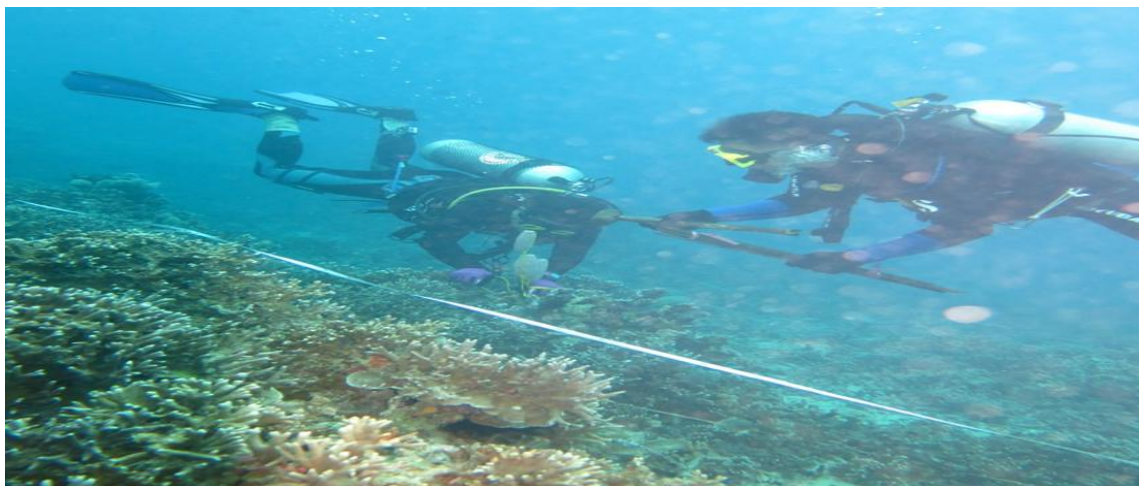
Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sebesar 66,04% dengan tingkat capaian 112,27% dengan capaian Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Penanaman mangrove sebanyak 5000 batang di Kab. Pesisir Selatan . Dalam melakukan penanaman mangrove maka hasil yang diperoleh kawasan pesisir menjadi lebih hijau dan terlindungi. Dan dampaknya mengurangi resiko seperti intrusi air laut, bencana abrasi dan tsunami dan bertambahnya luasan kawasan pesisir yang direhabilitasi
2. Monitoring mangrove di KKPD Selat Bunga Laut
3. Monitoring terumbu karang
4. Pengawasan di perairan laut dan perairan umum
3. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan monitoring biofisik perairan pesisir dimana manfaat dari kegiatan monitoring biofisik tersedianya data biofisik diperairan Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan seputar pengelolaan kawasan dilingkungan perairan kawasan konservasi dan terpantaunya kondisi biofisik diperairan

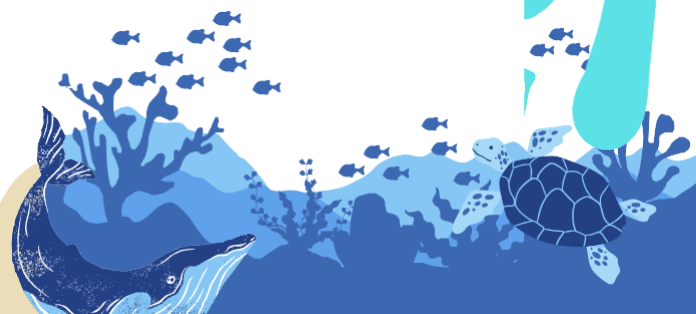


Penanaman Mangrove





Pengawasan di perairan laut dan perairan umum





Faktor pendorong untuk mencapai persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Telah dilakukan penilaian Evika di 7 kawasan, termasuk yang baru ditetapkan yaitu 1 kawasan konservasi daerah di Kab. Agam pada tahun 2023.
2. Dilakukan data series biofisik di 4 kawasan (Kawasan Selat Bunga Laut Mentawai, KKPD Pesisir Selatan, KKPD Padang dan KKPD Kota Pariaman
3. Dilakukan pengambilan data kawasan yang berdampak kepada sosial ekonomi kepada masyarakat disekitar 3 kawasan yaitu Padang Pariaman, Ko. Pariaman dan Selat Bunga Laut.
4. Dilakukan pengawasan di 4 kawasan yaitu Selat Bunga Laut, Ko. Padang, Padang Pariaman dan Ko. Pariaman
5. Dilakukan rehabilitasi atau transplantasi terumbu karang di 2 kawasan yaitu KKPD Pesisir Selatan dan Pasaman Barat.
6. Dilakukan aktivitas monitoring penyusut dan terumbu karang di 6 kawasan

Adapun ***hambatan*** yang ditemui dalam upaya mencapai persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Kondisi internal yaitu status dan kondisi kawasan yang belum sepenuhnya disepakati atau belum clear and clean, belum selesainya proses penataan batas, serta pengelolaan kawasan yang belum optimal.
2. Kondisi eksternal antara lain kebutuhan lahan karena dinamika demografi, pemekaran wilayah yang diikuti kebutuhan infrastruktur, mobilitas, pertambangan, perkebunan skala besar, permintaan pasar terhadap komoditi tertentu.
3. Adanya kesulitan untuk mengidentifikasi prioritas permasalahan; kurangnya sumberdaya yang tersedia; ketidaktepatan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki; serta belum diketahui sejauh mana pengelolaan yang dilakukan berada dalam arah yang benar dalam mencapai tujuan pengelolaan.
4. Belum semua KKPD memiliki sarana dan prasarana yang lengkap tidak layak dan tdk tercukupi, bahkan untuk KKPD Mentawai belum memiliki gedung dan bangunan tetap.
5. Belum semua SDM di KKPD memiliki kompetensi yang dibutuhkan. SDM trampil konservasi dan SDM Pengawasan masih kurang.
6. Masih banyaknya nelayan lokal dan nelayan luar belum mengetahui kawasan konservasi dan aturan pengelolaan kawasan konservasi.





7. Masih banyaknya ditemukan pelanggaran illegal fishing yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem pada Kawasan.
8. Masih maraknya perdagangan telur penyu secara tersembunyi.
9. Sosial ekonomi masyarakat belum semua yang dinilai.
10. Belum semua KKPD memiliki data-data monitoring biofisik.

Beberapa ***upaya tindak lanjut ke depan*** yang dapat dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu :

1. Pendanaan/anggaran berkelanjutan yang bersumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Government Organization (NGO) yang berfokus pada program pelestarian lingkungan khususnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
2. Menjalin kemitraan melalui pengelolaan bersama (comanagement) yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM/NGO, dan sektor swasta.
3. Peningkatan dan penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan untuk kesadaran menjaga sumber daya, pengawasan bersama, dan pelestarian kearifan lokal/budaya yang berhubungan dengan laut.
4. Pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan jasa ekosistem laut antara lain: kegiatan wisata laut, rekreasi, budidaya laut, pembangunan resort/cottage, pembangunan fasilitas pendukung wisata (jeti/dermaga). Selanjutnya digunakan untuk mendukung operasional dan pemulihan serta pelestarian sumberdaya kawasan konservasi.
5. Pemulihan dan perbaikan habitat ikan untuk peningkatan populasi ikan melalui proses rantai makanan yang tetap sehat dan terjaga serta tempat pemijahan ikan
6. Perlindungan pesisir dengan mengurangi dampak badai dan abrasi.
7. Mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan pengrusakan habitat ikan akibat aktivitas manusia dan pembangunan.
8. Membuat rencana pengelolaan zonasi pada kawasan yang telah ditetapkan (RPZ)
9. Menambah sdm dan memberikan peningkatan sdm dengan memberikan bimbingan teknis sertifikasi kompetensi keahlian berupa keahlian kompetensi terumbu karang, ikan karang, megamorfos, mangrove, dan padang lamun
10. Meningkatkan sarana dan prasarana, koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Dirjen PRL dan PSDKP KKP RI tentang pembangunan





dan rehabilitasi kawasan konservasi dan pengawasan SDKP yang telah ditetapkan melalui dana DAK dan Dekonsentrasi dari Kementerian.

11. Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kab/Kota dalam penerapan Perda RZWP3K dengan RTRW.

Tabel 2.1.47

**Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) per Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat**

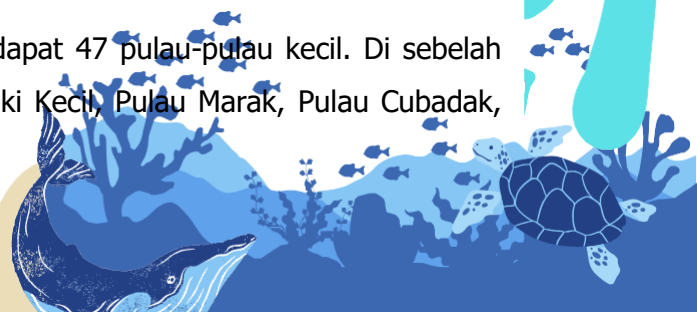
No.	Lokasi KKPD	Nama Kawasan	Jenis Yang Dilindungi	Luas Kawasan (Ha)	Jumlah Populasi (ekor)	No. SK
1	Kab. Pesisir Selatan	Suaka Alam Perairan	Penyu, kerumbu karang	174.899,3	400	523/311/Kpts/BPT-PS/2011
2	Kota Padang	Taman Pulau Kecil	Penyu, Kima, Kuda Laut	1.861,8	-	224/2011
3	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Kec. Batang Gasan	Penyu, ikan hias	684,0	-	02/Kep/BPP-2010
4	Kota Pariaman	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu	11.525,89	750	334/523/2010
5	Kab. Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	-	12.000,0	-	520/2012
6	Pasaman Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penyu dan ikan tertentu	6.795,8	-	188.45/456/2012
7	Mentawai	Kawasan Perairan Selat Bunga Laut dan sekitar KKPD	Ekosistem Terumbu karang	129.566,95	-	188-45-142/2012
Jumlah				337.545,95	1.150,0	

Sumber data : DKP Provinsi Sumatera Barat

• PULAU-PULAU KECIL DAN PARIWISATA BAHARI

Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk keperluan usaha perikanan, pengembangan hutan *mangrove*, terumbu karang dan wisata bahari. Pada saat ini pemerintah menetapkan kawasan Mandeh sebagai ikon wisata bahari Sumatera Barat. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil. Sebagian dari pulau-pulau tersebut dikelola untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, Pulau Sikuai, sementara itu ada yang dikelola untuk keperluan konservasi laut seperti Pulau Sikuai, Pulau Penyu, Pulau Pieh dan Pulau Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau.

Dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 47 pulau-pulau kecil. Di sebelah utara terdapat Pulau Semangki Besar, Pulau Semangki Kecil, Pulau Marak, Pulau Cubadak,





Pulau Setan Terusan, Pulau Karao, dan beberapa pulau lainnya. Pada umumnya pulau-pulau ini memiliki potensi menjadi kawasan wisata bahari, dan salah satunya Kawasan Mandeh yang sudah menjadi kawasan pengembangan wisata bahari secara nasional.

Selanjutnya potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan berselancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (*World Champions Surfing Series*) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun ± 3.000 wisatawan asing datang ke Kepulauan Mentawai. Rata-rata wisatawan mancanegara tersebut menghabiskan US\$ 2.500 per orang selama kunjungan.

Tabel .2.1.48

Sebaran Pulau - Pulau Kecil Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
	<u>Kabupaten</u>	
1	Kepulauan Mentawai	98
2	Pesisir Selatan	47
3	Agam	2
4	Pasaman Barat	12
5	Padang Pariaman	1
	<u>Kota</u>	
1	Padang	19
2	Pariaman	3
	Provinsi Sumatera Barat (P.Bando, Sironjong Bintangua)	3
	Jumlah	185

Sumber data : DKP Provinsi Sumatera Barat

6. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD

Tujuan "Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani" merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun yang dicapai dengan menetapkan dua indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap





Pelayanan Organisasi. Dari tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani maka ditetapkan juga dua sasaran strategis yaitu 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi .

Pada dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Target untuk mengukur indikator tujuan sama dengan indikator sasaran yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Lebih rincinya dapat dilihat pada berikut :

Tabel .2.1.49

Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2022

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	Hasil Evaluasi	
	30%	25%	15%	10%	20%	Nilai	Kategori
2020	26.52	18.78	15.88	6.35	13.56	81.09	A
2021	26.58	21.81	13.48	6.88	12.47	81.21	A
2022	26.68	19.17	10.97	6.19	17.06	80.06	A

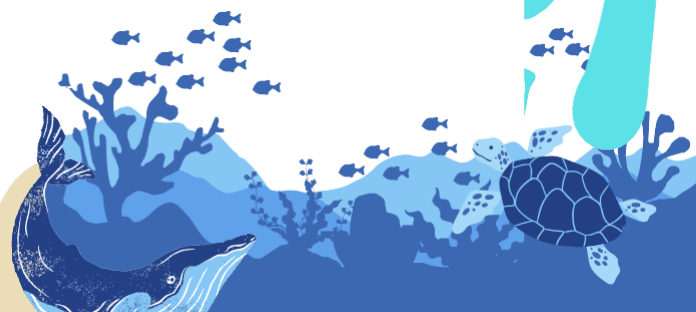
Dari Tahun 2023, Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yaitu :

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
	30%	30%	15%	25%	Nilai	Kategori
2023	27.36	20.4	12.59	19.88	80.22	A
2024	25.56	24.27	12.21	18.5	80.54	A

Tabel.2.1.50

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Target			Realisasi			% Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,12	80,15	80,16	80,06	80,22	80,54	99,93	100,09	100,47





Tabel 2.1.51
Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	80,54	80,20	100,42

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2024 sebesar 80,54 telah mencapai 100,42% dari target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80,20. Capaian ini dengan kriteria Sangat Tinggi.

Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh nilai nilai A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merupakan pemacu semangat seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tata kelola organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam lima tahun terakhir capaian nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sudah Baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar tata kelola organisasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menjadi sebuah sistem dengan pengendalian langsung pada sistem manajemen kerjanya untuk meminimalkan kesalahan manusia (human error). Dengan tata kelola organisasi yang Baik, diharapkan dapat mempermudah sistem kerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aplikasi e budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga merupakan inovasi yang meningkatkan Sistem Akuntabilitas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara lain:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, terutama Pimpinan Unit Kerja.
2. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia bahwa setiap perangkat daerah harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kerjanya yang sesuai dengan cascading.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi

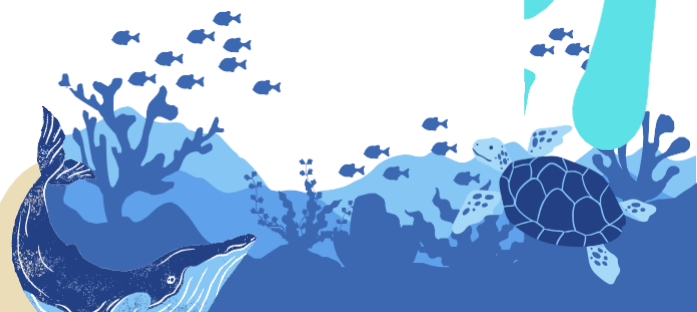




4. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
5. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
7. Sumber daya Manusia yang kompeten dan professional
8. Perencanaan yang realistis, terinci dan sesuai dengan penjabaran tujuan, sasaran dan indikator yang telah ditetapkan
9. Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, tertib administrasi dan transparan, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa, keuangan, pengelolaan aset dan pengelolaan barang inventaris
10. Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
11. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
12. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kinerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kinerjanya kurang baik

Adapun ***hambatan*** permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
2. Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.





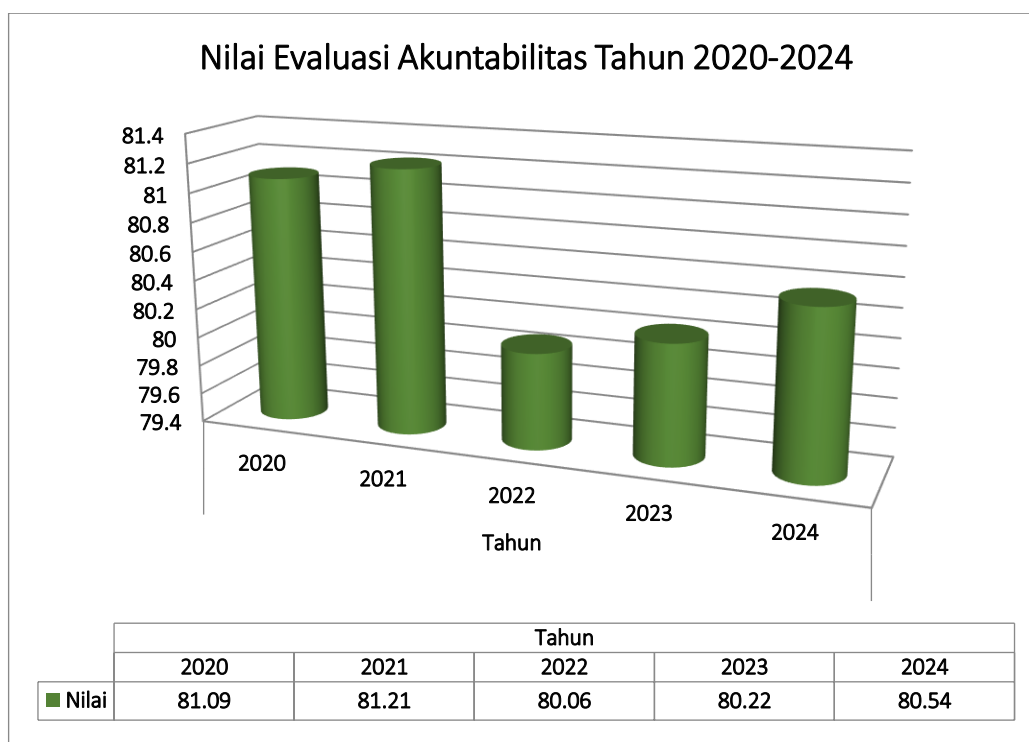
Rencana tindak lanjut dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan Nilai

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah :

1. Memperkuat komitmen para pimpinan unit kerja.
2. Perbaikan renstra (penyempurnaan indikator program dan kegiatan) dan cascading beserta crosscutting.
3. Sosialisasi dan pembinaan tentang penerapan sakip pada unit kerja.
4. FGD dalam rangka penentuan indikator kinerja, target kinerja, monitoring kinerja dan evaluasi kinerja internal baik pada tataran eselon II sd staf
5. FGD dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kinerja dengan anggaran.
6. Membangun aplikasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
7. Membangun sistem monitoring anggaran untuk efisiensi dan refocussing anggaran.
8. Evaluasi upaya pencapaian kinerja secara berjenjang per triwulan.
9. Monitoring dan evaluasi kinerja asn per triwulan.
10. Penyusunan rencana aksi eselon II hingga pejabat pelaksana/staf.
11. Melaksanakan perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi tim evaluasi SAKIP.

Gambar.2.1.52

Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas (%) Tahun 2020 s.d Tahun 2024





8. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara menetapkan target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, selain itu penetapan target juga melalui pembahasan bersama internal OPD dengan memperhatikan trend kenaikan target per tahun, bagaimana histori target, capaian dan anggaran.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .2.1.53

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
			2024	2024	2024
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	83	83	100

Sumber : DKP,2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi" adalah sebesar 100% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

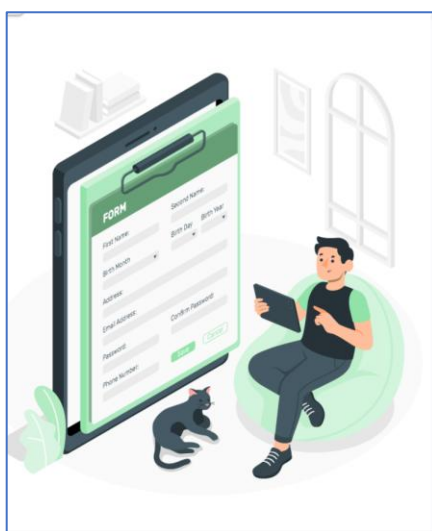




Untuk penentuan target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 didasarkan kepada target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	82	82	82.5	83	84	85

Pelaksanaan survey menggunakan kuisiener diisi menggunakan google form dengan link sebagai berikut: <https://sepakat.sumbarprov.go.id>, dimana kuisiener dibagikan ke Dinas Kab/Kota,UPTD, instansi terkait dan relasi.



Silahkan isi data diri Anda
Sistem Sepakat hanya memakai data anda sebagai bahan referensi survei

NIK Nama Lengkap

Usia Email

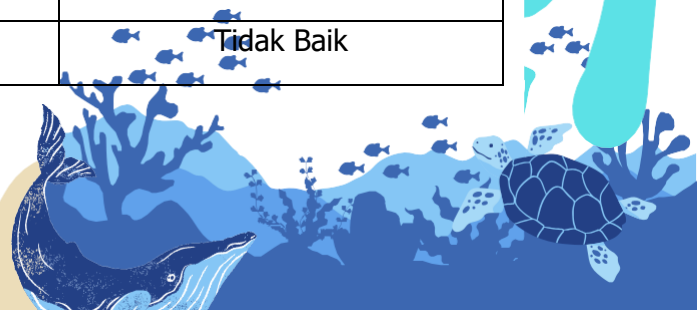
Jenis Kelamin Pendidikan

Pekerjaan

Unit Kerja Yang Dinilai

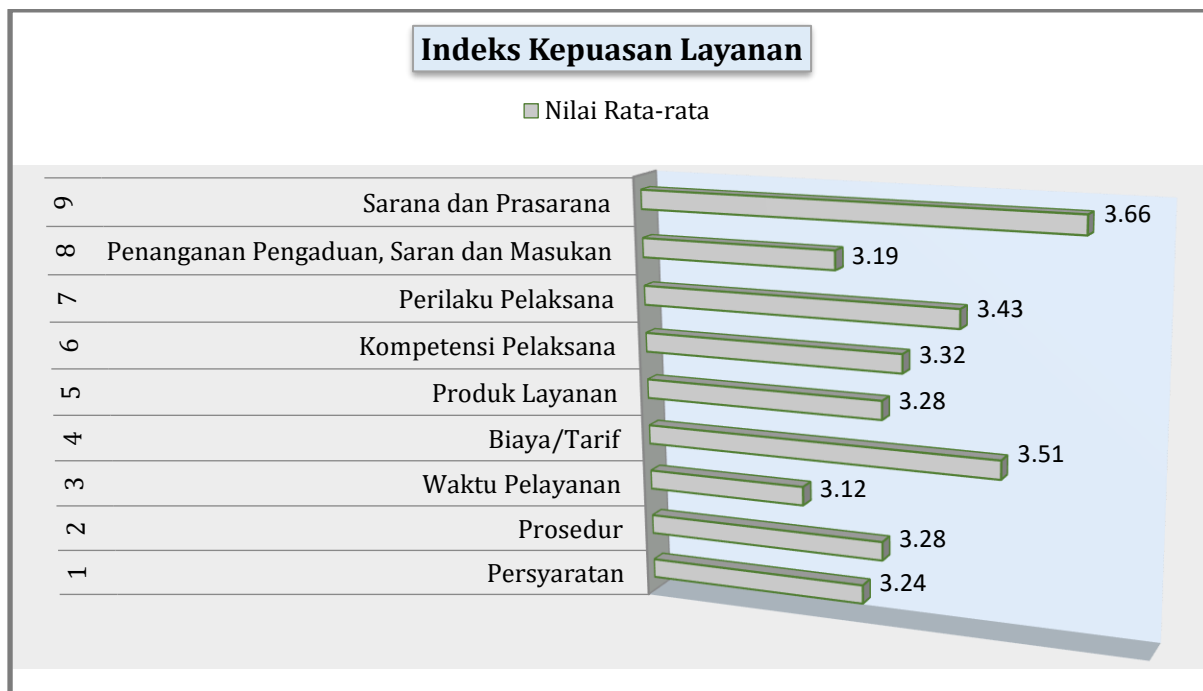
Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang Digunakan untuk pengukuran Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
88,31-100,00	A	Sangat Baik
76,61-88,30	B	Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
25,00-64,99	D	Tidak Baik





Hasil penilaian pelayanan melalui kuisioner dengan 9 unsur pelayanan kepada 74 responden dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :



Hasil dari penilaian pada 9 (Sembilan) unsur tersebut memiliki nilai 83 dimana nilai ini mencerminkan pelayanan tergolong **BAIK**. Tentunya pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan upaya *Service Excelent* mampu meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat melalui kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan terhadap pegawai dan masyarakat.

Tabel.2.1.54

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	82,5	83	86,65	83	105,03	100

Sumber : Data survey DKP

Jika dilihat dari indikator kinerja Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Dinas Kelautan dan





Perikanan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha meningkatkan pelayanan guna kepuasan masyarakat.

Tabel 2.1.55

Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir Renstra 2026	Capaian 2024 terhadap 2026
1.	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	83	85	97,65

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 sebesar 83% dengan capaian sebesar 100% dari target akhir Renstra tahun 2026 yakni sebesar 97,65%.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi nilai 86,65 dengan tingkat capaian 100%. Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sangat baik. **Upaya** peningkatan Kinerja pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pelayanan *Service Excellent*.
2. Struktur kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendorong terwujudnya sistem pelayanan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
5. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.
6. Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan prima.
7. Rekondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk pelayanan publik.

Dalam mendorong capaian tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, ditemui beberapa ***hambatan*** yaitu :





1. Tujuan yang tidak jelas. Dimana alasan dalam pelaksanaan tugas tidak dijelaskan dengan baik sehingga pelaksana tidak mengetahui apa sebenarnya yang ingin dicapai.
2. Kurangnya perencanaan dan pengembangan manajemen. Dimana orang-orang di dalam organisasi kurang dapat belajar secara efisien dalam mengerjakan tugasnya dan kurang dapat meningkatkan hasil kinerjanya.
3. Kontrol yang tidak memadai , dimana keputusan yang buruk akan didapat karena informasi yang kurang tepat dan kurang ditangani oleh orang yang tepat pula.
4. Rekrutmen dan seleksi yang tidak tepat. Dimana orang-orang yang direkrut kurang memiliki pengetahuan, kepribadian, atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Komunikasi yang tidak berjalan lancar . Visi organisasi tidak dimengerti, koordinasi antar anggota organisasi lemah, iklim organisasi rusak dan para pembuat keputusan kekurangan informasi.
6. Tim kerja yang tidak berjalan baik . Orang-orang di dalam organisasi yang seharusnya dapat bekerja sama tidak dapat menjalankan perannya dalam kelompok dan menemui banyak hambatan dalam bekerja sama.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan ***upaya di masa yang akan datang*** dalam pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Kelautan dan Perikanan menjadi SDM aparatur yang melayani.
2. Optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan penerapan *good governance*.
3. Pelayanan publik menerapkan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan standar kualitas pelayanan.
5. Membangun kualitas pelayanan serta memperbaiki manajemen pelayanan. Membangun budaya untuk adanya kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan harus melekat pada seluruh sumber daya manusia yang ada dalam organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menerima beberapa penghargaan di Tingkat Nasional yakni :

1. Tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan sebagai : Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional yang





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

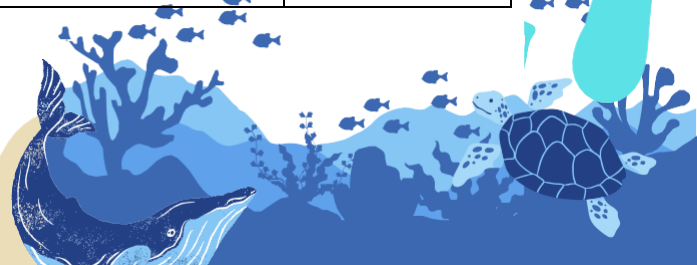
diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang diserahkan di Sulawesi Tengah pada Bulan November Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Juara Favorit Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional	Menteri Kelautan dan Perikanan	Ketua Forikan Provinsi Sumatera Barat	Sulawesi Tengah, 20-21 November Tahun 2022



2. Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Gubernur Penggerak Pengelolaan Sampah Laut Pada Kegiatan Puncak Apresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Gubernur dan Dinas Kelautan dan Perikanan	Surabaya, 08 November 2023
2	Kawasan Konservasi Daerah dengan Progres Nilai Evaluasi Efektifitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Tertinggi	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan (Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat)	Batam, 08 Mei 2023





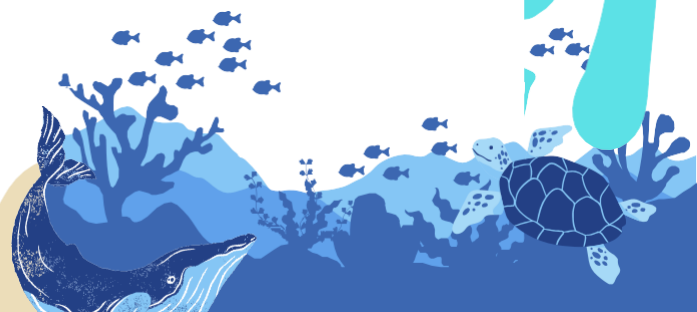
Penggerak Pengelolaan Sampah Laut



Kawasan Konservasi (EVKA) tertinggi

Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat maka dipandang perlu untuk pemberian penghargaan/reward kepada Sekretariat/Bidang dan UPTD terbaik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas. Adapun Kriteria Penilaian dalam pemberian Penghargaan atau Reward sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Terbaik
2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Tertinggi
3. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi
4. Pelayanan Publik Terbaik
5. Persentase Kehadiran Kegiatan Subuh Mubarakah
6. Tingkat Kedisiplinan Terbaik berdasarkan Absensi Online
7. Kebersihan Ruangan Terbaik Lingkup Bidang
8. Kebersihan Ruangan Terbaik Lingkup UPTD





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEGIATAN PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN SEKRETARIAT/BIDANG DAN UPTD TERBAIK TAHUN 2024



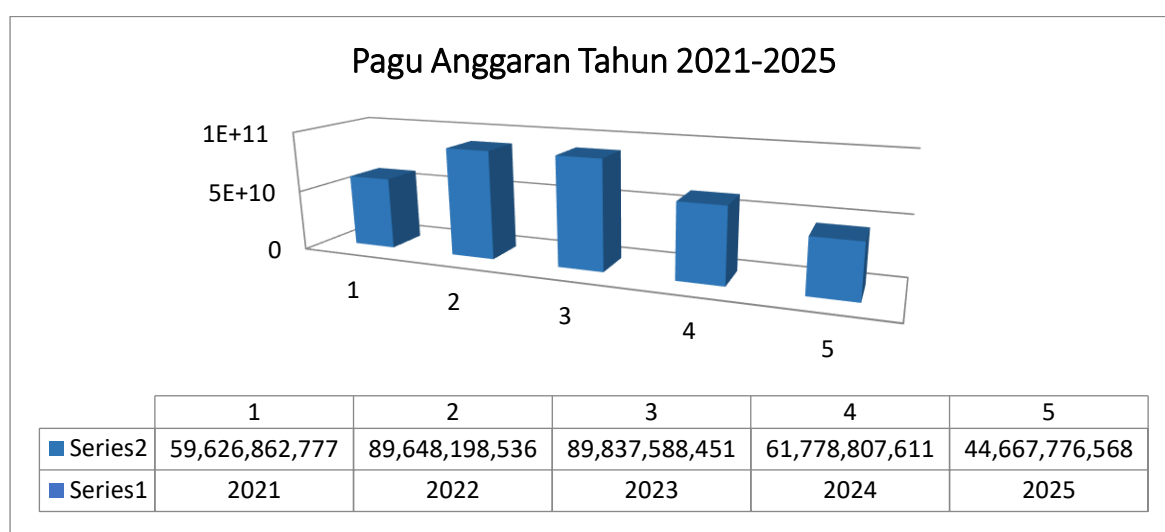


ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pada tabel dibawah ini.

Gambar 2.1.56

Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025



Berdasarkan tabel dan gambar diatas pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2026, menunjukkan bahwa :

1. Rasio antara realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sudah sangat Baik dengan rasio 92 % sampai dengan 97 %. Rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun belanja langsung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengalami naik turun anggaran.
2. Rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung berkisar antara 87,34 % sampai dengan 94,78%.

Pada dasarnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan masih dapat di selesaikan sehingga target lima tahun dapat tercapai.





Tabel 2.1.57

Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

Uraian	Anggaran pada tahun ke....					Realisasi Anggaran pada tahun ke..					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	Mei 2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN	1,392,750,000	2,279,250,000	3,227,500,000	3,374,641,671		1,574,004,443	1,372,178,995	1,578,399,959	1,189,969,092		113.01%	60.20%	48.90%	35.26%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	14,783,584,318	14,842,750,133	18,315,087,412	20,215,556,701		14,367,349,830	14,469,817,287	17,708,232,769	18,644,537,713		97.18%	97.49%	96.69%	92.23%	
BELANJA LANGSUNG	44,843,277,859	73,459,048,403	71,522,501,039	41,563,250,910		40,751,082,052	64,162,541,674	67,790,044,013	38,667,610,504		90.87%	87.34%	94.78%	93.03%	
- BELANJA POKOK	21,280,980,582	9,357,883,112	5,885,545,833	3,985,076,544		6,425,603,542	8,701,147,328	9,884,316,068	9,298,195,231						
- BELANJA URUSAN	38,345,881,095	64,101,165,291	61,399,754,807	31,907,623,470	13,708,836,511	34,325,478,510	55,461,394,346	57,905,727,945	29,369,415,273	968,768,499					
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	25,390,358,682	41,244,525,926	29,820,494,643	16,295,350,726	6,716,259,388	22,074,484,361	36,151,033,297	27,993,438,978	14,525,699,248	493,525,999	86.94%	87.65%	93.87%	89.14%	7.35%
PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA	3,703,750,020	9,581,201,055	11,992,215,032	5,417,125,462	5,472,086,768	3,523,698,308	7,482,504,286	11,640,707,917	5,133,612,536	124,453,100	95.14%	78.10%	97.07%	94.77%	2.27%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2,381,459,311	6,214,468,510	5,203,673,774	3,618,453,319	521,565,760	2,254,579,028	5,683,609,540	5,158,425,711	3,425,822,811	17,580,700	94.67%	91.46%	99.13%	94.68%	3.37%
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	4,815,131,757	4,018,151,350	8,663,526,401	4,384,611,900	546,719,745	4,453,714,579	3,395,947,066	7,733,534,924	4,225,987,215	183,922,900	92.49%	84.52%	89.27%	96.38%	33.64%
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2,055,181,325	3,042,818,450	5,719,844,957	2,192,082,063	452,204,850	2,019,002,233.87	2,748,300,157	5,379,620,415	2,058,293,463	149,285,800	98.24%	90.32%	94.05%	93.90%	33.01%
SALURAN DPK	59,626,862,777	89,648,198,536	89,837,588,451	61,778,807,611	44,667,776,568	55,118,431,881.91	79,012,571,433.04	85,498,276,782	57,312,148,217	12,179,307,306	92.44%	88.14%	95.17%	92.77%	27.27%





D. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Layanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan kelompok sasaran meliputi Kelompok pembudidaya ikan, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok masyarakat pengawas serta 19 Dinas perikanan Kab/Kota di Sumatera Barat serta masyarakat pesisir secara luas yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah provinsi

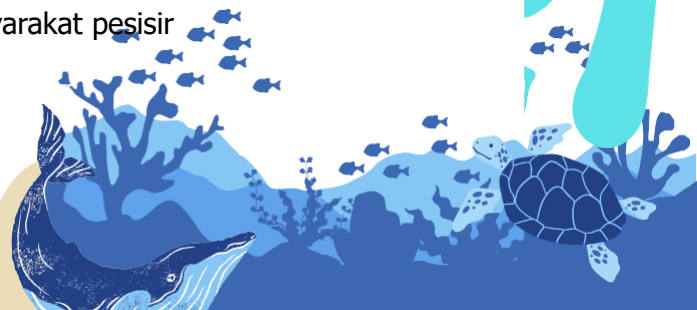
Adapun kelompok sasaran layanan sebagai berikut :

- a. Nelayan yang mata pencaharian bergantung pada penangkapan ikan dilaut maupun di perairan umum
- b. Pembudidaya Ikan merupakan petani ikan yang melakukan kegiatan budidaya di berbagai jenis perairan baik air tawar, payau maupun laut.
- c. Rekomendasi perizinan meliputi : Rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap, Rekomendasi perizinan usaha perikanan budidaya, Rekomendasi pengelolaan pemanfaatan ruang laut, Rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran.
- d. Pengolah dan pemasar hasil perikanan yang merupakan pelaku usaha yang terlibat dalam pengolahan ikan dan produk perikanan serta pihak yang memasarkan produk-produk tersebut

E. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki berbagai mitra kerja dari berbagai kalangan baik dari Lembaga pemerintahan maupun kelompok masyarakat. Berikut beberapa mitra utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat :

- ✓ Asosiasi dari Kelompok Masyarakat
 - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Barat merupakan mitra penting dalam menyalurkan aspirasi nelayan dan memperjuangkan kesejahteraan mereka
 - Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan kelompok-kelompok ini seperti yang terjadi di Desa Wisata Amping Parak Kab. Pesisir Selatan
 - Lembaga Pengembangan Pesisir yang bekerjasama dalam program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir





✓ Lembaga Pemerintahan

- Komando Daerah Angkatan Laut II Padang yang bermitra dalam program ketahanan pangan nasional di sektor kelautan dan perikanan
- Polisi Air, bermitra untuk membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Perairan Laut
- Lantamal II, berkolaborasi dalam upaya pengelolaan dan penanganan tindak pidana di perairan
- Pemerintahan Kabupaten/Kota,, bekerjasama dalam berbagai program pemberdayaan nelayan dan pengelolaan sektor perikanan di wilayah masing-masing

✓ Lembaga Teknis

- Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dan Lampulo dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dalam rapat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi nelayan
- Perguruan Tinggi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bermitra dalam kajian akademis seperti Universitas Bung Hatta dan Universitas Andalas Padang

Mitra-mitra ini menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat membangun sinergi yang kuat dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat

F. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dapat diwujudkan melalui kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Kinerja dinas yang mengelola kelautan dan perikanan dapat didukung oleh BUMD melalui investasi, Kerjasama dan pengembangan usaha di sektor terkait.

BUMD dapat berperan mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa cara :

- ✓ Peningkatan Produksi dan Pengembangan Usaha, BUMD dapat mengembangkan usaha di sector perikanan dan kelautan seperti budidaya





ikan, pengolahan hasil laut atau agrowisata bahari. Hal ini akan berdampak pada peningkatan jumlah dan kualitas produksi perikanan di daerah

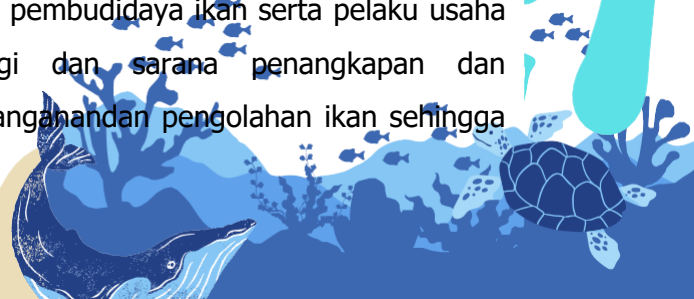
- ✓ Perluasan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan usaha di sektor kelautan dan perikanan BUMD dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran di daerah
- ✓ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberhasilan BUMD dalam menjalankan usahanya akan menghasilkan deviden yang dapat disetorkan ke Kas Daerah sehingga meningkatkan PAD
- ✓ Penyediaan Kebutuhan Masyarakat, BUMD dapat berperan dalam memastikan ketersediaan dan distribusi
- ✓ Penyediaan barang dan jasa publik, BUMD berperan dalam menyediakan barang dan jasa esensial bagi masyarakat seperti air bersih dan juga mengotimalkan potensi sumberdaya alam local yang secara tidak langsung mendukung kinerja perangkat daerah

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan. Fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat meliputi perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan fungsi serta pelaksanaan administrasi di bidang kelautan dan perikanan. Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengambil kebijakan maupun strategi yang digunakan untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas produksi perikanan. Fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan manfaat maupun dampak positif yang dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala yang dihadapi.

Pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan, dan peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan lainnya melalui peningkatan teknologi dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan serta meningkatkan usaha penanganandan pengolahan ikan sehingga





mutu terjamin dan nilai tambah produk perikanan meningkat, menjaga kelestarian ekosistem laut dan pesisir serta pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan/tantangan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu :

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
- Belum optimalnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan - Melambatnya pertumbuhan Sub Perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya	• Belum optimalnya kualitas SDM pembudidaya • Belum optimalnya kualitas benih dan induk unggul • Belum optimalnya kualitas air • Mahalnya pakan • Hama penyakit • Belum optimalnya penerapan CPIB dan CBIB • Belum optimalnya pembudidaya ikan yang terakses informasi, teknologi dan permodalan
	Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap	• Belum optimalnya kualitas SDM nelayan • Belum memadainya sarana dan prasarana Pelabuhan perikanan • Belum optimalnya teknologi penangkapan ikan • Belum optimalnya akses nelayan terhadap fasilitas penangkapan ikan • Belum optimalnya kesadaran nelayan untuk mengurus dokumen administrasi
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	• Belum optimalnya kualitas pengolahan • Belum optimalnya akses pasar produk kelautan dan perikanan • Belum optimalnya kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran • Rendahnya tingkat konsumsi ikan • Belum optimalnya teknologi kemasan produk hasil perikanan • Belum optimalnya pengolah dan pemasar ikan yang terakses informasi teknologi dan permodalan
	Degradasi fungsi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	• Bertambahnya luas kerusakan mangrove dan terumbu karang • Belum optimalnya kesadaran pelaku usaha terhadap perizinan
Belum optimalnya daya saing pengolahan dan	Belum optimalnya mutu produk	• Belum optimalnya produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu





pemasaran produk kelautan dan perikanan	olahan hasil perikanan	• Belum optimalnya ragam produk hasil perikanan
	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	• Rendahnya tingkat konsumsi ikan • Belum optimalnya akses pasar produk kelautan dan perikanan • Belum optimalnya kualitas pengolahan • Belum optimalnya teknologi kemasan produk hasil perikanan
Belum optimalnya pengelolaan ruang laut	Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi	• Ketidakpahaman stakeholder terhadap zona-zona pemanfaatan ruang laut

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia serta memiliki banyak sungai, danau, dan kawasan pesisir yang subur. Dengan potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan bagi petani budidaya tambak.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh nelayan untuk mendapatkan atau membeli kapal tangkap ikan yang memiliki kapasitas tangkap yang lebih besar juga menjadi masalah yang terus dihadapi oleh nelayan tradisional sehingga perkembangan usaha tangkap ikan yang dikelola tidak mengalami perkembangan yang lebih menjanjikan kedepannya. Dengan armada penangkapan ikan skala kecil dengan kapasitas muat yang tidak cukup besar nelayan tradisional tidak dapat menjangkau perairan laut yang lebih potensial dan memiliki sumber tangkapan ikan yang lebih besar. Hal ini menjadi dilema bagi nelayan Sumatera Barat yang umumnya merupakan nelayan tradisional.

Wilayah laut Sumatera Barat yang sangat kaya dengan hasil ikannya juga menjadi incaran bagi nelayan luar untuk melakukan praktek ilegal fishing khususnya di wilayah ZEE luar Mentawai yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak dilakukan Langkah-langkah antisipasi untuk pencegahan. Kurangnya *enterprenuership* khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana pelabuhan sebagai tempat





pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

B. ISU STRATEGIS

Pada tahun 2025 dunia menghadapi serangkaian isu global yang kompleks dan saling terkait, mencerminkan tantangan lintas sektor yang memengaruhi stabilitas ekonomi, lingkungan, geopolitik, dan sosial. Berikut beberapa isu global yang terjadi saat ini :

1. Ketidakpastian Ekonomi Global

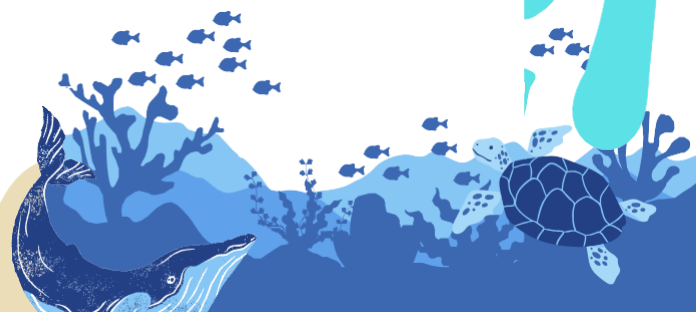
Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 2,4% pada 2025, turun dari 2,9% tahun sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh ketegangan perdagangan internasional, terutama akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat, serta gangguan rantai pasok dan ketidakstabilan keuangan global. Negara-negara berkembang menghadapi dampak paling signifikan, dengan potensi kerugian ekonomi yang besar dan peningkatan kemiskinan ekstrem. Konflik bersenjata di Ukraina, Gaza, dan Sudan terus berlanjut, meningkatkan ketidakstabilan regional dan global. Ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memperburuk situasi, dengan dampak signifikan terhadap keamanan internasional dan kerja sama multilateral.

2. Degradasi Iklim dan Lingkungan

Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan suhu global rata-rata 1,6°C di atas tingkat pra-industri. Kenaikan suhu ini menyebabkan bencana lingkungan seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir. Selain itu, lebih dari 84% ekosistem terumbu karang global mengalami pemutihan akibat peningkatan suhu laut, mengancam keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

3. Perkembangan Kecerdasan Buatan

Kemajuan pesat dalam Artificial Intelligent (AI) membawa peluang dan tantangan. Sementara AI dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, ada kekhawatiran bahwa dominasi perusahaan besar dalam pengembangan teknologi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan ketergantungan pada sistem otomatisasi yang dapat mengurangi keterampilan kognitif manusia.





Sektor kelautan dan perikanan Indonesia menghadapi beragam tantangan strategis pada tahun 2025 yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut isu-isu kelautan dan perikanan Indonesia saat ini :

1. Degradasi Ekosistem Laut dan Pesisir

Lebih dari 50% luas ekosistem mangrove berada dalam kondisi buruk, sementara 40% tutupan lamun terancam hilang. Kerusakan ini disebabkan oleh konversi lahan untuk budidaya, pertambangan, dan pembangunan pesisir, yang mengancam fungsi ekologis penting seperti penyerapan karbon dan perlindungan pesisir.

2. Daya Saing Sektor Perikanan yang Rendah

Meskipun Indonesia merupakan produsen perikanan terbesar kedua di dunia, nilai ekspor perikanan Indonesia tidak masuk dalam 10 besar dunia. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas produk, kurangnya inovasi, dan terbatasnya akses pasar internasional .

3. Tingginya Tingkat Kemiskinan di Daerah Pesisir

Tingkat kemiskinan di daerah pesisir mencapai 11,02%, lebih tinggi dibandingkan dengan 8,67% di daerah non-pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir masih rentan terhadap kemiskinan dan memerlukan intervensi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka .

4. Kontribusi Ekonomi Sektor Kemaritiman yang Terbatas

Kontribusi sektor kemaritiman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hanya sekitar 7,6%. Angka ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi laut Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal .

5. Rendahnya Produktivitas Budidaya Perikanan

Produktivitas tambak udang di Indonesia masih rendah, dengan rata-rata hanya 0,6 ton per hektar. Hal ini disebabkan oleh penggunaan teknologi yang belum efisien dan kurangnya penerapan praktik budidaya yang berkelanjutan .

6. Belum Terintegrasinya Industri Perikanan dari Hulu ke Hilir

Industri kelautan dan perikanan Indonesia belum terintegrasi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Kurangnya konektivitas antara sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran menghambat efisiensi dan daya saing industri ini .

7. Praktik Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan

Penangkapan ikan di Indonesia masih berorientasi pada kontrol input, tanpa adanya pembatasan yang jelas. Kapal perikanan dapat menangkap ikan sebanyak-





banyaknya tanpa memperhatikan keberlanjutan sumber daya, yang dapat mengarah pada over fishing .

8. Dampak Perubahan Iklim terhadap Sumber Daya Laut

Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu air laut, perubahan pola cuaca, dan kenaikan permukaan laut. Diperkirakan 5-30% potensi tangkapan ikan akan menurun pada tahun 2050, dan 80% terumbu karang terancam mengalami pemutihan pada tahun 2030 .

9. Overfishing dan Illegal Fishing

Sekitar 35% stok ikan Indonesia mengalami over-exploitation pada tahun 2022. Selain itu, kerugian akibat praktik illegal fishing diperkirakan mencapai USD 4 miliar per tahun, yang merugikan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya perikanan .

10. Polusi Laut yang Tinggi

Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar sampah plastik laut, dengan perkiraan 0,2-0,55 juta ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Kerugian ekonomi akibat polusi plastik diperkirakan mencapai USD 450 juta per tahun, yang berdampak pada ekosistem laut dan sektor pariwisata .

Sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut beberapa isu sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat saat ini :

1. Terbatasnya Sarana dan Penguasaan Teknologi Perikanan Tangkap

Nelayan di Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan teknologi perikanan tangkap. Sebagian besar alat tangkap yang digunakan masih bersifat tradisional, mengurangi efisiensi dan potensi hasil tangkapan. Penerapan teknologi modern seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan alat tangkap ramah lingkungan belum sepenuhnya diadopsi, membatasi daya saing produk perikanan daerah.

2. Terbatasnya Sarana dan Penguasaan Teknologi Perikanan Budidaya

Sektor budidaya perikanan di Sumatera Barat juga menghadapi tantangan serupa. Keterbatasan fasilitas seperti tambak dan keramba yang memadai, serta kurangnya akses terhadap teknologi budidaya modern, menghambat peningkatan produksi dan kualitas hasil budidaya. Hal ini berdampak pada rendahnya daya saing produk budidaya lokal di pasar domestik maupun internasional.





2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

Infrastruktur pelabuhan perikanan yang ada saat ini masih terbatas dan belum optimal. Fasilitas seperti dermaga, cold storage, dan sistem distribusi yang efisien masih kurang, menyebabkan pemborosan hasil tangkapan dan keterlambatan dalam distribusi ke pasar. Peningkatan kapasitas dan modernisasi pelabuhan perikanan menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran rantai pasok perikanan.

3. Belum Terpenuhinya Kebutuhan Benih dan Calon Induk untuk Budidaya Laut dan Payau

Ketersediaan benih dan calon induk ikan berkualitas masih terbatas, menghambat ekspansi usaha budidaya laut dan payau. Kurangnya fasilitas pembenihan dan program pembenihan unggul mengakibatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang tidak selalu stabil dan berkualitas.

2. Rendahnya Kemampuan Manajerial Usaha dan Kualitas Kelembagaan Usaha

Sebagian besar pelaku usaha perikanan di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam hal manajemen usaha dan kelembagaan. Kurangnya pelatihan dalam aspek manajerial, pemasaran, dan pengelolaan keuangan menyebabkan usaha perikanan sulit berkembang dan bersaing. Penguatan kelembagaan usaha melalui pembentukan kelompok usaha dan koperasi perikanan perlu menjadi prioritas.

3. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Nilai Tambah Melalui Pengolahan Hasil Perikanan

Potensi pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Kurangnya fasilitas pengolahan yang memenuhi standar, serta keterbatasan dalam akses pasar dan pemasaran produk olahan, menghambat potensi ekonomi sektor ini. Peningkatan kapasitas industri pengolahan dan diversifikasi produk olahan perlu didorong untuk meningkatkan daya saing.

4. Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan

Praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan bom ikan dan jaring trawl, masih terjadi di beberapa wilayah. Kegiatan ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya praktik penangkapan yang berkelanjutan sangat diperlukan.





5. Degradasi Ekosistem Laut dan Pesisir

Kerusakan ekosistem laut dan pesisir, seperti terumbu karang dan mangrove, akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim, semakin mengkhawatirkan. Degradasi ini mengurangi kapasitas alam dalam mendukung kehidupan dan kegiatan perikanan. Upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem perlu ditingkatkan melalui program restorasi dan pengelolaan berbasis masyarakat.

6. Pemanfaatan Lahan Usaha Perikanan yang Tidak Sesuai dengan Tata Ruang Wilayah

Masih terdapat pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yang ditetapkan. Hal ini dapat menyebabkan konflik ruang dan kerusakan lingkungan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penataan ruang dan izin usaha perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Menghadapi isu-isu strategis tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang mengedepankan pengembangan ekonomi biru, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan infrastruktur serta kelembagaan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Untuk pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan pembangunan pangan dan ekonomi tidak boleh mengabaikan kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, dengan menekankan konsep *green economy* dan *blue economy*. Indikator kinerja yang digunakan antara lain adalah Indeks Ekonomi Hijau, yang mengukur sejauh mana praktik pembangunan ramah lingkungan diimplementasikan. Indeks Ekonomi Biru, untuk melihat keberlanjutan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, yang menilai efektivitas pelestarian sumber daya hayati di darat dan laut. Proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer, sebagai cerminan komitmen mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan pencapaian sasaran ini, diharapkan Sumatera Barat mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan

Penentuan isu strategis adalah dengan mempertimbangkan akar permasalahan yang muncul dari perangkat daerah, Renstra Kementerian dan lembaga, RKPD Provinsi Sumatera





Barat, RTRW dan KLHS. Isu strategis RPD Provinsi Sumatera Barat yaitu percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah.

Keterkaitan antara permasalahan dengan isu-isu strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan budidaya	Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan budidaya
Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan tangkap	Meningkatnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap
Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	Meningkatnya pertumbuhan produk olahan yang bermutu
Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan	
Pemanfaatan ruang laut tidak sesuai zonasi	Meningkatnya pemanfaatan ruang laut

Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : **"Bersama Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"** . Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Haks Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri





6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-2 yakni: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KKP.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"** .

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KKP sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2025. KKP memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden. Maka Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Manusia melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP



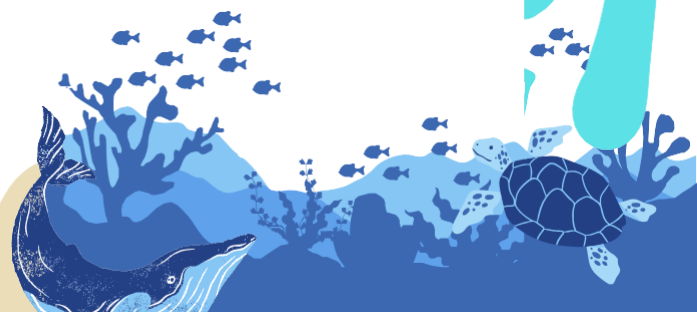


Sasaran strategis pembangunan KKP adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KKP pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KKP selama tahun 2025-2029. Dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh KKP dalam rangka pencapaian sasaran strategisnya ada 6 sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan
3. Meningkatnya nilai tambah dan mutu produk kelautan dan perikanan
4. Meningkatnya nilai tukar pelaku utama kelautan dan perikanan
5. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. KLHS berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat penerapan kebijakan, rencana, dan program (KRP) pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD. Dengan penyusunan KLHS, pemerintah daerah dapat mengambil langkah preventif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, KLHS membantu meminimalisir dampak negatif pembangunan yang dapat mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini penting mengingat keberlanjutan lingkungan merupakan kunci bagi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.





TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 3

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2025-2030 merupakan gambaran penjabaran Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan jangka daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka ditetapkan Visi Sumatera Barat yakni sebagai adalah :

"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup





dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)".

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.





3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Renstra Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pencapaian tujuan dari Renstra Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu atau lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi dan isu-isu analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan yang merupakan penjabaran dari tujuan. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yaitu : **"Meningkatnya Produktifitas dan Cadangan Pangan Sektor Perikanan Yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan"**

Berdasarkan tujuan diatas maka Indikator Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Produktifitas PDRB Usaha Perikanan
2. Indeks Ekonomi Biru
3. Indeks Ekonomi Hijau

Sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah

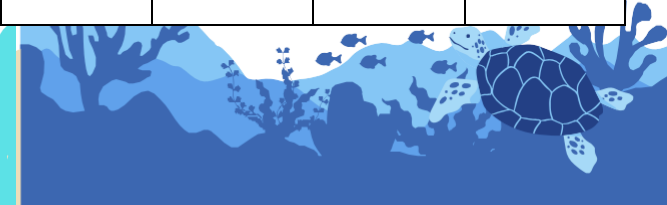
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan





Tabel 3.1.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2025	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE...				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan sektor perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.	Produktivitas PDRB usaha perikanan			Rupiah	14.027,87	14.308,42	14.594,59	14.866,48	15.184,21	15.487,90
		Indek Ekonomi Biru			Nilai	25.19	27.43	29.68	31.92	34.17	36.41
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	238,100.00	240,957.20	244,089.64	247,506.89	251,219.49	255,239.00
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.11	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
		Indeks Ekonomi Hijau			Nilai	68.69	69.51	70.33	71.15	71.97	72.79
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	265,652.78	267,569.25	270,077.57	273,198.17	276,650.64	280,498.17
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0.51	0.72	0.94	1.16	1.26	1.39
			Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	%	2.05	2.08	2.90	4.26	5.59	6.81
			Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	5.00	5.33	5.60	6.00	6.33	7.00





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

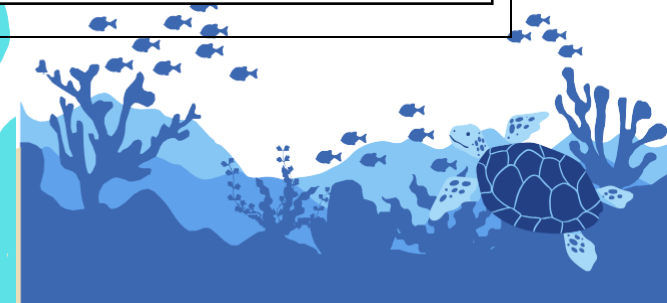
		Nilai akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (81,47)	A (81,47)	A (81,49)	A (81,51)	A (81,53)	A (81,55)
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	B (84)	B (85,50)	B (87,30)	B (88,10)	B (88,30)	A (89,00)





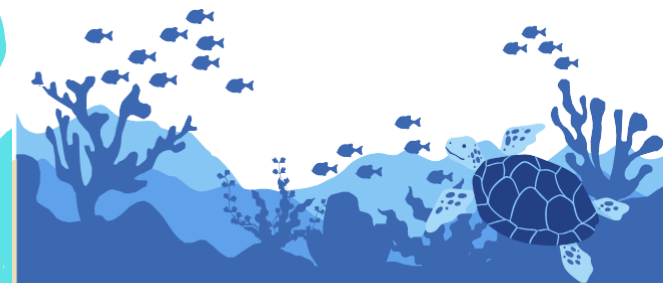
Tabel 3.1.2
Formulasi Penghitungan Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran

No	INDIKATOR	Definisi	Rumusan/Formula Perhitungan
1	2	3	4
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b), yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator kesejahteraan nelayan yang menggambarkan kemampuan tukar hasil produksi perikanan (pendapatan) terhadap biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi maupun operasional usaha.	$NTN = \frac{I_t}{I_b} \times 100$
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (I_{tPi}) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (I_{bPi}), yang dinyatakan dengan persentase. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan indikator kesejahteraan rumah tangga pembudidaya perikanan. Sama seperti NTN (Nilai Tukar Nelayan), NTPi mengukur kemampuan tukar pendapatan hasil usaha budidaya terhadap biaya konsumsi dan biaya produksi.	$NTPi = \frac{I_{tPi}}{I_{bPi}} \times 100$
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } (n-1))} \times 100\%$





4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan volume produksi perikanan budidaya dalam suatu periode (biasanya tahunan) dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } n - \text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } (n-1))} \times 100\%$
5	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan volume hasil produk perikanan yang diolah (baik skala industri maupun skala rumah tangga) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } n - \text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } (n-1))} \times 100\%$
6	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	Jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). Perhitungan Angka Konsumsi Ikan tahun 2025 merupakan konsumsi ikan di dalam rumah tangga, dengan dasar target diambil dari angka Susenas tahun 2024.	$\frac{\text{Total konsumsi ikan (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$ Atau jika tersedia dalam ton $\frac{\text{Total konsumsi ikan (ton)} \times 1.000}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$





7	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Ukuran persentase perubahan (kenaikan) dari tahun ke tahun terhadap kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis ekosistem, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, atau tata kelola terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	$\frac{(\text{Nilai evika} + \text{Persentase peningkatan pengelolaan} + \text{Persentase ketaatan pelaku usaha})}{3}$
8	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Tingkat pencapaian akuntabilitas atas hasil (outcome) pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh OPD, diukur berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta kemampuannya untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan penilaian terhadap 4 komponen, yaitu : 1. Perencanaan Kinerja, bobot 30%. 2. Pengukuran Kinerja, bobot 30%. 3. Pelaporan Kinerja, bobot 15%. 4. Evaluasi Internal, bobot 25%.	$\text{Nilai Perencanaan Kinerja} + \text{Pengukuran Kinerja} + \text{Pelaporan Kinerja} + \text{Evaluasi Internal}$
9	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi adalah ukuran persepsi dan penilaian pegawai atau unit kerja pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan pendukung dalam organisasi, seperti layanan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, IT, logistik, dan lainnya. Pengolahan Data survey dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem data base dan manual.	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$





Selain Produktivitas PDRB Usaha Perikanan indikator tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Indeks Ekonomi Biru dan Indeks Ekonomi Hijau. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) mengatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi, melestarikan dan mengelola sumberdaya laut dengan bijaksana dengan menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir menggalakan Program Ekonomi Biru (Blue Economy) dengan melahirkan 5 kebijakan dimana mempunyai saling keterkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Ekonomi Biru berfokus pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan dan pengelolaan ekosistem maritim. 5 Kebijakan Ekonomi Biru antara lain :

1. Memperluas kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan pengendalian Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan

Sedangkan Ekonomi Hijau (Green Economy) berfokus pada pertumbuhan yang rendah emisi karbon dan efisien sumberdaya secara umum dimana tujuan utamanya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan ramah lingkungan dengan fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca, konservasi sumberdaya dan peningkatan kualitas hidup.

Ekonomi biru dan Ekonomi Hijau bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hanya saja dengan cakupan fokus yang berbeda. Indikator tujuan jangka menengah ini tertuang kepada sasaran yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 tahun kedepan yang dapat dilihat pada tabel 3.1.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan 2025-2029

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan cara-cara yang ditempuh dengan memilih program-program prioritas sesuai tujuan dan sasaran Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,





dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Hal ini berarti bahwa strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian dalam 5 tahun.

Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara-cara dan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan strategis secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat dan daya saing melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah akan diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disusun secara komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan sasaran Renstra Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, melalui arah kebijakan dan strategi dapat dijelaskan secara sistematis dan tetap menjadi rujukan dalam setiap jalannya kegiatan pemerintahan selama 5 (lima) tahun.

Perumusan strategi didasarkan pada kriteria : 1) Strategi yang realistis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 2) Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan; 3) Mengevaluasi berbagai faktor internal (kekuatan dan kelemahan), eksternal (peluang dan tantangan) dalam upaya merumuskan strategi yang tepat.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada





pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya produktifitas dan cadangan pangan sektor perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Sumatera Barat
			Meningkatkan pendapatan
		Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan	Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan di Sumatera Barat
		Pembangunan Kawasan OSF (One Stop Illegal Fishing)	Peningkatan daya saing Kawasan OSF
			Pemberdayaan nelayan tangkap
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Sumatera Barat
			Meningkatkan pendapatan
		Meningkatkan produksi benih ikan air payau dan laut	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan di Sumatera Barat
		Meningkatkan pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan	Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terkases pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan
	Meningkatnya daya saing produk kelautan dan perikanan	Meningkatkan produksi olahan	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
		Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengembangan produk hasil perikanan	Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan	Meningkatnya luasan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan	Mengendalikan sumberdaya kelautan dan perikanan





			Penertiban dan perlindungan kawasan laut dan pesisir
			Penyelenggaraan SDA secara berkelanjutan
		Meningkatkan pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna	Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui kemitraan strategis dalam pengembangan dan penyebaran teknologi kelautan dan perikanan
	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN	Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan
	Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

3.3 MANAJEMEN RESIKO

Analisa risiko Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan (Risk Register) mempersyaratkan :

- Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
- Mengintegrasikan dan menerapkan tindakan tersebut dalam proses-proses sistem manajemen mutu, serta mengevaluasi keefektifannya

Pengelolaan risiko dilakukan sesuai kondisi dan situasi yang ada. Tindakan-tindakan untuk menangani risiko dan peluang harus proporsional dengan dampak potensial terhadap kesesuaian dengan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pilihan untuk mengatasi risiko dapat termasuk menghindari risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber risiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, atau berbagi risiko, atau mempertimbangkan risiko dengan keputusan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi risiko & peluang dari kegiatan, produk, jasa dan fasilitas. Organisasi harus memastikan bahwa risiko & peluang penting dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan mutu dan memelihara informasi ini relevan dengan perubahan yang diperlukan. Dalam mengidentifikasi risiko & peluang, organisasi mempertimbangkannya dalam kondisi operasi. Kondisi dari dampak risiko & peluang dapat dikategorikan High, Medium dan Low. Identifikasi risiko dan peluang dilakukan terhadap semua proses, aktivitas dan fasilitas,





dimana yang memiliki bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Analisa risiko mutu dapat dilihat pada SOP Manajemen Risiko.

Tuntutan akan adanya suatu pengendalian atas risiko kegiatan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Berbagai perangkat telah disiapkan oleh pemerintah mulai dari Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Manajemen risiko di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat adalah penerapan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini sejalan dengan pedoman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan bertujuan meningkatkan efektivitas program melalui identifikasi risiko, pengendalian, serta dukungan sumber daya, anggaran, dan metode kerja yang memadai

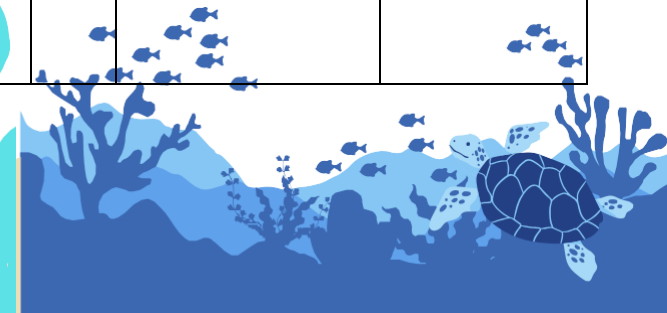
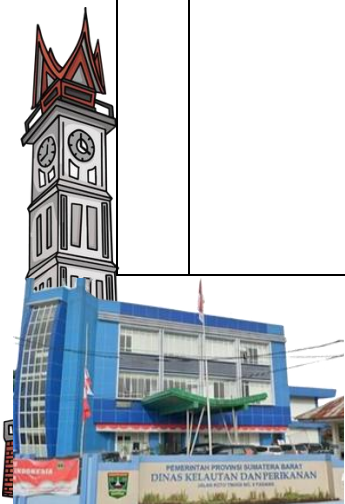




Tabel 3.3.1

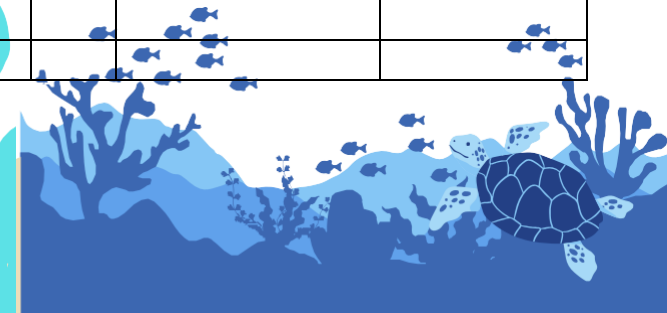
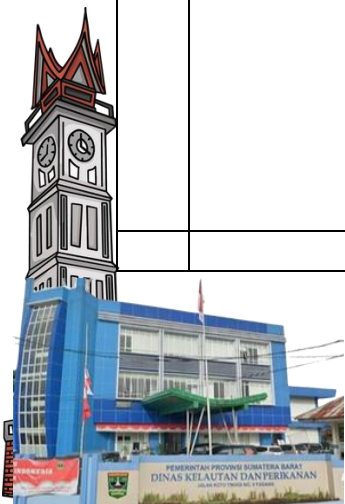
**Manajemen Resiko Terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya								
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap -Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Kondisi cuaca ekstrem yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.	Kepala Dinas	Perubahan Iklim	Eksternal	UC	Produksi Perikanan Tangkap Berkurang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			2. Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran dan modal nelayan	Internal	C	Produksi Perikanan Tangkap Berkurang, hasil tangkapan menurun, waktu operasional lebih lama, biaya operasional meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya contohnya lampara dasar.	Kepala Dinas	-faktor ekonomi dan keterbatasan modal, -pengetahuan dan kesadaran penangkapan ramah lingkungan yang berkelanjutan kurang, -pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah	Eksternal	UC	-Terjadi Overfishing, -populasi ikan menurun, -merusak habitat dan ekosistem perairan, -hasil tangkapan menurun	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat





			4. Proses perizinan yang masih tidak lancar	Kepala Dinas	-Perizinan terlalu panjang melibatkan banyak tahap dan instansi - Keterbatasan sarana prasarana pelabuhan	Eksternal Internal	UC	-Biaya tambahan muncul akibat denda dan razia, -pendapatan nelayan menurun akibat kapal/alat tangkap tidak bisa beroperasi -Tingginya kasus ilegal fishing - Pelaksanaan fungsi pelayanan pelabuhan kurang optimal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	-Jumlah produksi perikanan budidaya -Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.	Kepala Dinas	-Harga Bahan Baku meningkat (tepung ikan, kedelai, jagung) -Ketergantungan pembudidaya pada pakan pabrik	Eksternal	UC	-Pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya menurun -Produksi budidaya ikan menurun sehingga budidaya tidak berkelanjutan - Fluktuasi Harga Pakan yang cenderung mahal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air	Kepala Dinas	-Kurangnya kesadaran terhadap pengelolaan kualitas air -keterbatasan sarana prasarana pengolahan air limbah Pembudidaya	Eksternal	UC	-sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan. -Penurunan Produksi pembudidaya ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			3. Ketersediaan induk unggul terbatas.	Kepala Dinas	-Penggunaan induk yang telah afkir oleh pembudidaya - pemuliaan induk unggul belum optimal - Keterbatasan kesadaran pembudidaya penggunaan induk unggul berkualitas	Eksternal	UC	- Kualitas benih dan tingkat Kelangsungan hidup benih menurun -Produksi budidaya menurun	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat





3	Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	-Produk olahan Perikanan tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi	Kepala Dinas	-Kualitas ikan / bahan baku yang rendah dan tidak segar -Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - Keterbatasan anggaran sertifikasi produk	Eksternal dan Internal	UC	-Rendahnya daya saing produk perikanan -Harga jual produk rendah karena dianggap kualitas kurang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			-Rendahnya penerapan teknologi pengolahan hasil Perikanan yang moderen	Kepala Dinas	-Keterbatasan modal pengolah dan akses teknologi terbatas	Eksternal	UC	-Rendahnya nilai tambah produk -Produk hasil perikanan sulit bersaing di pasar ekspor dan dengan produk impor -Produk olahan sulit memenuhi standar mutu, higienitas, dan keamanan pangan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			-Persaingan Produk hasil olahan ikan yang ketat	Kepala Dinas	- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengolahan Produk Perikanan	Eksternal	UC	-Menurunkan harga untuk menarik konsumen sehingga keuntungan UMKM semakin menipis	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			- Akses pasar terbatas karena promosi dan branding Produk Perikanan masih lemah	Kepala Dinas	-pelaku usaha perikanan/ UMKM masih berfokus pada produksi tanpa menyadari bahwa identitas merek dan promosi memengaruhi minat konsumen.	Eksternal	UC	-produk perikanan lokal sulit dikenal luas oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. -pasar produk olahan dikuasai oleh kompetitor	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat





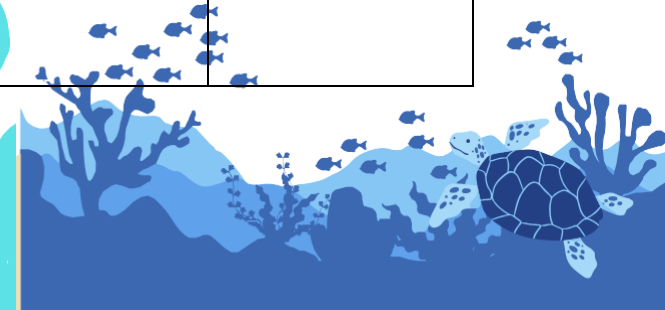
4	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Degradasi ekosistem, kerusakan mangrove, terumbu karang, pencemaran laut seperti sampah laut	Kepala Dinas	-aktivitas pemanfaatan laut dan pesisir yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan mangrove, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pembuangan sampah ke laut,	Eksternal	UC	Kerusakan terumbu karang, abrasi pantai, sampah di wilayah pesisir dan di laut -Terjadinya bleaching/pemutihan terumbu karang - stok/populasi ikan dilaut berkurang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			Pemanfaatan ruang laut ilegal	Kepala Dinas	-kurangnya kesadaran tertib perizinan pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha - Proses perizinan pemanfaatan ruang yang lama	Eksternal dan Internal	UC	-Masih banyak pelaku usaha seperti resort yang belum tertib administrasi perizinan - eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			Keterbatasan pengawasan pengelolaan lingkungan perairan	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran patroli pengawasan	Eksternal dan Internal	C	-illegal fishing dan overfishing	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat





Tabel 3.3.2 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Resiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029

No	Resiko	Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.	Mencari Mata Pencarian Alternatif saat cuaca ekstrem	Mengoptimalkan bantuan mata pencaharian alternatif seperti bantuan perikanan budidaya dan pengolahan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
2	Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.	Melakukan koordinasi ke Dinas Kab/kota dan monitoring evaluasi kepada nelayan Kab/Kota	Pemberian bantuan sarana prasarana yang layak	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
3	Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya contohnya lampara dasar.	Melakukan rapat pengawasan dan koordinasi ke Dinas Kab/kota	Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di bantu dengan bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
4	Proses perizinan yang masih tidak lancar	Melakukan gerai perizinan terpadu	koordinasi DPMPSTP, KSOP, dan Dinas Kab/kota	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
5	Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.	Memberikan bantuan berupa benih dan pakan ikan berkualitas	Mencari alternatif bahan baku dan pembuatan pakan ikan mandiri	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
6	Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air	Monitoring Kesehatan ikan dan hama penyakit ikan ke Kab/kota	Melakukan koordinasi ke Kab/Kota dan melakukan pengambilan sampel penyakit ikan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
7	Ketersediaan induk unggul terbatas.	Menyediakan Bantuan induk unggul dan pakan ikan	Koordinasi dengan Kab/kota, menyediakan bantuan induk ikan unggul dan pakan , berkoordinasi dengan KKP untuk mendorong sertifikasi Pembudidaya (CPIB dan CBIB)	Kepala Dinas	TW III dan TW IV





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

8	Produk olahan Perikanan tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi	Pengujian dan pengawasan mutu ke pasar dan unit pengolah ikan	Pengujian, monitoring dan pengawasan mutu ke pasar dan unit pengolah ikan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
9	Rendahnya penerapan teknologi pengolahan hasil Perikanan yang moderen	Pemberian bantuan alat pengolahan	Pemberian bantuan alat pengolahan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
10	Persaingan Produk hasil olahan ikan yang ketat	Pembinaan ke unit pengolah ikan agar kualitas ikan terjaga, diversifikasi dan inovasi produk	Pembinaan ke unit pengolah ikan agar kualitas ikan terjaga, diversifikasi dan inovasi produk	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
11	Akses pasar terbatas karena promosi dan branding Produk Perikanan masih lemah	mendorong koordinasi kredit usaha pengolahan ikan, mengikuti kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Makan Ikan (Forikan) dan Gerakan Masyarakat makan ikan (Gemarikan)	Mengikuti kontes, bazar dan mengikuti kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Makan Ikan (Forikan) dan Gerakan Masyarakat makan ikan (Gemarikan)	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
12	Degradasi ekosistem, kerusakan mangrove, terumbu karang, pencemaran laut seperti sampah laut	Penanaman Mangrove dan cemara laut, melakukan Transplantasi terumbu karang, mengikuti kegiatan Bersih pantai, restocking perairan umum	Melakukan Restocking ke Perairan Umum	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
13	Pemanfaatan ruang laut ilegal	Pegawasan Perizinan PKKPR, dan Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota,	Pengawasan Perizinan PKKPR, Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota,	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
14	Keterbatasan pengawasan pengelolaan lingkungan perairan	Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota, patroli pengawasan	Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota, Patroli pengawasan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV

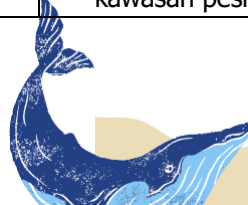


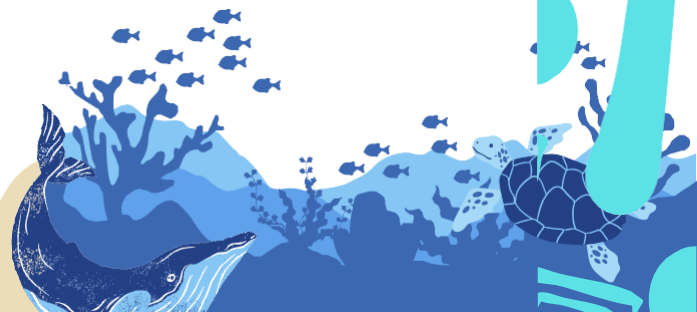


3.4. PENAHAPAN RENCANA STRATEGI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas tahunan dengan penahapan sebagai tabel 3.4.1 berikut :

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1. Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan akuatik 2. Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah 3. Sertifikasi mutu, dan keamanan pangan 4. Implementasi perikanan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. 5. Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. 6. Peningkatan daya saing kawasan OSF 7. Pemberdayaan nelayan tangkap 8. Penertiban dan perlindungan laut dan kawasan pesisir	1. Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan akuatik 2. Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah 3. Sertifikasi mutu, dan keamanan pangan 4. Implementasi perikanan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. 5. Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. 6. Peningkatan daya saing kawasan OSF 7. Pemberdayaan nelayan tangkap 8. Penertiban dan perlindungan laut dan kawasan pesisir	1. Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan akuatik 2. Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah 3. Sertifikasi mutu, dan keamanan pangan 4. Implementasi perikanan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. 5. Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. 6. Peningkatan daya saing kawasan OSF 7. Pemberdayaan nelayan tangkap 8. Penertiban dan perlindungan laut dan kawasan pesisir	1. Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan akuatik 2. Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah 3. Sertifikasi mutu, dan keamanan pangan 4. Implementasi perikanan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. 5. Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. 6. Peningkatan daya saing kawasan OSF 7. Pemberdayaan nelayan tangkap 8. Penertiban dan perlindungan laut dan kawasan pesisir	1. Penguatan kapasitas produksi dan produktivitas pangan akuatik 2. Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah 3. Sertifikasi mutu, dan keamanan pangan 4. Implementasi perikanan berbasis ekosistem dan mitigasi perubahan iklim. 5. Peningkatan ekspor komoditas unggulan dan produk pangan olahan. 6. Peningkatan daya saing kawasan OSF 7. Pemberdayaan nelayan tangkap 8. Penertiban dan perlindungan laut dan kawasan pesisir







PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

BAB 4

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam Bab sebelumnya, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Secara rinci rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan di Sumatera Barat serta mensukseskan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kelautan dan Perikanan

Program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 –2029, sesuai dengan Misi 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu **"Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan"** maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 6 program dalam pencapaian kinerja yakni sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Sumatera Barat mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan namun pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan masih ada yang tidak sesuai dengan kaidah keberlanjutan dengan adanya penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Oleh karena itu program ini ditujukan untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta mengendalikan pemanfaatan





sumberdaya kelautan dan perikanan terutama di pesisir sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan
- b. Pembinaan pengelolaan sumberdaya kelautan, perikanan dan pesisir

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan tangkap dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Pelatihan perikanan tangkap nelayan
- b. Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (Pelabuhan perikanan, kapal, alat penangkapan ikan)
- c. Pendampingan kelembagaan nelayan
- d. Pendampingan standarisasi, sertifikasi dan perizinan perikanan tangkap
- e. Pembinaan pengelolaan Pelabuhan (Sosialisasi, Bintek, Fasilitas jasa Pelabuhan
- f. Pelayanan Pelabuhan (penerbitan surat persetujuan berlayar, fasilitasi perijinan kapal, tambat labuh)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan budidaya dalam menjamin ketersediaan pangan daerah dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Disamping itu juga harus menyiapkan produk perikanan yang dijual keluar daerah.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Pelatihan budidaya perikanan
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan
- c. Pendampingan kelembagaan perikanan budidaya
- d. Pendampingan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya

Selain sapras dan kelembagaan kelompok budidaya dibutuhkan ketersediaan benih unggul perikanan budidaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi





dan kualitas benih perikanan budidaya dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu. Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Pengembangan sarana prasarana perbenihan perikanan budidaya
- b. Pengendalian hama penyakit
- c. Standarisasi dan sertifikasi perbenihan perikanan budidaya

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Keberadaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan dan lingkungannya serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI dan Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen registrasi kapal dan perizinan kapal) dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan

Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan overfishing, overcapacity, ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarginalkannya nelayan, merupakan dampak nyata dari kegiatan illegal fishing dan destructive fishing.

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Pengawasan terpadu di laut
- b. Pengawasan terpadu di perairan umum daratan
- c. Pengawasan terpadu lokasi budidaya dan pengolahan hasil perikanan

5. Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk olahan Ikan dalam jumlah yang memadai dan sesuai dengan standar mutu untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumatera Barat





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Proses utama pelaksanaan program ini mencakup :

- a. Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan
- b. Kampanye/sosialisasi memasyarakatkan makan ikan
- c. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- d. Pendampingan kelembagaan pengolah dan pemasar
- e. Pengujian mutu hasil perikanan
- f. Pendampingan standarisasi dan sertifikasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 adalah sebagai berikut :





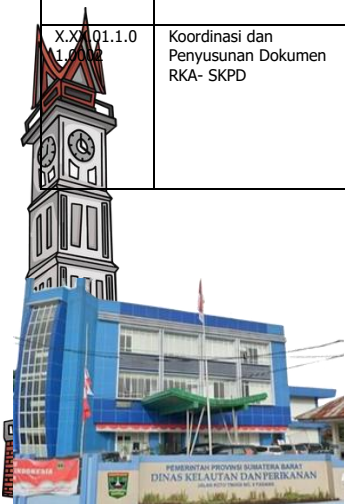
RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TABEL 4.1

**REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF 2025-2029 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					30,958,940,740		31,649,491,067	100	32,124,233,433	100	32,606,096,935	100	33,095,188,389	100	33,591,616,215
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan Pemerintahan daerah provinsi	Persen	100	30,958,940,740	100	31,649,491,067	100	32,124,233,433	100	32,606,096,935	100	33,095,188,389	100	33,591,616,215
X.XX.01.1. 01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000
X.XX.01.1.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000
X.XX.01.1.0 1.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000

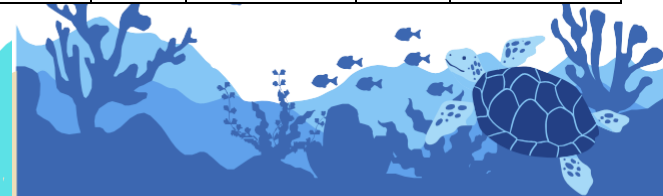




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.0 1.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
X.XX.01.1.0 1.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
X.XX.01.1.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000	6	3,000,000
X.XX.01.1.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
X.XX.01.1.0 1.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	0	0	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000
X.XX.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				22,210,490,043		21,135,881,067		21,135,881,067		21,230,881,067		21,230,881,067		21,280,881,067
X.XX.01.1.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	156	21,535,100,043	224	20,330,881,067	244	20,330,881,067	269	20,330,881,067	294	20,330,881,067	319	20,330,881,067

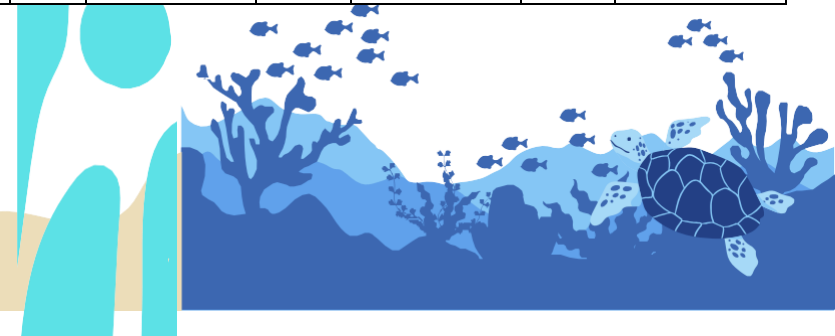




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	675,390,000	1	800,000,000	1	800,000,000	1	850,000,000	1	850,000,000	1	900,000,000
X.XX.01.1.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				174,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000		15,000,000
X.XX.01.1.0 3.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Paket	2	174,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000
X.XX.01.1.0 3.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
X.XX.01.1.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
X.XX.01.1.0 3.0008	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Stel	0	0	230	0	230	0	250	0	250	0	250	0





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.0 5.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
X.XX.01.1.0 5.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	6	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2,240,047,237		2,707,277,500		2,374,817,366		2,817,439,368		2,930,875,172		2,929,361,783
X.XX.01.1.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	6	39,998,000	7	11,000,000	7	11,000,000	7	17,500,000	7	17,500,000	7	17,500,000
	- Prov			1	30,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
	- PPW I			1	2,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000
	- PPW II			0	0	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
	- PPW III			1	4,748,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
	- BPBALP			1	1,250,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
	- KPSPDKP			1	1,250,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
	- PPMHP			1	750,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
X.XX.01.1.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	0	0	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
X.XX.01.1.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Paket	0	0	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000
X.XX.01.1.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	5	138,451,944	7	17,000,000	7	17,000,000	7	17,000,000	7	17,000,000	7	17,000,000
	- Prov			1	118,208,100	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- PPW I			1	2,511,925	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPW II			0	10,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	- PPW III			1	2,169,200	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- BPBALP			1	2,950,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000

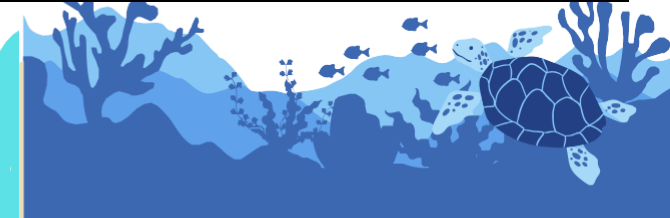




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

	- KPSDKP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPMHP			1	2,612,719	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
X.XX.01.1.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	1	38,675,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000	1	28,000,000
	- Prov			1	7,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
	- PPW I			1	20,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
	- PPW II			1	8,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
	- PPW III			1	300,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
	- BPBALP			1	1,125,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
	- KPSDKP			1	1,500,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
	- PPMHP			1	250,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
X.XX.01.1.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
X.XX.01.1.0 6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000	1	30,000,000
X.XX.01.1.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	1	2,022,922,293	1	2,601,277,500	1	2,268,817,366	1	2,704,939,368	1	2,813,375,172	1	2,806,861,783
	- Prov			1	1,577,651,619	1	1,800,000,000	1	1,573,817,366	1	1,294,939,368	1	1,218,375,172	1	1,171,861,783
	- PPW I			1	65,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	125,000,000	1	135,000,000	1	150,000,000
	- PPW II			1	69,459,500	1	100,000,000	1	100,000,000	1	250,000,000	1	345,000,000	1	350,000,000
	- PPW III			1	78,393,200	1	178,000,000	1	150,000,000	1	200,000,000	1	215,000,000	1	220,000,000
	- BPBALP			1	65,145,500	1	125,000,000	1	100,000,000	1	250,000,000	1	260,000,000	1	265,000,000
	- KPSDKP			1	99,772,474	1	200,000,000	1	150,000,000	1	450,000,000	1	490,000,000	1	500,000,000
	- PPMHP			1	67,500,000	1	98,277,500	1	95,000,000	1	135,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				435,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000		60,000,000





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.0 7.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	1	435,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X.XX.01.1.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket		0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	- Prov			0	0	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000
	- PPW I			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPW II			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPW III			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- BPBALP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- KPSDKP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPMHP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
X.XX.01.1.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket		0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
	- Prov			0	0	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000
	- PPW I			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPW II			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPW III			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- BPBALP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- KPSDKP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
	- PPMHP			0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000
X.XX.01.1.0 7.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
X.XX.01.1.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000

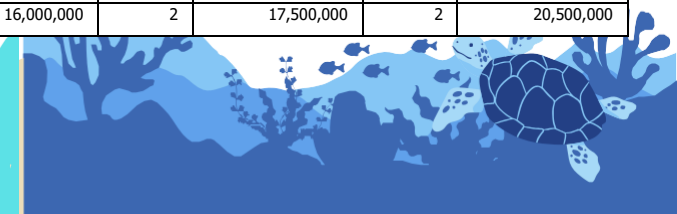
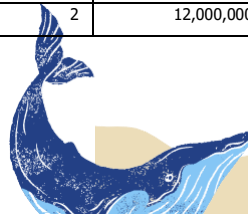
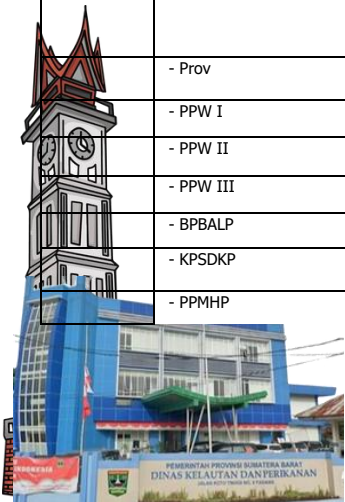




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5,591,528,460		6,015,472,500		6,408,285,000		6,745,601,500		7,117,639,650		7,470,251,615
X.XX.01.1.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2,250,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000
X.XX.01.1.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	7	2,126,244,090	7	2,312,472,500	7	2,455,285,000	7	2,542,601,500	7	2,614,639,650	7	2,667,251,615
	- Prov			1	313,692,000	1	400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
	- PPW I			1	300,150,000	1	320,150,000	1	352,165,000	1	387,381,500	1	426,119,650	1	468,731,615
	- PPW II			1	730,000,000	1	666,600,000	1	666,600,000	1	706,600,000	1	726,600,000	1	726,600,000
	- PPW III			1	150,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000
	- BPBALP			1	360,000,000	1	360,000,000	1	365,000,000	1	370,000,000	1	375,000,000	1	380,000,000
	- KPSDKP			1	199,750,000	1	180,000,000	1	185,000,000	1	190,000,000	1	195,000,000	1	200,000,000
	- PPMHP			1	72,652,090	1	85,722,500	1	86,520,000	1	88,620,000	1	91,920,000	1	91,920,000
X.XX.01.1.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	63	3,463,034,370	63	3,700,000,000	63	3,950,000,000	63	4,200,000,000	63	4,500,000,000	63	4,800,000,000
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307,875,000		1,690,860,000		2,105,250,000		1,712,175,000		1,715,792,500		1,811,121,750
X.XX.01.1.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	24	203,225,000	24	353,860,000	24	398,250,000	24	412,175,000	24	415,792,500	24	431,121,750
	- Prov			13	122,250,000	13	150,000,000	13	170,000,000	13	175,000,000	13	175,000,000	13	185,000,000
	- PPW I			1	14,475,000	1	17,500,000	1	19,250,000	1	21,175,000	1	23,292,500	1	25,621,750
	- PPW II			2	10,975,000	2	10,975,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000
	- PPW III			1	2,300,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
	- BPBALP			3	17,325,000	3	43,385,000	3	55,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000	3	60,000,000
	- KPSDKP			2	29,100,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000	2	110,000,000
	- PPMHP			2	6,800,000	2	12,000,000	2	14,000,000	2	16,000,000	2	17,500,000	2	20,500,000

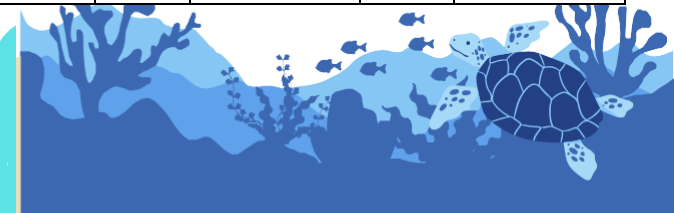
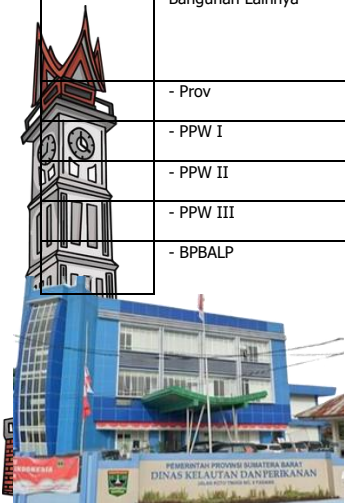




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

X.XX.01.1.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	48,940,000	33	57,000,000	33	57,000,000	33	80,000,000	33	80,000,000	33	80,000,000
	- Prov			18	12,860,000	18	20,000,000	18	20,000,000	18	25,000,000	18	25,000,000	18	25,000,000
	- PPW I			0	0	1	8,500,000	1	8,500,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
	- PPW II			3	25,000,000	3	8,500,000	3	8,500,000	3	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000
	- PPW III			1	6,080,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- BPBALP			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
	- KPSPDKP			8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000	8	10,000,000
	- PPMHP			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000
X.XX.01.1.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	35,900,000	7	1,200,000,000	7	1,550,000,000	7	1,100,000,000	7	1,120,000,000	7	1,200,000,000
	- Prov			1	900,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	470,000,000	1	400,000,000
	- PPW I			0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000
	- PPW II			1	30,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000
	- PPW III			0	0	1	100,000,000	1	250,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
	- BPBALP			0	0	1	100,000,000	1	200,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000
	- KPSPDKP			0	0	1	100,000,000	1	200,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	200,000,000
	- PPMHP			1	5,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	100,000,000
X.XX.01.1.0 9.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	19,810,000	7	80,000,000	7	100,000,000	7	120,000,000	7	100,000,000	7	100,000,000
	- Prov			1	9,810,000	1	50,000,000	1	70,000,000	1	90,000,000	1	70,000,000	1	70,000,000
	- PPW I			1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- PPW II			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- PPW III			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- BPBALP			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

	- KPSPDKP			0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
	- PPMHP			1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					13,708,835,828		11,014,398,728		10,387,873,031		9,745,907,194		9,699,106,881		9,593,000,235
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	3,7	546,719,757	3,9	447,239,502	4,1	422,253,138	4,3	396,651,010	4,5	394,784,575	4,7	390,552,954
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi				446,719,757	-	367,239,502	-	347,253,138	-	341,651,010	-	339,784,575	-	335,552,954
3.25.02.1.0 1.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Ha	332.513,26	446,719,757	325.974,55	317,239,502	325.974,55	290,694,960	325.974,55	281,651,010	325.974,55	279,784,575	325.974,55	275,552,954
3.25.02.1.0 1.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	0	0	0.5	25,000,000	0.5	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000
3.25.02.1.0 1.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	0	50	25,000,000	100	26,558,178	100	30,000,000	0	30,000,000	100	30,000,000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				100,000,000		80,000,000		75,000,000		55,000,000		55,000,000		55,000,000
3.25.02.1.0 3.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	0	100,000,000	250	50,000,000	250	45,000,000	350	25,000,000	350	25,000,000	350	25,000,000
3.25.02.1.0 3.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	0	0	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000

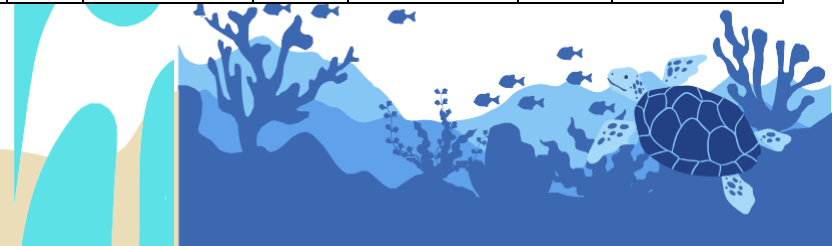




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	238,100	6,716,259,536	240.957,20	5,294,179,661	244.089,64	4,987,230,994	247.506,89	4,672,717,864	251.219,49	4,649,789,365	255.239	4,597,805,394
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil				5,092,400,000		4,000,000,000		3,737,230,994		3,422,717,864		3,399,789,365		3,397,805,394
3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	379	5,092,400,000	260	4,000,000,000	210	3,737,230,994	160	3,422,717,864	110	3,399,789,365	110	3,397,805,394
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				348,001,500		344,179,661		300,000,000		300,000,000		300,000,000		250,000,000
3.25.03.1.02.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Unit	200	348,001,500	100	344,179,661	100	300,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	250,000,000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT				-		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000		200,000,000
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase	0	0	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000	100	200,000,000

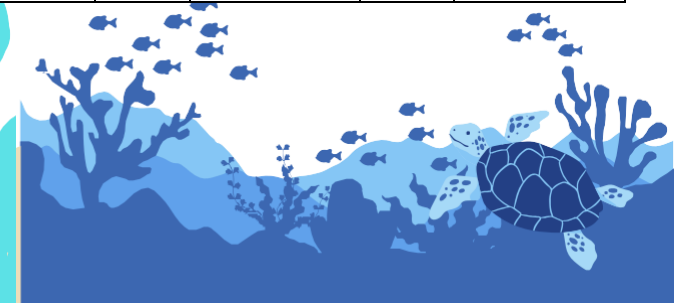




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi				1,275,858,036		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000		750,000,000
3.25.03.1.0 6.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Unit		-	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000
	- PPW I			0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
	- PPW II			0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
	- PPW III			0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
3.25.03.1.0 6.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Layanan		1,275,858,036		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000		450,000,000
	- PPW I			1	258,613,286	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
	- PPW II			3	921,432,750	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
	- PPW III			1	95,812,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	265.65 2,78	5,472,086,889	267.56 9,25	4,476,394,685	270.077 ,57	4,226,307,599	273.1 98,17	3,970,057,350	276.65 0,64	3,951,376,306	280.49 8,17	3,909,022,255
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut				330,049,618		2,407,000,020		2,157,000,000		1,957,000,000		1,957,000,001		1,905,000,000
3.25.04.1.0 5.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	0	0	2	700,000,000	2	700,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000	2	500,000,000
3.25.04.1.0 5.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	240,623,818	1	1,007,000,020	1	757,000,000	1	757,000,000	1	757,000,000	1	705,000,000

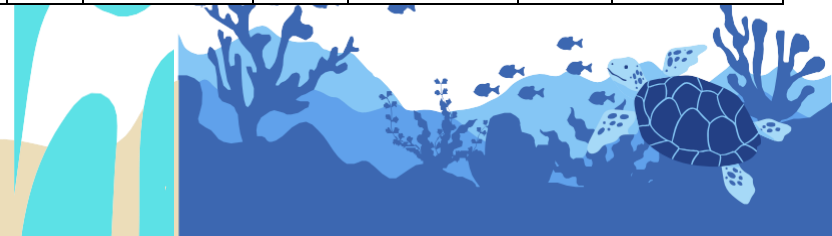




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.04.1.0 5.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Orang	4	89,425,800	4	450,000,000	4	450,000,000	4	450,000,000	4	450,000,000	4	450,000,000
3.25.04.1.0 5.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,001	1	250,000,000
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat				5,142,037,271		2,069,394,665		2,069,307,599		2,013,057,350		1,994,376,305		2,004,022,255
3.25.04.1.0 6.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	5,142,037,271	1	2,069,394,665	1	2,069,307,599	1	2,013,057,350	1	1,994,376,305	1	2,004,022,255
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	84,00	452,204,860	85,00	369,922,385	87,00	349,255,572	90,00	328,079,445	92,00	326,535,672	94,00	323,035,598
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil				452,204,860		299,922,385		284,255,572		268,079,445		266,535,672		263,035,598
3.25.05.1.0 1.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani		0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000
3.25.05.1.0 1.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan		60	225,326,900	110	229,922,385	110	214,255,572	120	198,079,445	120	196,535,672	150	193,035,598

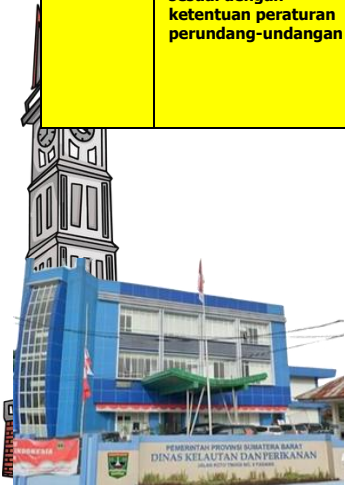




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.05.1.0 1.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		5	226,877,960	5	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	7	20,000,000	10	20,000,000
3.25.05.1.0 1.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		0	0	30	30,000,000	40	30,000,000	50	30,000,000	50	30,000,000	60	30,000,000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000
3.25.05.1.0 2.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi		0	0	3	25,000,000	3	25,000,000	4	25,000,000	5	25,000,000	7	25,000,000
3.25.05.4.03	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				0		45,000,000		40,000,000		35,000,000		35,000,000		35,000,000

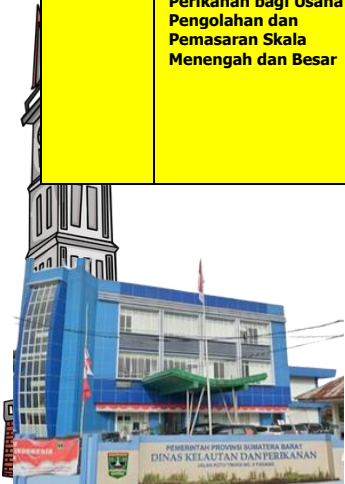




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.05.4.0 3.0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kegiatan	0	0	12	45,000,000	14	40,000,000	14	35,000,000	14	35,000,000	14	35,000,000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/ta hun	22	521,564,786	23	426,662,495	24	402,825,728	25	378,401,525	26	376,620,963	27	372,584,034
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				0		100,000,000		90,000,000		80,000,000		80,000,000		75,000,000
3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	0	0	5	100,000,000	5	90,000,000	5	80,000,000	6	80,000,000	6	75,000,000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar				74,302,786		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000

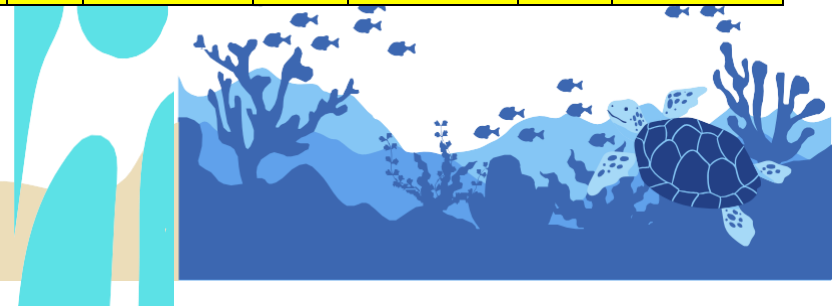




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

3.25.06.1.0 2.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan	1	74,302,786	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
3.25.06.1.0 2.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan	0	0	2	20,000,000	2	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000	3	20,000,000
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri pengolahan Ikan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi				447,262,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000
3.25.06.1.0 3.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Kab/Kota	19	447,262,000	19	80,000,000	19	80,000,000	19	80,000,000	19	80,000,000	19	80,000,000
3.25.06.3.07	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			0	0		86,662,495		72,825,728		58,401,525		56,620,963		57,584,034





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

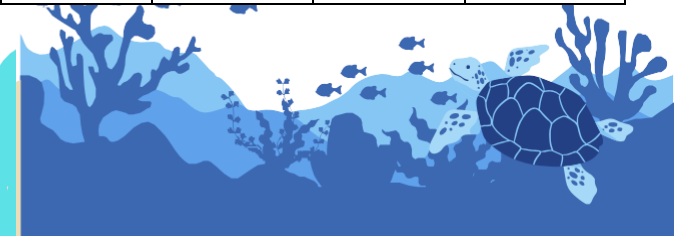
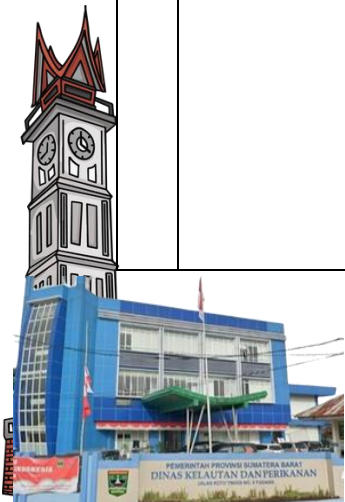
3.25.06.3.0 7.0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	unit	0	0	2	86,662,495	2	72,825,728	2	58,401,525	2	56,620,963	2	57,584,034
3.25.06.3.08	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar				0		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000		80,000,000
3.25.06.3.0 8.0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	rekomen- dasi	0	0	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	2	80,000,000	2	80,000,000
TOTAL ANGGARAN					44,667,776,568		42,663,889,795		42,512,106,464		42,352,004,129		42,794,295,270		43,184,616,450





TABEL 4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2025	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE...				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan sektor perikanan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.	Produktivitas PDRB usaha perikanan			Rupiah	14.027,87	14.308,42	14.594,59	14.886,48	15.184,21	15.487,90
		Indeks Ekonomi Biru			Nilai	25.19	27.43	29.68	31.92	34.17	36.41
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	238,100.00	240,957.20	244,089.64	247,506.89	251,219.49	255,239.00
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1.11	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
		Indeks Ekonomi Hijau			Nilai	68.69	69.51	70.33	71.15	71.97	72.79
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	265,652.78	267,569.25	270,077.57	273,198.17	276,650.64	280,498.17
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0.51	0.72	0.94	1.16	1.26	1.39
			Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	%	2.05	2.08	2.90	4.26	5.59	6.81
			Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	%	5.00	5.33	5.60	6.00	6.33	7.00





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

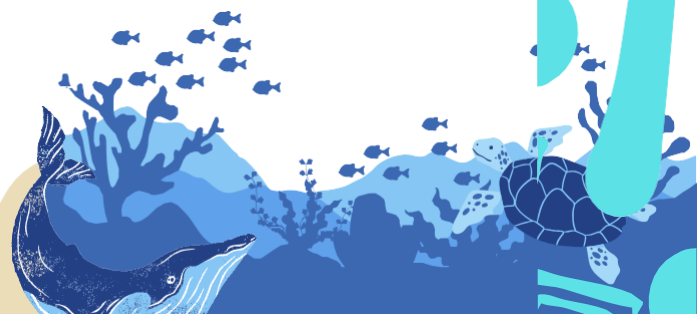
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A (81,47)	A (81,47)	A (81,49)	A (81,51)	A (81,53)	A (81,55)
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	B (84)	B (85,50)	B (87,30)	B (88,10)	B (88,30)	A (89,00)



**4.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)****DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME (BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2024)	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE (2024)	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD (2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	BPS	3.7	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	DKP	235,480.00	238,100.00	240,957.20	244,089.64	247,506.89	251,219.49	255,239.00	255,239.00
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	DKP	264,300.75	265,652.78	267,569.25	270,077.57	273,198.17	276,650.64	280,498.17	280,498.17
Luasan Kawasan Konservasi	Hektar	DKP	332,513.26	332,513.26	332,513.26	332,513.26	332,513.26	332,513.26	332,513.26	13.26
Angka Ikan	Kg/Kap/th	DKP	44,89*	22	23	24	25	26	27	27







PENUTUP

BAB 5

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan untuk lima tahun mendatang dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kelautan yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Renstra dimaksud disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan pembangunan kelautan dan perikanan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045. Dokumen ini memuat program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan telah mempertimbangkan isu-isu strategis di bidang kelautan dan perikanan.

Rencana strategis yang telah disusun ini juga merupakan pedoman bagi Sekretariat, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja, rencana anggaran yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya Renstra tahun 2025-2029.





5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, beberapa kaidah pelaksanaan akan menjadi panduan utama, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Rencana : Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat
2. Efektivitas dan Efisiensi : Pelaksanaan akan mengutamakan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.
3. Koordinasi dan Kolaborasi : Kerja sama yang baik antar bidang di internal Dinas Kelautan dan Perikanan serta kolaborasi dengan OPD lain dan pihak terkait akan diutamakan untuk kelancaran pelaksanaan.
4. Akuntabilitas dan Transparansi : Setiap tahapan pelaksanaan akan dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya akan disampaikan secara transparan sesuai ketentuan
5. Pemanfaatan Teknologi : Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
6. Setiap awal tahun, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan menyusun Rencana Kerja (RENJA) dinas, dan pada akhir tahun harus menyusun pula Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat
7. Selanjutnya Kepala Dinas tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bila diperlukan, guna tercapainya pembangunan Kelautan dan Perikanan ke depan yang lebih baik

5.3. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai target yang diharapkan. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan rutin terhadap pelaksanaan





program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra. Proses ini mencakup identifikasi deviasi antara perencanaan dan realisasi, serta pemberian rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan. Mekanisme pengendalian akan diselaraskan dengan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan secara periodik (tengah periode dan akhir periode) untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Hasil evaluasi menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan, perbaikan kebijakan, dan penyesuaian program yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor kelautan dan perikanan.

5.4. Manajemen Resiko

Manajemen resiko dalam perencanaan dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Identifikasi risiko dilakukan terhadap faktor internal maupun eksternal, seperti bencana alam, perubahan kebijakan nasional, hingga keterbatasan sumberdaya. Strategi penanganan risiko disusun melalui pendekatan mitigasi, adaptasi, dan kontinjensi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknis serta dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan strategis.

5.5 Kolaborasi Multipihak

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara rutin melakukan kolaborasi multipihak untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di wilayahnya. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis hingga masyarakat dan sektor swasta.

Beberapa contoh kolaborasi multipihak yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat antara lain :

a. Dengan Pemerintahan Pusat

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DKP berkoordinasi dengan KKP seperti Balai Pengelolaan Sumberdaya pesisir dan Laut (BPSPL) dalam berbagai program strategis
- Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP), melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar bekerjasama dengan UPT Pusat untuk memastikan mutu hasil perikanan sesuai standar





b. Dengan Pemerintahan Daerah

- DKP Kabupaten/Kota, kolaborasi erta terjalin dengan dinas-dinas di tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan program dan kebijakan di tingkat lokal
- Antar Dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga berkolaborasi dengan dinas-dinas lain di tingkat Provinsi seperti Dinas Pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di sektor kelautan dan perikanan

c. Dengan Lembaga Teknis

- Balai Pembudidaya Ikan, melalui UPTD seperti BPBALP Teluk Buo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan lembaga teknis untuk penelitian dan pengembangan komoditas perikanan seperti kerapu dan kakap

d. Dengan Sektor Swasta dan Masyarakat

- Pengusaha Perikanan, melibatkan pengusaha perikanan dalam program peningkatan produksi dan kualitas produk perikanan
- Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat ini untuk program bantuan, pelatihan dan peningkatan kesejahteraan
- Akademisi dan Lembaga Penelitian, kolaborasi dengan Universita atau lembaga penelitian untuk riset dan inovasi yang mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan

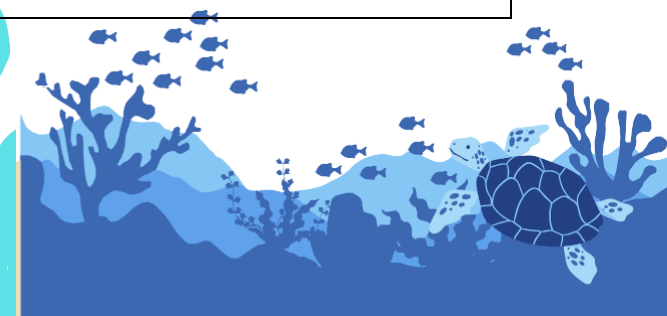
Dengan kolaborasi multipihak ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai target-target pembangunan di sektor kelautan dan perikanan seperti peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan lingkungan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan diperlukan dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat luas. Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dapat terwujud.



**Metadata Indikator Kinerja Pada Renstra Perangkat Daerah**

No	INDIKATOR	Definisi	Rumusan/Formula Perhitungan
1	2	3	4
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (I_t) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (I_b), yang dinyatakan dalam persentase. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator kesejahteraan nelayan yang menggambarkan kemampuan tukar hasil produksi perikanan (pendapatan) terhadap biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi maupun operasional usaha.	$NTN = \frac{I_t}{I_b} \times 100$
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)	Rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (I_{tPi}) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (I_{bPi}), yang dinyatakan dengan persentase. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan indikator kesejahteraan rumah tangga pembudidaya perikanan. Sama seperti NTN (Nilai Tukar Nelayan), NTPi mengukur kemampuan tukar pendapatan hasil usaha budidaya terhadap biaya konsumsi dan biaya produksi.	$NTPi = \frac{I_{tPi}}{I_{bPi}} \times 100$
3	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Perikanan Tangkap tahun } (n-1))} \times 100\%$

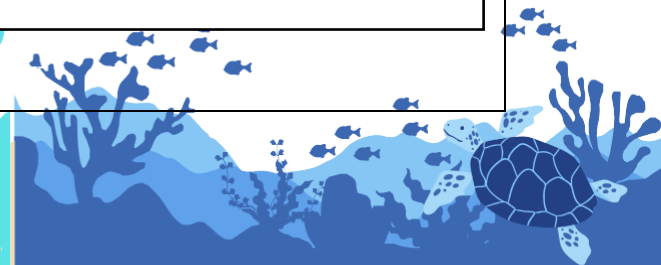
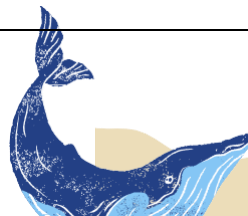




RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan volume produksi perikanan budidaya dalam suatu periode (biasanya tahunan) dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } n - \text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Perikanan Budidaya tahun } (n-1))} \times 100\%$
5	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	Indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan volume hasil produk perikanan yang diolah (baik skala industri maupun skala rumah tangga) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan dinyatakan dalam bentuk persentase (%).	$\frac{(\text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } n - \text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } (n-1))}{(\text{Produksi Pengolahan Ikan tahun } (n-1))} \times 100\%$
6	Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	Jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap penduduk dalam kurun waktu satu tahun, yang dinyatakan dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). Perhitungan Angka Konsumsi Ikan tahun 2025 merupakan konsumsi ikan di dalam rumah tangga, dengan dasar target diambil dari angka Susenas tahun 2024.	$\frac{\text{Total konsumsi ikan (kg)}}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$ Atau jika tersedia dalam ton $\frac{\text{Total konsumsi ikan (ton)} \times 1.000}{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}$
6	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Ukuran persentase perubahan (kenaikan) dari tahun ke tahun terhadap kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan melalui pendekatan berbasis ekosistem, konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, atau tata kelola terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	$\frac{(\text{Nilai evika} + \text{Persentase peningkatan pengelolaan} + \text{Persentase ketaatan pelaku usaha})}{3}$





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

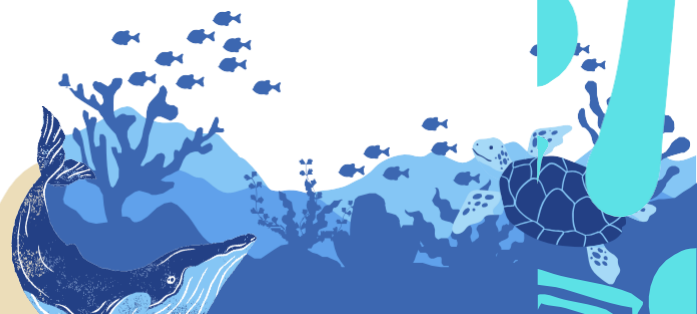
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Tingkat pencapaian akuntabilitas atas hasil (outcome) pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh OPD, diukur berdasarkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta kemampuannya untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan penilaian terhadap 4 komponen, yaitu : 1. Perencanaan Kinerja, bobot 30%. 2. Pengukuran Kinerja, bobot 30%. 3. Pelaporan Kinerja, bobot 15%. 4. Evaluasi Internal, bobot 25%.	<i>Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal</i>
8	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi adalah ukuran persepsi dan penilaian pegawai atau unit kerja pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan pendukung dalam organisasi, seperti layanan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, IT, logistik, dan lainnya. Pengolahan Data survey dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem data base dan manual.	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$





RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Identifikasi Resiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya								
	Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	-Jumlah Produksi Perikanan Tangkap -Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1. Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.	Kepala Dinas	Perubahan Iklim	Eksternal	UC	Produksi Perikanan Tangkap Berkurang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			2. Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran dan modal nelayan	Internal	C	Produksi Perikanan Tangkap Berkurang, hasil tangkapan menurun, waktu operasional lebih lama, biaya operasional meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			3. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya contohnya lampara dasar.	Kepala Dinas	-faktor ekonomi dan keterbatasan modal, -pengetahuan dan kesadaran penangkapan ramah lingkungan yang berkelanjutan kurang, -pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah	Eksternal	UC	-Terjadi Overfishing, -populasi ikan menurun, -merusak habitat dan ekosistem perairan, -hasil tangkapan menurun	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			4. Proses perizinan yang masih tidak lancar	Kepala Dinas	-Perizinan terlalu panjang melibatkan banyak tahap dan instansi - Keterbatasan sarana prasarana pelabuhan	Eksternal Internal	UC	-Biaya tambahan muncul akibat denda dan razia, -pendapatan nelayan menurun akibat kapal/alat tangkap tidak bisa beroperasi -Tingginya kasus ilegal fishing - Pelaksanaan fungsi pelayanan pelabuhan kurang optimal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	-Jumlah produksi perikanan budidaya -Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.	Kepala Dinas	-Harga Bahan Baku meningkat (tepung ikan, kedelai, jagung) -Ketergantungan pembudidaya pada pakan pabrik	Eksternal	UC	-Pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya menurun -Produksi budidaya ikan menurun sehingga budidaya tidak berkelanjutan - Fluktuasi Harga Pakan yang cenderung mahal	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			2. Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air	Kepala Dinas	-Kurangnya kesadaran terhadap pengelolaan kualitas air -keterbatasan sarana prasarana pengolahan air limbah Pembudidaya	Eksternal	UC	-sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan. -Penurunan Produksi pembudidaya ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			3. Ketersediaan induk unggul terbatas.	Kepala Dinas	-Penggunaan induk yang telah afkir oleh pembudidaya - pemuliaan induk unggul belum optimal - Keterbatasan kesadaran pembudidaya penggunaan induk unggul berkualitas	Eksternal	UC	- Kualitas benih dan tingkat Kelangsungan hidup benih menurun -Produksi budidaya menurun	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
3	Meningkatnya Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan ikan	-Produk olahan Perikanan tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi	Kepala Dinas	-Kualitas ikan / bahan baku yang rendah dan tidak segar -Kurangnya penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) - Keterbatasan anggaran sertifikasi produk	Eksternal dan Internal	UC	-Rendahnya daya saing produk perikanan -Harga jual produk rendah karena dianggap kualitas kurang baik	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat

			-Rendahnya penerapan teknologi pengolahan hasil Perikanan yang moderen	Kepala Dinas	-Keterbatasan modal pengolah dan akses teknologi terbatas	Eksternal	UC	-Rendahnya nilai tambah produk -Produk hasil perikanan sulit bersaing di pasar ekspor dan dengan produk impor -Produk olahan sulit memenuhi standar mutu, higienitas, dan keamanan pangan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			-Persaingan Produk hasil olahan ikan yang ketat	Kepala Dinas	- Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan pengolahan Produk Perikanan	Eksternal	UC	-Menurunkan harga untuk menarik konsumen sehingga keuntungan UMKM semakin menipis	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			- Akses pasar terbatas karena promosi dan branding Produk Perikanan masih lemah	Kepala Dinas	-pelaku usaha perikanan/ UMKM masih berfokus pada produksi tanpa menyadari bahwa identitas merek dan promosi memengaruhi minat konsumen.	Eksternal	UC	-produk perikanan lokal sulit dikenal luas oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional. -pasar produk olahan dikuasai oleh kompetitor	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
4	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Perairan	Persentase peningkatan pengelolaan kawasan perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Degradasi ekosistem, kerusakan mangrove, terumbu karang, pencemaran laut seperti sampah laut	Kepala Dinas	-aktivitas pemanfaatan laut dan pesisir yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan mangrove, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pembuangan sampah ke laut,	Eksternal	UC	Kerusakan terumbu karang, abrasi pantai, sampah di wilayah pesisir dan di laut -Terjadinya bleaching/pemutihan terumbu karang - stok/populasi ikan dilaut berkurang	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			Pemanfaatan ruang laut ilegal	Kepala Dinas	-kurangnya kesadaran tertib perizinan pemanfaatan ruang laut oleh pelaku usaha - Proses perizinan pemanfaatan ruang yang lama	Eksternal dan Internal	UC	-Masih banyak pelaku usaha seperti resort yang belum tertib administrasi perizinan - eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat
			Keterbatasan pengawasan pengelolaan lingkungan perairan	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran patroli pengawasan	Eksternal dan Internal	C	-illegal fishing dan overfishing	Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab/kota masyarakat

**Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko Strategis
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029**

No	Resiko	Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penangggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Kondisi cuaca ekstrim yang tidak dapat di prediksi sehingga mengurangi waktu usaha penangkapan ikan ke laut.	Mencari Mata Pencarian Alternatif saat cuaca ekstrem	Mengoptimalkan bantuan mata pencaharian alternatif seperti bantuan perikanan budidaya dan pengolahan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
2	Sarana yang dipakai masih belum memadai seperti kurangnya panjang alat tangkap yang digunakan, mesin dan perahu sudah tidak layak pakai.	Melakukan koordinasi ke Dinas Kab/kota dan monitoring evaluasi kepada nelayan Kab/Kota	Pemberian bantuan sarana prasarana yang layak	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
3	Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang merusak kelestarian sumberdaya contohnya lampara dasar.	Melakukan rapat pengawasan dan koordinasi ke Dinas Kab/kota	Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di ganti dengan Bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
4	Proses perizinan yang masih tidak lancar	Melakukan gerai perizinan terpadu	koordinasi DPMPTSP, KSOP, dan Dinas Kab/kota	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
5	Biaya produksi yang tinggi khususnya pada Pakan Ikan, sehingga tidak memberikan penambahan yang signifikan terhadap pendapatan pembudidaya ikan.	Memberikan bantuan berupa benih dan pakan ikan berkualitas	Mencari alternatif bahan baku dan pembuatan pakan ikan mandiri	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
6	Terjadinya penurunan mutu lingkungan perairan dan rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air	Monitoring Kesehatan ikan dan hama penyakit ikan ke Kab/kota	Melakukan koordinasi ke Kab/Kota dan melakukan pengambilan sampel penyakit ikan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV

7	Ketersediaan induk unggul terbatas.	Menyediakan Bantuan induk unggul dan pakan ikan	Koordinasi dengan Kab/kota, menyediakan bantuan induk ikan unggul dan pakan , berkoordinasi dengan KKP untuk mendorong sertifikasi Pembudidaya (CPIB dan CBIB)	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
8	Produk olahan Perikanan tidak memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi	Pengujian dan pengawasan mutu ke pasar dan unit pengolah ikan	Pengujian, monitoring dan pengawasan mutu ke pasar dan unit pengolah ikan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
9	Rendahnya penerapan teknologi pengolahan hasil Perikanan yang moderen	Pemberian bantuan alat pengolahan	Pemberian bantuan alat pengolahan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
10	Persaingan Produk hasil olahan ikan yang ketat	Pembinaan ke unit pengolah ikan agar kualitas ikan terjaga, diversifikasi dan inovasi produk	Pembinaan ke unit pengolah ikan agar kualitas ikan terjaga, diversifikasi dan inovasi produk	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
11	Akses pasar terbatas karena promosi dan branding Produk Perikanan masih lemah	mendorong koordinasi kredit usaha pengolahan ikan, mengikuti kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Makan Ikan (Forikan) dan Gerakan Masyarakat makan ikan (Gemarikan)	Mengikuti kontes, bazar dan mengikuti kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat Makan Ikan (Forikan) dan Gerakan Masyarakat makan ikan (Gemarikan)	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
12	Degradasi ekosistem, kerusakan mangrove, terumbu karang, pencemaran laut seperti sampah laut	Penanaman Mangrove dan cemara laut, melakukan Transplantasi terumbu karang, mengikuti kegiatan Bersih pantai, restocking perairan umum	Melakukan Restocking ke Perairan Umum	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
13	Pemanfaatan ruang laut ilegal	Pegawasan Perizinan PKKPR, dan Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota,	Pengawasan Perizinan PKKPR , Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota	Kepala Dinas	TW III dan TW IV
14	Keterbatasan pengawasan pengelolaan lingkungan perairan	Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota, patroli pengawasan	Koordinasi dan pengawasan ke Kab/Kota, Patroli pengawasan	Kepala Dinas	TW III dan TW IV